



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Pemerintah Kota Balikpapan sebagai Entitas Pelaporan menyusun Laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan tersebut merupakan gabungan Laporan dari 36 (tiga puluh enam) entitas akuntansi yang merupakan unit pemerintahan (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Balikpapan di bawah kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Entitas akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2018 diklasifikasikan menurut urusannya yaitu :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial.
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang terdiri dari : Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip.
3. Urusan Pilihan yang terdiri dari : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perdagangan.
4. Penunjang Urusan yang terdiri dari : Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Pendukung Urusan yang terdiri dari : Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
6. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Kewilayahan yang terdiri dari : Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur.

LKPD Pemerintah Kota Balikpapan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan SAP berbasis Akrua. Pada dasarnya LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa,

dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama Tahun Anggaran 2018.

LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan;
- n. Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 38 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- o. Peraturan Wali Kota Balikpapan No.36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian target kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Bab V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 5.2.1. Perubahan SAL
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset

- 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Pos Luar Biasa
 - 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1. Perubahan Ekuitas
 - 5.7. Pengungkapan Informasi Lainnya
- Bab VI : Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi makro ekonomi kota Balikpapan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung dengan Migas menunjukkan perkembangan yang cukup baik. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2016 sebesar Rp73,18 trilyun, tahun 2017 sebesar Rp75,95 trilyun dan tahun 2018 menjadi Rp80 triliun atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,55% per tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2016 sebesar Rp80,07 trilyun, tahun 2017 sebesar Rp86,73 trilyun dan tahun 2018 menjadi sebesar Rp95,42 trilyun atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,67% per tahun. Hal ini didorong oleh peningkatan produksi Kilang Minyak di kota Balikpapan, kenaikan harga Minyak Bumi dalam 3 tahun terakhir, walaupun tidak signifikan namun ikut menyumbang kenaikan PDRB Kota Balikpapan.

PDRB Kota Balikpapan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2016 sebesar Rp34,53 trilyun, tahun 2017 sebesar Rp35,93 trilyun dan tahun 2018 menjadi sebesar Rp37,98 trilyun atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,72% per tahun. Sedangkan PDRB Kota Balikpapan tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2016 sebesar Rp46,48 trilyun, tahun 2017 sebesar Rp 51,01 trilyun dan tahun 2018 menjadi sebesar Rp56,87 trilyun atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,19% per tahun. Sesuai komitmen Kepala Daerah kota Balikpapan yang tidak memberikan izin pertambangan, maka Kota Balikpapan mengandalkan roda perekonomiannya dari sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Industri Kelautan dan Perikanan serta sector-sector lainnya. Lesunya perekonomian global dalam 3 tahun terakhir berimbas terhadap sector-sector andalan. Namun demikian, Kota Balikpapan masih mampu mengalami peningkatan.

PDRB Per Kapita Kota Balikpapan tahun 2016 sebesar Rp127,74 juta, tahun 2017 sebesar Rp 136,37 juta dan tahun 2018 menjadi sebesar Rp142,25 juta atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,25% per tahun. PDRB per kapita mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir ditunjang dari pembangunan infrastruktur seperti Jalan, Waduk, Sentra Industri dan lainnya. Selain itu sector swasta turut memberikan andil, hal ini dilihat dari menjamurnya Pembangunan Perumahan, Hotel, Apartemen dan lainnya. Dengan lesunya perekonomian global dalam 3 tahun terakhir, namun dapat kita simpulkan bahwa Kota Balikpapan masih menarik dimata para investor.

Demikian pula dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan menunjukkan angka yang cukup berfluktuatif yaitu tahun 2016 sebesar 4,87%, tahun 2017 sebesar 3,78% dan tahun 2018 menjadi 5,34%. Jika kita lihat angka-angka tersebut, tentu itu bukan angka yang mengembirakan. Namun jika kita bandingkan secara regional maupun nasional, maka angka tersebut masih terbilang cukup baik. Berawal dari jatuhnya harga jual Batubara, bisa dipastikan hal tersebut ikut memukul sector lainnya. Dampak terparah dialami pada tahun 2015 dimana pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,79 %, sementara beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan ekonomi dibawah 2%. Tahun 2016 merupakan tahun Rekonstruksi dimana Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan mulai berbenah. Sector-sector lain seperti Industri Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata mulai ditingkatkan dan diharapkan menjadi sector andalan kedepannya.

Tingkat inflasi selama tiga tahun terakhir sejak 2016 sebesar 4,13% pada tahun 2017 sebesar 2,45% dan 2018 sebesar 3,13%. Tingginya Inflasi di kota Balikpapan pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan harga sembako. Naiknya harga Beras, Telur ayam, Cabe dan Bawang mendongkrak tingkat inflasi. Hal ini menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Balikpapan bagaimana tingkat inflasi bisa ditekan. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah meningkatkan kerjasama dengan Pemkab PPU dan Paser terkait Pemenuhan Kebutuhan Beras, Cabe dan Telur, sementara untuk kebutuhan Bawang menjalin kerjasama dengan Pemkab Brebes. Hasil kerjasama tersebut dapat dilihat dari turunnya tingkat inflasi pada tahun 2017. Namun tahun 2018 kembali naik disebabkan oleh tingginya harga ayam potong. Hal ini turut mempengaruhi dunia usaha khususnya industri makanan.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan diantaranya menggalakkan kembali program Gemarikan (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan). Sebagai kota yang berada di pesisir laut, tentu saja Kota Balikpapan memiliki potensi besar dalam pengembangan industri Kelautan dan Perikanan. Usaha meningkatkan produksi ikan, udang, kepiting dan lainnya terus ditingkatkan sehingga kedepannya inflasi dapat ditekan dan memberikan substitusi sumber protein hewani yang terjangkau dan tersedia bagi masyarakat kota Balikpapan.

2.2. Kebijakan keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. RPJMD Kota Balikpapan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu **“Mewujudkan Kota Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”**. RPJMD juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur/Renstra Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJP Nasional. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam APBD Kota Balikpapan setiap tahun.

Dalam tahun 2018 APBD disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sangat dipengaruhi dengan kondisi dan posisi keuangan tahun 2018. Implementasi kebijakan keuangan erat kaitannya dengan posisi saldo kas yang dicerminkan dalam Laporan Arus Kas maupun Neraca Pemerintah Kota Balikpapan.

Berikut dijelaskan beberapa kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

- a. Sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018 diproyeksikan dari pendapatan sebesar Rp2.227.832.853.277,00 dan dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA tahun 2017 sebesar Rp198.234.445.532,16. Penerimaan pendapatan direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp678.500.000.000,00, Pendapatan Transfer sebesar

Rp1.546.332.853.277,00 dan dari Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah sebesar Rp3.000.000.000,00.

- b. Pengeluaran Daerah dibagi kedalam tiga bagian yaitu Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp2.404.482.298.809,00 yang dibagi kedalam Belanja Operasi sebesar Rp1.653.090.013.488,00, Belanja Modal sebesar Rp746.392.285.321,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00. Untuk Transfer dialokasikan sebesar Rp3.085.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 18.500.000.000,00.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang menggambarkan kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan pada tahun Anggaran 2018 setelah perubahan mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp228 Milyar Lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp174,55 milyar atau 76,56%. Program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Kantor Arsip dan Perpustakaan serta beberapa Kecamatan dan Kelurahan.

URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp228,58 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp153,51 milyar lebih atau 76,56%. Program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan tahun 2018 dilaksanakan oleh: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp457,61 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp384,72 milyar lebih atau 84,07%. Program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 dilaksanakan oleh: Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp43,77 milyar dan dapat direalisasikan sebesar Rp38,37 milyar, LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun 2018 atau 87,66%. Program dan kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp32 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp27,39 milyar lebih atau 85,62%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat tahun 2018 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Satpol PP, Kesbangpol, dan Seluruh Kecamatan dan Kelurahan Kota Balikpapan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial pada tahun anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp5,13 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp4,49 milyar lebih atau 85,90%. Program dan kegiatan pada Urusan Sosial tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

URUSAN KETENAGAKERJAAN

Urusan Ketenagakerjaan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp2,32 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp2,11 milyar lebih atau 90,78%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp77,86 milyar dan dapat direalisasikan sebesar Rp51,57 milyar lebih atau 66,24%. Program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp15,31 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp11,97 milyar lebih atau 78,16%. Program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.

URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp3,83 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp3,16 milyar lebih atau 82,48%. Program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal tahun 2018 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, dan Seluruh Kecamatan Kota Balikpapan.

URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pertanahan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp80,72 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp58,85 milyar lebih atau 72,91%. Program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah dan Seluruh Kecamatan

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp6,31 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp5,43 milyar lebih atau 86,04%. Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp69,20 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp59,20 milyar lebih atau 85,54%. Program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup tahun 2018 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, dan Kecamatan dan Kelurahan.

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp5,06 milyar lebih dan dapat direalisasikan

sebesar Rp4,53 milyar lebih atau 89,43%. Program dan kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan, Kecamatan dan Kelurahan.

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6,37 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5,81 milyar lebih atau 91,20%. Program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 5,37 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp3,58 milyar lebih atau 66,70%. Program dan kegiatan pada Urusan Perpustakaan tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan serta Seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp15,59 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp11,59 milyar lebih atau 74,37%. Program dan kegiatan pada Urusan Pertanian tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.

URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp29,25 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp27,14 milyar lebih atau 92,77%. Program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Balikpapan dan Kelurahan.

URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp13,93 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp12,51 milyar lebih atau 89,80%. Program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pasar, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.

URUSAN PENUNJANG

BIDANG PERENCANAAN

Urusan Perencanaan pada tahun anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp5,63 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp4,83 milyar lebih atau 85,81%. Program dan kegiatan pada Urusan Pertanian tahun 2018 dilaksanakan oleh Bappeda Litbang dan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

BIDANG PENGAWASAN

Urusan Pengawasan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp3,32 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp2,90 milyar lebih atau 87,46%. Program dan kegiatan pada Urusan Pengawasan tahun 2018 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

BIDANG KEPEGAWAIAN

Urusan Kepegawaian pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp12,05 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp8,45 milyar lebih atau 70,13%. Program dan kegiatan pada Urusan Kepegawaian tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BIDANG KEUANGAN

Urusan Keuangan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp19,33 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp12,69 atau 65,66%. Program dan kegiatan pada Urusan Keuangan tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Kesatuan bangsa dan Politik pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp2,94 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp2,77 milyar lebih atau 94,26%. Program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan bangsa dan Politik tahun 2018 dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.

KECAMATAN

Urusan Kewilayahan pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp47,10 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp43,26 milyar lebih atau 91,84%. Program dan kegiatan pada Urusan Kewilayahan tahun 2018 dilaksanakan oleh Kecamatan se Kota Balikpapan.

URUSAN PENDUKUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Urusan Sekretariat Daerah pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp99,16 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp85,45 milyar lebih atau 86,17%. Program dan kegiatan pada Urusan Sekretariat Daerah tahun 2018 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

SEKRETARIAT DPRD

Urusan Sekretariat Daerah pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp56,07 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp46,48 milyar lebih atau 82,90%. Program dan kegiatan pada Urusan Sekretariat DPRD tahun 2018 dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara rinci dapat dijelaskan dalam LKPJ Walikota Balikpapan Tahun 2018.

Selama pelaksanaan APBD tahun 2018, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Dari sisi Pendapatan, dapat disimpulkan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.

2. Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi Pendapatan Asli Daerah.
5. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan.

Sementara dari sisi Belanja, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan/ Pembangunan di enam bulan terakhir. Perlu koordinasi dan sinkronisasi seluruh pihak sehingga perencanaan, kelengkapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan dapat dikerjakan saat memasuki triwulan kedua.
2. Pelaksanaan anggaran yang meleset dari rencana yang telah ditetapkan. Perlunya peningkatan pemahaman dan kecermatan dalam penyusunan anggaran sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan bisa lebih cepat, tepat sasaran dan efektif demi menghindari tidak teralisasinya anggaran yang telah tersusun atau bahkan permasalahan hukum dikemudian hari.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Walikota (Perwali) Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

Tanggungjawab Laporan Keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam aktifitasnya Entitas Laporan Keuangan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk kemudian digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Balikpapan yang berjumlah 36 OPD

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan yang terdiri dari 36 entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPEserta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Berikut disampaikan dasar-dasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

- a. LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu tahun periode.
- b. LPSAL memberikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada tahun pelaporan.

PENDAPATAN-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BELANJA-LRA

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU.
- c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- f. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- g. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud.
- h. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c. Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

PEMBIAYAAN-LRA

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- d. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- e. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- f. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- h. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
- i. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- j. Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

- a. Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

- a. LO memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- b. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti persediaan dan revaluasi aset tetap.

PENDAPATAN-LO

- a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- d. Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BEBAN

- a. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset terjadi, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.
- c. Dalam hal BLU, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- f. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya di atas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

- a. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- b. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

POS LUAR BIASA

- a. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
- b. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

- a. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka.

Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- b. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- c. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- d. Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat transaksi.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antara lain Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*), Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang

- a. Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya.
- b. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Penyisihan Piutang

- a. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- b. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

- c. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Belanja Dibayar Dimuka

- a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
- b. Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan meliputi:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- d. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak disajikan sebagai persediaan.
- e. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- f. Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen.
- c. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan.
- d. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- f. Investasi non permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- g. Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- h. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
 - 2) Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba (kecuali deviden) atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- i. Dasar investasi Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :
 - 1) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemkot Balikpapan kepada BPD Kaltim.
 - 2) PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal daerah pada PDAM Kota Balikpapan.
 - 3) Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan.

Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 2) Peralatan dan Mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Gedung dan Bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 5) Aset Tetap Lainnya
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- e. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- f. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- g. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- h. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- i. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Disusutkan mengikuti masa manfaat aset induknya.
- j. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- k. Penyusutan aset tetap dimulai saat perolehan dan siap digunakan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*)

Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Aset Lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan aset tetap yang diserahkan.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga

Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban perhitungan pihak ketiga(PFK)

- a. Kewajiban perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Pendapatan Diterima Di Muka

Merupakan Pendapatan yang diterima dari pihak ketiga namun manfaatnya akan diberikan di periode berikutnya.

Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Utang Dalam Negeri

- a. Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- b. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang Luar Negeri

- a. Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- b. Utang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Balikpapan Per 31 Desember 2018, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris. Dalam penyajiannya, Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

- a. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Aktivitas investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan dan Aset lain-lain.
- c. Aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- d. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Pendapatan Transfer
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Belanja Subsidi
 - 4) Belanja Hibah
 - 5) Belanja Bantuan Sosial
 - 6) Belanja Tak Terduga

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Penjualan investasi jangka panjang (saham, obligasi)
 - 2) Penjualan aset tetap
- b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal
 - 2) Penyertaan Modal

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

- a. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pinjaman
 - 2) Penerimaan dari Utang Obligasi
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Pokok Pinjaman
 - 2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

- a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:
 - 1) Penerimaan PFK.
 - 2) Penerimaan Panjar

- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
- 1) Pengeluaran PFK.
 - 2) Pengeluaran panjar

Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal neraca.

Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas dikeluarkan dari Laporan Arus Kas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Pendapatan	2.227.832.853.277,00	2.230.736.621.233,10	100,13	1.873.966.991.358,01
2.	Belanja	2.404.482.298.809,00	2.119.971.369.743,75	88,17	1.759.664.053.267,85
3.	Transfer	3.085.000.000,00	998.806.796,00	32,38	1.076.238.488,00
4.	Pembiayaan	179.734.445.532,00	181.868.841.735,20	100,63	85.007.745.930,00

Berikut penjelasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 untuk pendapatan :

5.1 PENDAPATAN	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	2.227.832.853.277,00	2.230.736.621.233,10	1.873.966.991.358,01

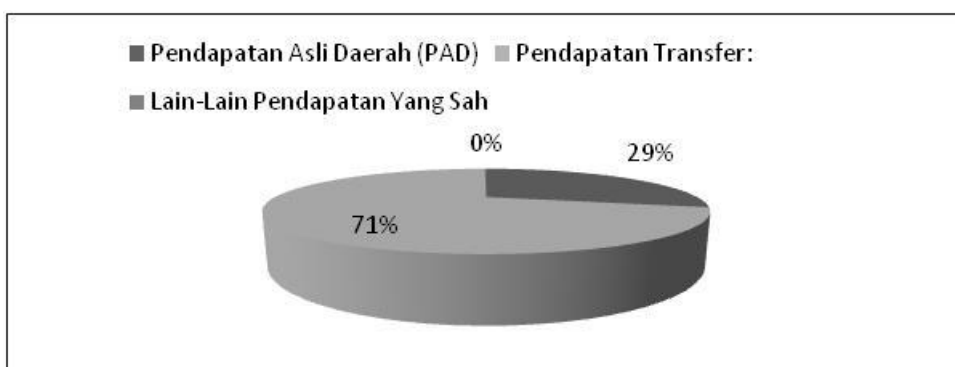
Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2018 Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.227.832.853.277,00 dengan realisasi sebesar Rp2.230.736.621.233,10 atau 100,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp356.769.629.875,09 atau 19,04%. Realisasi dan target masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	%	Kenaikan/Penurunan
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	678.500.000.000,00	646.868.407.485,10	612.250.040.990,01	5,65	34.618.366.495,09
2.	Pendapatan Transfer:	1.546.332.853.277,00	1.580.568.213.748,00	1.259.322.950.368,00	25,51	321.245.263.380,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	2.394.000.000,00	37,84	906.000.000,00
	Jumlah	2.227.832.853.277,00	2.230.736.621.233,10	1.873.966.991.358,01	19,04	356.769.629.875,09

Grafik 1
Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2018



5.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		678.500.000.000,00	646.868.407.485,10	612.250.040.990,01

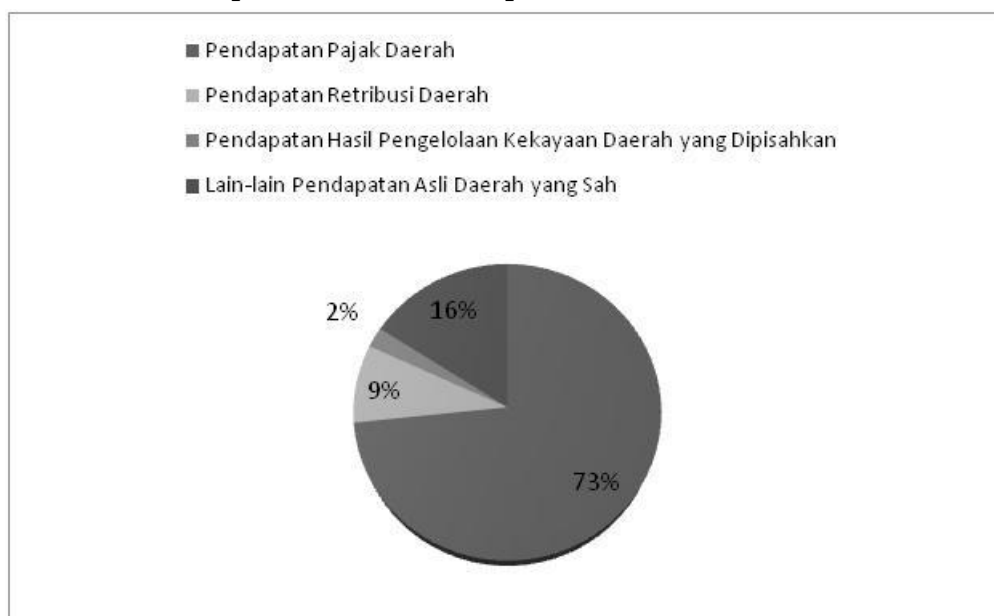
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada tahun 2018, PAD dianggarkan sebesar Rp678.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp646.868.407.485,10 atau 95,34%. Realisasi pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 5,65% dari tahun sebelumnya. Rincian realisasi PAD dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	474.455.854.717,30	450.213.740.232,52	24.242.114.484,78	5,38
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	55.054.750.772,39	47.563.009.260,52	7.491.741.511,87	15,75
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.360.001.940,84	15.163.120.190,93	(803.118.250,09)	(5,30)
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	102.997.800.054,57	99.310.171.306,04	3.687.628.748,53	3,71
	Jumlah	646.868.407.485,10	612.250.040.990,01	34.618.366.495,09	5,65

Grafik 2

Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018



5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	491.114.106.750,00	474.455.854.717,30	450.213.740.232,52

Pendapatan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak daerah dianggarkan sebesar Rp491.114.106.750,00 dengan realisasi sebesar Rp474.455.854.717,30 atau 96,61%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya senilai 5,38% dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5. 4
Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	TA 2018		Realisasi TA 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Pajak Hotel	42.000.000.000,00	44.215.141.346,00	41.789.257.635,00	2.425.883.711,00	5,81
2.	Pajak Restoran	74.500.000.000,00	83.249.949.477,00	65.995.675.877,00	17.254.273.600,00	26,14
3.	Pajak Hiburan	23.500.000.000,00	24.237.334.052,00	21.255.244.544,00	2.982.089.508,00	14,03
4.	Pajak Reklame	9.000.000.000,00	9.223.028.948,00	8.444.763.528,67	778.265.419,33	9,22
5.	Pajak Penerangan Jalan	110.000.000.000,00	114.417.353.678,00	103.528.130.820,00	10.889.222.858,00	10,52
6.	Pajak Parkir	20.000.000.000,00	19.930.159.455,00	17.524.710.030,00	2.405.449.425,00	13,73
7.	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.512.142.075,60	2.435.810.067,60	76.332.008,00	3,13
8.	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	43.765.000,00	46.517.000,00	(2.752.000,00)	(5,92)
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000,00	849.201.125,00	5.531.850.000,00	(4.682.648.875,00)	(84,65)
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	122.574.106.750,00	90.186.192.508,00	89.241.768.743,00	944.423.765,00	1,06

No.	Uraian	TA 2018		Realisasi TA 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	82.500.000.000,00	85.591.587.052,70	94.420.011.987,25	(8.828.424.934,55)	(9,35)
	Jumlah Pajak Daerah	491.114.106.750,00	474.455.854.717,30	450.213.740.232,52	24.242.114.484,78	5,38

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan TA 2018 dibandingkan dengan TA 2017 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

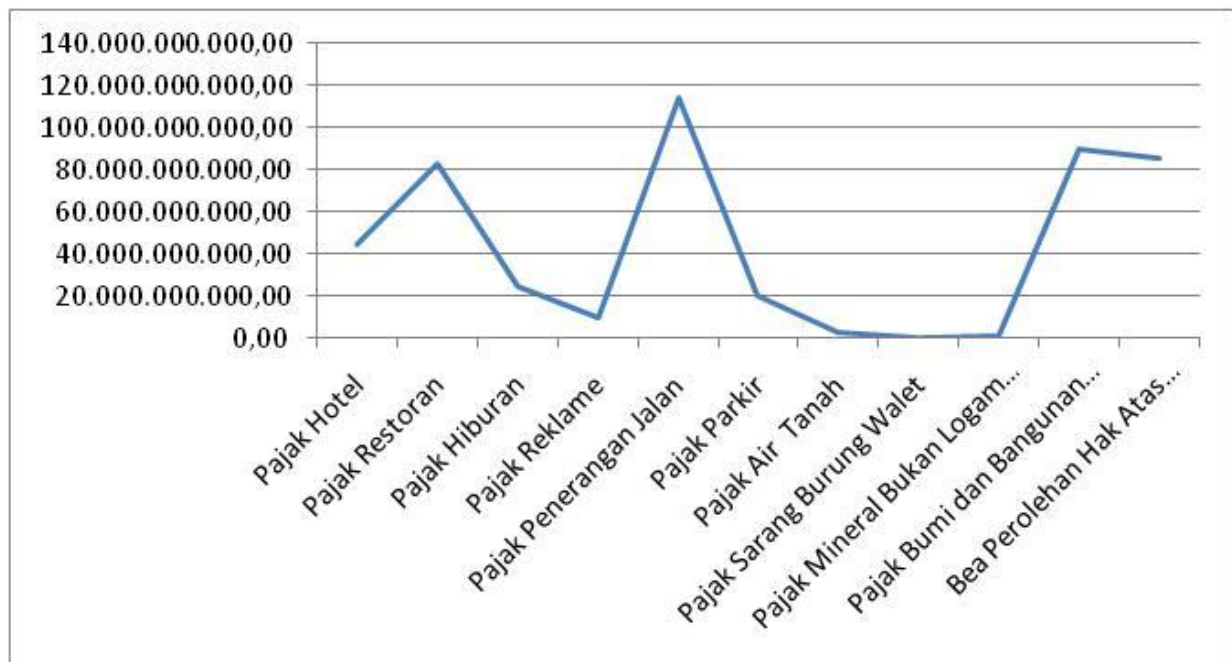
- a. Target Pajak Hotel Tahun 2018 sebesar Rp.42.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp44.215.141.346,00,- atau 105,27%. Tercapainya target tersebut karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Hotel, meningkatnya tingkat hunian hotel, dan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak hotel seiring dengan kegiatan intensifikasi serta pengawasan secara berkala. Penerimaan Pajak Hotel pada Tahun 2018 naik sebesar 5,81% dari penerimaan tahun 2017 atau senilai Rp41.789.257.635,00.
- b. Target Pajak Restoran Tahun 2018 sebesar Rp74.500.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp 83.249.949.477,00,- atau 111,74%. Tercapainya target tersebut karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Restoran dan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak restoran seiring dengan kegiatan intensifikasi serta pengawasan secara berkala. Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018 naik sebesar 26,14% dari penerimaan tahun 2017 atau senilai Rp65.995.675.877,00
- c. Target Pajak Hiburan Tahun 2018 sebesar Rp23.500.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp24.237.334.052,00,- atau 103,14%. Tercapainya target tersebut karena meningkatnya omset wajib Pajak Hiburan terutama untuk tontonan film/bioskop dan karaoke dan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak hiburan seiring dengan kegiatan intensifikasi serta pengawasan secara berkala. Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2018 naik sebesar 14,03% dari penerimaan tahun 2017 atau senilai Rp21.255.244.544,00.
- d. Target Pajak Reklame Tahun 2018 sebesar Rp9.000.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp9.223.028.948,00 atau 102,48%. Tercapainya target tersebut karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Reklame dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak reklame meningkat seiring dengan kegiatan intensifikasi (penyisiran). Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2018 naik sebesar 9,22% dari penerimaan tahun 2017 atau senilai Rp8.444.763.528,67
- e. Target Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 sebesar Rp110.000.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp114.417.353.678,00,- atau 104,02%. Tercapainya target tersebut karena adanya kenaikan tarif dasar listrik oleh PT. PLN (Persero) yang berimbas pada kenaikan pajaknya. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 naik sebesar 10,52% dari penerimaan tahun 2017 atau senilai Rp103.528.130.820,00.
- f. Target Pajak Parkir Tahun 2018 sebesar Rp20.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 19.930.159.455,00,- atau 99,65%. Tidak tercapainya target tersebut karena adanya penurunan omset pada parkir PT. Angkasa Pura sejak November 2018, dengan indikasi terjadi penurunan penumpang karena pembukaan Bandara Internasional APT Pranoto Samarinda. Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018 naik sebesar 13,73% dari penerimaan tahun 2017 atau senilai Rp17.524.710.030,00.
- g. Target Pajak Air Tanah Tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.512.142.075,60 atau 100,49%. Tercapainya target tersebut karena bertambahnya jumlah

Wajib Pajak Air Tanah dan adanya kegiatan intensifikasi serta pengawasan bersama Dinas Lingkungan Hidup secara berkala. Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2018 naik sebesar 3,13% dari penerimaan tahun 2017 Rp2.435.810.067,60.

- h. Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018 sebesar Rp40.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp43.765.000,00,- atau 109,41%. Tercapainya target tersebut karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sarang burung walet. Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018 turun sebesar 5,92% dari penerimaan tahun 2017 atau senilai Rp 46.517.000,00.
- i. Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp849.201.125,00,- atau 18,87%. Tidak tercapainya target tersebut karena sejak April 2018, Pemerintah Kota Balikpapan belum melakukan pemungutan dikarenakan adanya rekomendasi dari BPK. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018 turun sebesar 84,65% dari penerimaan tahun 2017 atau senilai Rp5.531.850.000,00.
- j. Target PBB P2 Tahun 2018 sebesar Rp122.574.106.750,00,- dengan realisasi sebesar Rp90.186.192.508,00,- atau 73,58%. Tidak tercapainya target tersebut karena adanya perbaikan basis data PBB P2 secara bertahap. Penerimaan PBB P2 Tahun 2018 naik sebesar 1,06% dari penerimaan tahun 2017 atau senilai Rp89.241.768.743,00.
- k. Target BPHTB Tahun 2018 sebesar Rp82.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp85.591.587.052,70 atau 103,75%. Tercapainya target tersebut karena bertambahnya transaksi jual beli atau peralihan hak lain atas tanah dan/atau bangunan. Penerimaan BPHTB tahun 2018 turun sebesar 9,35% dari penerimaan tahun 2017 senilai Rp94.420.011.987,25.

Grafik 3

Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018



5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	70.885.893.250,00	55.054.750.772,39	47.563.009.260,52

Merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada tahun 2018 Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp70.885.893.250,00 dengan realisasi sebesar Rp55.054.750.772,39 atau 77,67%. Realisasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya senilai 15,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dan 2017

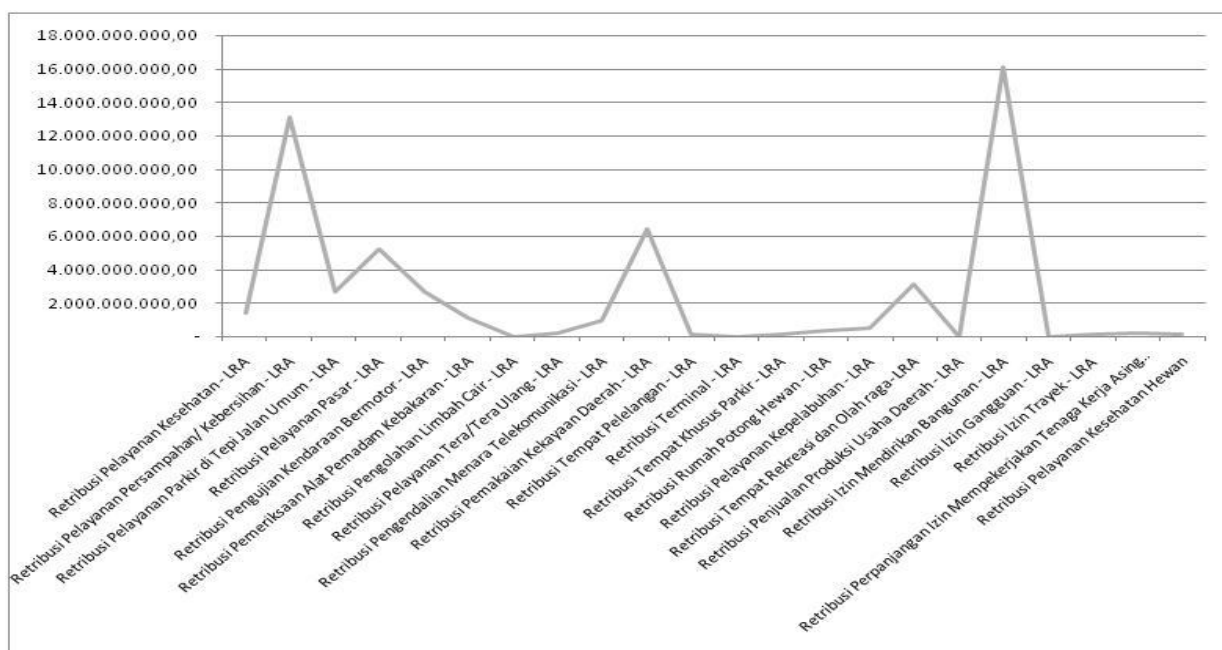
No.	Uraian	TA 2018		TA 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.470.918.000,00	1.452.805.575,00	3.741.121.727,31	(2.288.316.152,31)	(61,17)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	14.000.000.000,00	13.121.193.433,00	9.993.324.891,00	3.127.868.542,00	31,30
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	8.260.130.000,00	2.731.115.600,00	1.149.475.000,00	1.581.640.600,00	137,60
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	5.000.000.000,00	5.245.859.204,00	4.772.017.913,00	473.841.291,00	9,93
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	3.325.010.000,00	2.732.760.000,00	1.821.010.000,00	911.750.000,00	50,07
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	1.500.000.000,00	1.137.769.117,45	1.066.162.235,21	71.606.882,24	6,72
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	-	-	133.758.750,00	(133.758.750,00)	(100,00)
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	188.580.850,00	195.353.400,00	139.171.575,00	56.181.825,00	40,37
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	693.494.400,00	1.004.371.200,00	406.531.200,00	597.840.000,00	147,06
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	10.436.630.000,00	6.414.262.837,94	4.152.604.069,00	2.261.658.768,94	54,46
11	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	189.500.000,00	140.380.500,00	24.450.000,00	115.930.500,00	474,15
12	Retribusi Terminal - LRA	33.840.000,00	22.724.500,00	28.986.000,00	(6.261.500,00)	(21,60)
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	360.000.000,00	126.903.000,00	-	126.903.000,00	-
14	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	500.000.000,00	376.486.250,00	337.215.350,00	39.270.900,00	11,65
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	315.750.000,00	527.212.000,00	101.198.500,00	426.013.500,00	420,97
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	4.000.000.000,00	3.155.300.000,00	2.133.215.000,00	1.022.085.000,00	47,91
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	10.500.000,00	6.295.000,00	-	6.295.000,00	-
18	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	20.000.000.000,00	16.123.603.555,00	11.230.805.350,00	4.892.798.205,00	43,57
19	Retribusi Izin Gangguan - LRA	-	-	5.878.032.900,00	(5.878.032.900,00)	(100,00)
20	Retribusi Izin Trayek - LRA	248.740.000,00	140.750.000,00	44.965.000,00	95.785.000,00	213,02
21	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	202.800.000,00	221.985.600,00	273.923.800,00	(51.938.200,00)	(18,96)
22	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	150.000.000,00	177.620.000,00	135.040.000,00	42.580.000,00	31,53
	Pendapatan Retribusi Daerah	70.885.893.250,00	55.054.750.772,39	47.563.009.260,52	7.491.741.511,87	15,75

Dari rincian realisasi di atas terdapat kenaikan dan penurunan nilai retribusi yang cukup signifikan antara tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi pelayanan kesehatan mengalami penurunan sebesar Rp(2.288.316.152,31) atau (61,17)% dari tahun sebelumnya disebabkan karena perubahan status 8 (delapan) Puskesmas di tahun 2018 menjadi BLUD dimana Puskesmas yang bersangkutan tidak lagi menyeter retribusi yang dipungut dari pasien ke Kas Daerah. Retribusi yang dipungut disetor ke Rekening Puskesmas yang bersangkutan. Pendapatan Puskesmas yang telah berubah status menjadi BLUD dilaporkan di Lain-lain PAD yang Sah pada Pos Pendapatan BLUD.
2. Retribusi Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir, Menara Telekomunikasi dan IMB mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya karena penerapan tarif retribusi yang baru berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Pelelangan, Pelayanan Kepelabuhanan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya karena penerapan tarif retribusi yang baru berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Grafik 4

Komposisi Realisasi Pendapatan retribusi daerah Tahun 2018



5.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	18.500.000.000,00	14.360.001.940,84	15.163.120.190,93

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp18.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.360.001.940,84 atau 77,62%. Pendapatan tersebut berasal dari laba/deviden atas penyertaan modal pada BUMD yaitu :

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba selaku pemegang 3,26% dari total saham hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan
- c. Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2018 ini mengalami penurunan sebesar Rp(803.118.250,09) atau 5.30% dari TA 2017 yang berjumlah Rp15.163.120.190,93 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 6

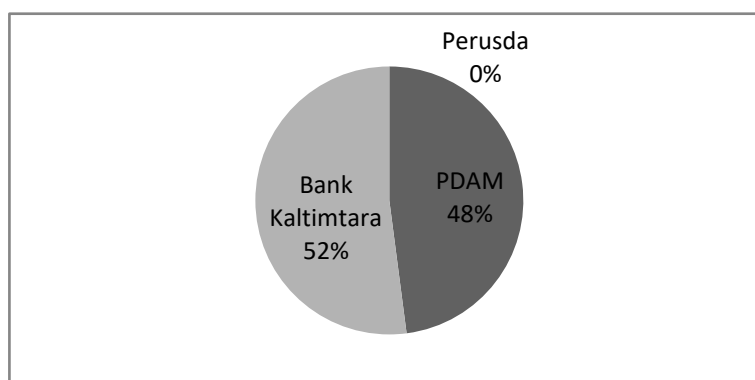
Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	TA 2018		Realisasi TA 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	PDAM	9.000.000.000,00	6.884.333.478,00	6.855.935.578,00	28.397.900,00	0,41
2.	Bank Kaltimara	8.700.000.000,00	7.475.668.462,84	8.307.184.612,93	(831.516.150,09)	(10,01)
3.	Perusda	800.000.000,00	-	-	-	-
	Jumlah	18.500.000.000,00	14.360.001.940,84	15.163.120.190,93	(803.118.250,09)	(5,30)

Grafik 5

Komposisi Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun 2018



5.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2018 (Rp) 98.000.000.000,00	Realisasi 2018 (Rp) 102.997.800.054,57	Realisasi 2017 (Rp) 99.310.171.306,04
----------------	--	--	--	---

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp98.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp102.997.800.054,57. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 3.687.628.748,53 atau 3,71% dari TA 2017 yang berjumlah Rp99.310.171.306,04. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran cicilan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

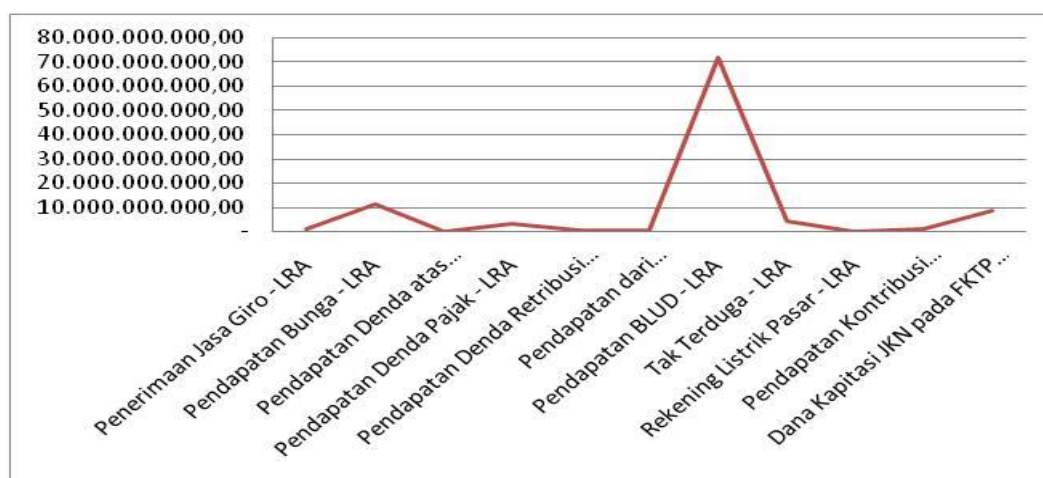
Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 7
Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SahTA 2018 dan 2017

No.	Uraian	TA 2018		TA 2017 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
		Anggaran	Realisasi			
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	48.897.300,00	44.055.200,00	4.842.100,00	10,99
2.	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.285.315.916,89	2.442.442.091,53	(1.157.126.174,64)	(47,38)
3.	Pendapatan Bunga	2.679.616.250,00	11.458.664.346,23	1.608.561.624,60	9.850.102.721,63	612,35
4.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	32.652.849,00	(32.652.849,00)	(100,00)
5.	Pendapatan Denda Pajak	2.151.706.750,00	3.382.246.824,00	3.675.351.702,00	(293.104.878,00)	(7,97)
6.	Pendapatan Denda Retribusi	500.000.000,00	653.714.272,02	630.040.024,00	23.674.248,02	3,76
7.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	400.000.000,00	401.310.698,00	542.305.605,00	(140.994.907,00)	(26,00)
8.	Pendapatan BLUD	80.615.880.300,00	72.073.534.604,77	73.707.726.592,47	(1.634.191.987,70)	(2,23)
9.	Tak Terduga	-	4.256.862.982,66	4.375.288.652,90	(118.425.670,24)	(2,71)
10.	Rekening Listrik Pasar	-	-	10.068.525,00	(10.068.525,00)	(100,00)
11.	Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel	960.860.000,00	966.734.060,00	1.024.726.237,00	(57.992.177,00)	(5,66)
12.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.191.936.700,00	8.470.519.050,00	11.216.952.202,54	(2.746.433.152,54)	(24,48)
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	98.000.000.000,00	102.997.800.054,57	99.310.171.306,04	3.687.628.748,53	3,71

Grafik 6

Komposisi Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018



5.1.2	Pendapatan Transfer	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		1.546.332.853.277,00	1.580.568.213.748,00	1.259.322.950.368,00

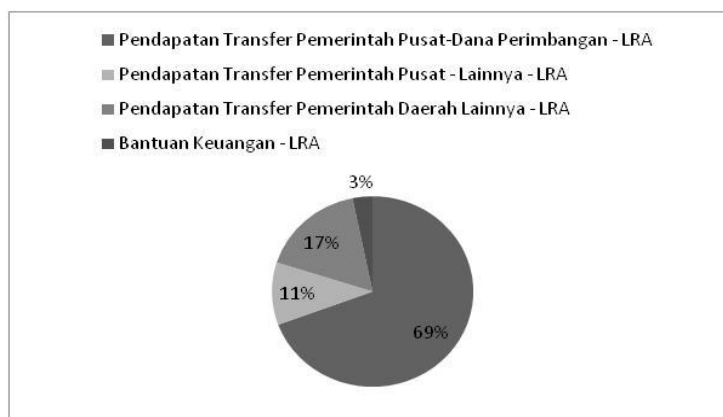
Merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.546.332.853.277,00 dengan realisasi sebesar Rp1.580.568.213.748,00 atau sebesar 102,21 % dari target sebesar Rp1.546.332.853.277,00. Rincian realisasi dari Pendapatan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 8
Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Naik/ (Turun)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.035.431.481.277,00	1.096.230.492.809,00	817.394.319.468,00	278.836.173.341,00	34,11
2.	Transfer Dari Pemerintah Pusat-Lainnya	187.389.676.000,00	167.488.330.939,00	152.578.941.900,00	14.909.389.039,00	9,77
3.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	272.682.284.000,00	266.019.978.000,00	237.077.189.000,00	28.942.789.000,00	12,21
4.	Bantuan Keuangan	50.829.412.000,00	50.829.412.000,00	52.272.500.000,00	(1.443.088.000,00)	(2,76)
	Jumlah	1.546.332.853.277,00	1.580.568.213.748,00	1.259.322.950.368,00	321.245.263.380,00	25,51

Grafik 7

Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018



5.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		1.035.431.481.277,00	1.096.230.492.809,00	817.394.319.468,00

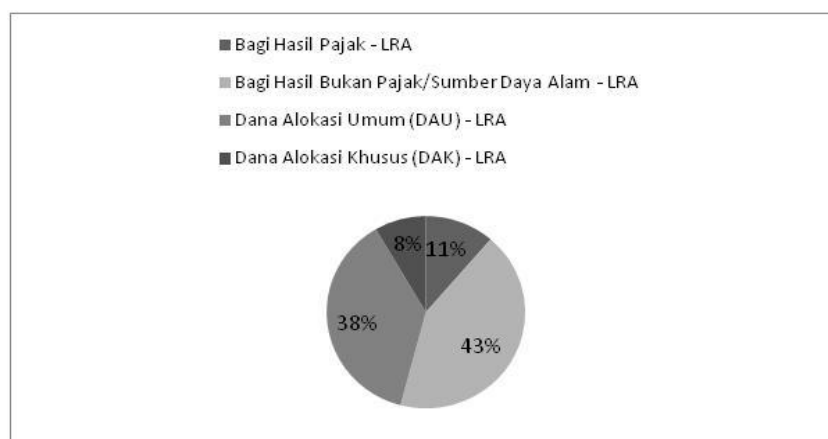
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.035.431.481.277,00 dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat tahun 2018 adalah sebesar Rp1.096.230.492.809,00 mengalami peningkatan sebesar Rp278.836.173.341,00 atau 34,11% dibandingkan dengan realisasi TA 2017. rincian realisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 9
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Naik /Turun (Rp)	%
1.	Bagi Hasil Pajak	123.953.578.235,00	143.138.978.011,00	(19.185.399.776,00)	(13,40)
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	469.470.265.663,00	220.016.427.595,00	249.453.838.068,00	113,38
3.	Dana Alokasi Umum	410.543.293.000,00	392.621.094.000,00	17.922.199.000,00	4,56
4.	Dana Alokasi Khusus	92.263.355.911,00	61.617.819.862,00	30.645.536.049,00	49,73
	Jumlah	1.096.230.492.809,00	817.394.319.468,00	278.836.173.341,00	34,11

Grafik 8

Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan Tahun 2018



5.1.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	158.569.738.666,00	123.953.578.235,00	143.138.978.011,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp158.569.738.666,00 dengan realisasi sebesar Rp123.953.578.235,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp(19.185.399.776,00) atau 13.40% dari TA 2017 yang berjumlah Rp143.138.978.011,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 5. 10
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2018

No.	Uraian	TA 2018		Realisasi TA 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan	11.072.883.156,00	8.755.532.668,00	13.228.902.385,00	(4.473.369.717,00)	(33,82)
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	147.496.855.510,00	115.198.045.567,00	129.910.075.626,00	(14.712.030.059,00)	(11,32)
	Jumlah	158.569.738.666,00	123.953.578.235,00	143.138.978.011,00	(19.185.399.776,00)	(13,40)

5.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	366.153.396.611,00	469.470.265.663,00	220.016.427.595,00

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2018 dianggarkan sebesar Rp366.153.396.611,00 dengan realisasi sebesar Rp469.470.265.663,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 249.453.838.068,00 atau 113,38% dari TA 2017 yang berjumlah Rp220.016.427.595,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 5. 11
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2018

No.	Uraian	TA 2018		Realisasi TA 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.167.271.988,00	5.826.218.444,00	2.563.519.790,00	3.262.698.654,00	127,27
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.042.211.671,00	701.234.591,00	447.937.200,00	253.297.391,00	56,55
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	140.340.059.378,00	54.539.323.240,00	25.961.116.642,00	28.578.206.598,00	110,08
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	-	106.094.112.160,00	13.047.808.915,00	93.046.303.245,00	713,12
5	Bagi Hasil dari Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara	221.603.853.574,00	302.309.377.228,00	177.996.045.048,00	124.313.332.180,00	69,84
	JUMLAH	366.153.396.611,00	469.470.265.663,00	220.016.427.595,00	249.453.838.068,00	113,38

Grafik 9

Komposisi Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2018



5.1.2.1.3 Pendapatan Dana Alokasi Umum	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	410.543.293.000,00	410.543.293.000,00	392.621.094.000,00

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemkot Balikpapan memanfaatkan Dana Alokasi Umum seluruhnya untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran gaji ASN dan anggota DPRD. Pada tahun 2018 Realisasi Dana Alokasi Umum tercapai sebesar 100% atau Rp410.543.293.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan 4,56% dari realisasi Tahun 2017 sebesar Rp392.621.094.000,00.

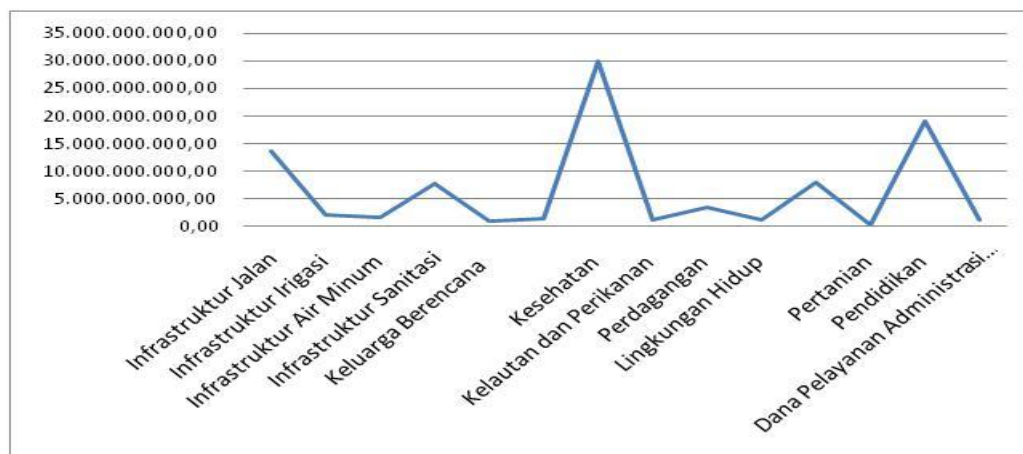
5.1.2.1.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	100.165.053.000,00	92.263.355.911,00	61.617.819.862,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus terbagi atas dua klasifikasi yaitu DAK fisik dan DAK Non Fisik. Pengelolaan dan pelaporannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada tahun 2018 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp100.165.053.000,00 dengan realisasi sebesar Rp92.263.355.911,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.645.536.049,00 atau 49,73% dari TA 2017 yang berjumlah Rp61.617.819.862,00. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

Tabel 5. 12
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	TA 2018		Realisasi TA 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	14.377.000.000,00	13.562.690.692,00	14.252.932.000,00	(690.241.308,00)	(4,84)
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	2.653.000.000,00	2.180.025.925,00	2.833.809.150,00	(653.783.225,00)	(23,07)
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	2.028.000.000,00	1.673.782.000,00	2.232.672.000,00	(558.890.000,00)	(25,03)
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	7.894.000.000,00	7.890.400.000,00	1.182.173.000,00	6.708.227.000,00	567,45
5	DAK Bidang Keluarga Berencana	883.210.000,00	1.000.524.450,00	194.460.000,00	806.064.450,00	414,51
6	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.528.000.000,00	1.396.105.500,00	497.175.000,00	898.930.500,00	180,81
7	DAK Bidang Kesehatan	32.265.487.000,00	29.882.200.029,00	18.456.929.712,00	11.425.270.317,00	61,90
8	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.395.000.000,00	1.133.628.250,00	1.375.990.000,00	(242.361.750,00)	(17,61)
9	DAK Bidang Perdagangan	4.110.000.000,00	3.506.884.000,00	1.264.969.000,00	2.241.915.000,00	177,23
10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.341.000.000,00	1.304.472.400,00	-	1.304.472.400,00	-
11	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT)	10.694.000.000,00	8.078.907.800,00	7.260.000.000,00	818.907.800,00	11,28
12	DAK Bidang Pertanian	384.000.000,00	336.988.550,00	-	336.988.550,00	-
13	DAK Bidang Pendidikan	19.263.000.000,00	19.087.772.725,00	10.833.205.000,00	8.254.567.725,00	76,20
14	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	-	-	1.233.505.000,00	(1.233.505.000,00)	(100,00)
15	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.349.356.000,00	1.228.973.590,00	-	1.228.973.590,00	-
	JUMLAH	100.165.053.000,00	92.263.355.911,00	61.617.819.862,00	30.645.536.049,00	49,73

Grafik 10
Komposisi Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2018



5.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	187.389.676.000,00	167.488.330.939,00	152.578.941.900,00

Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Pendapatan Dana Penyesuaian tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp187.389.676.000,00 dengan realisasi sebesar Rp167.488.330.939,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.909.389.039,00 atau 9,77% dari TA 2017 yang berjumlah Rp152.578.941.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 13

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian)TA 2018 dan 2017

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik/(Turun)	%
	2018	2017		
Tunjangan Profesi Guru PNSD	77.656.618.639,00	79.188.891.975,00	(1.532.273.336,00)	(1,93)
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	646.800.000,00	843.150.000,00	(196.350.000,00)	(23,29)
Dana Insentif Daerah	26.000.000.000,00	7.500.000.000,00	18.500.000.000,00	246,67
Bantuan Operasional Sekolah	63.184.912.300,00	65.046.899.925,00	(1.861.987.625,00)	(2,86)
Jumlah	167.488.330.939,00	152.578.941.900,00	14.909.389.039,00	9,77

Grafik 11

Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian) Tahun 2018



5.1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		323.511.696.000,00	316.849.390.000,00	289.349.689.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp323.511.696.000,00 dengan realisasi sebesar Rp316.849.390.000,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp27.499.701.000,00 atau 9.50% dari TA 2017 yang berjumlah Rp289.349.689.000,00.

5.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		272.682.284.000,00	266.019.978.000,00	237.077.189.000,00

Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi didasari pada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kaltim untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp272.682.284.000,00 dengan realisasi sebesar Rp266.019.978.000,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp28.942.789.000,00 atau 12.21% dari TA 2017 yang berjumlah Rp237.077.189.000,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari:

Tabel 5. 14

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	TA 2018		Realisasi TA 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	55.991.145.000,00	55.624.090.000,00	59.478.334.000,00	(3.854.244.000,00)	(6,48)
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	52.600.029.000,00	55.396.124.000,00	44.375.879.000,00	11.020.245.000,00	24,83
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	142.432.241.000,00	133.889.411.000,00	111.308.159.000,00	22.581.252.000,00	20,29
4	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	507.937.000,00	431.044.000,00	531.864.000,00	(100.820.000,00)	(18,96)
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	21.150.932.000,00	20.679.309.000,00	21.382.953.000,00	(703.644.000,00)	(3,29)
	Jumlah	272.682.284.000,00	266.019.978.000,00	237.077.189.000,00	28.942.789.000,00	12,21

Grafik 12

Komposisi Realisasi Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2018



5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Penda lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	50.829.412.000,00	50.829.412.000,00	52.272.500.000,00

Bantuan Keuangan merupakan dana yang ditransfer dari entitas lain (Pemerintah Provinsi Kaltim) yang peruntukannya telah ditetapkan. Pengelolaan Dana Bantuan Provinsi Kaltim ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi TA 2018 adalah sebesar Rp50.829.412.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(1.443.088.000,00) atau (2,76)% dari TA 2017 yang berjumlah Rp52.272.500.000,00 seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 15

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi KaltimTA 2018 dan 2017

No.	Uraian	TA 2018		Realisasi TA 2017 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	50.829.412.000,00	50.829.412.000,00	52.272.500.000,00	(1.443.088.000,00)	(2,76)
	JUMLAH	50.829.412.000,00	50.829.412.000,00	52.272.500.000,00	(1.443.088.000,00)	(2,76)

5.1.3 Lain - Lain Pendapatan Yang sah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	2.394.000.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.300.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp906.000.000,00 atau naik 37,84 % dari TA 2017 yang berjumlah Rp2.394.000.000,00.

Hibah yang diperoleh tersebut merupakan program bantuan dari Pemerintah Pusat dengan AUSAID untuk pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) demi ketersediaan air bersih yang dilaksanakan oleh PDAM Kota Balikpapan.

5.2	Belanja Daerah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		2.404.482.298.809,00	2.119.971.369.743,22	1.759.664.053.267,85

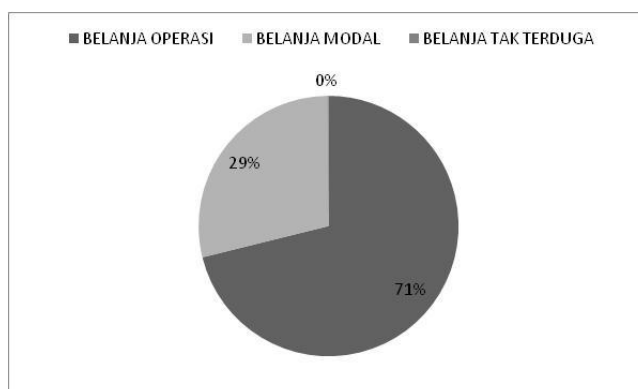
Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dimana dalam Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.404.482.298.809,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.119.971.369.743,22. Realisasi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp360.307.316.475,37 atau meningkat sebesar 20,48% dari Tahun 2017 yang berjumlah sebesar Rp1.759.664.053.267,85 seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. 16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Naik/(Turun)	%
1.	Belanja Operasi	1.653.090.013.488,00	1.508.174.657.438,64	1.307.594.647.176,43	200.580.010.262,21	15,34
2.	Belanja Modal	746.392.285.321,00	608.340.577.920,58	451.891.556.091,42	156.449.021.829,16	34,62
3.	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	3.456.134.384,00	177.850.000,00	3.278.284.384,00	1.843,29
	Jumlah	2.404.482.298.809,00	2.119.971.369.743,22	1.759.664.053.267,85	360.307.316.475,37	20,48

Rincian Belanja per OPD dapat dilihat pada *Lampiran 1* sedangkan rincian belanja per rekening secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran 2*

Grafik 13
Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018



5.2.1	Belanja Operasi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		1.653.090.013.488,00	1.508.174.657.439,17	1.307.594.647.176,43

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja subsidi. Pada tahun 2018 Belanja Operasi dianggarkan Rp1.653.090.013.488,00 dan dapat direalisasikan Rp1.508.174.657.439,17 atau 91,23%. Realisasi belanja operasional bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp 200.580.010.262,74 atau 15,34% seperti yang dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 17
Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	%	Naik/(Turun)
	Belanja Operasi					
1	Belanja Pegawai	747.529.157.000,00	726.387.818.545,85	574.721.273.231,75	26,39	151.666.545.314,10
2	Belanja Barang dan jasa	825.554.006.488,00	711.557.984.716,32	664.507.242.810,68	7,08	47.050.741.905,64
3	Belanja Subsidi	800.000.000,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	(20,00)	(200.000.000,00)
4	Belanja Hibah	77.706.850.000,00	68.336.760.377,00	67.248.807.434,00	1,62	1.087.952.943,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	1.092.093.800,00	117.323.700,00	830,84	974.770.100,00
	Jumlah	1.653.090.013.488,00	1.508.174.657.439,17	1.307.594.647.176,43	15,34	200.580.010.262,74

Grafik 14

Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018



Rincian belanja operasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.1 Belanja Pegawai	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	747.529.157.000,00	726.387.818.545,85	574.721.273.231,75

Realisasi Belanja Pegawai merupakan realisasi belanja gaji, tunjangan Pegawai Negeri Sipil, penerimaan Kepala Daerah dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Uang Lembur. Pada tahun 2018 Belanja Pegawai dianggarkan senilai Rp747.529.157.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp726.387.818.545,85 atau 96,78%. Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp151.666.545.314,10 atau 26,39% dari TA 2017. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

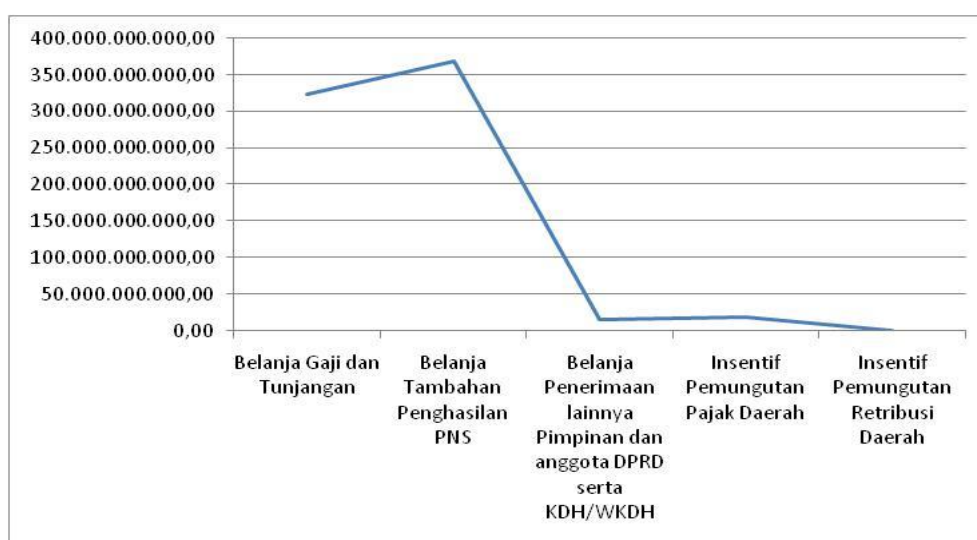
Tabel 5. 18
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	332.179.985.380,00	323.884.507.835,40	310.981.695.328,00	12.902.812.507,40	4,15
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	379.680.460.620,00	368.286.925.784,00	234.281.891.514,00	134.005.034.270,00	57,20
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	16.067.850.000,00	15.610.090.000,00	7.646.130.000,00	7.963.960.000,00	104,16
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	19.600.861.000,00	18.606.294.926,45	21.513.630.704,75	(2.907.335.778,30)	(13,51)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	297.925.685,00	(297.925.685,00)	(100,00)
	JUMLAH	747.529.157.000,00	726.387.818.545,85	574.721.273.231,75	151.666.545.314,10	26,39

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan signifikan antara tahun 2018 dengan tahun sebelumnya pada realisasi belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp134.005.034.270,00 atau 57,20% dan realisasi belanja Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp7.963.960.000,00 atau 104,16%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan memberikan tambahan penghasilan PNS berdasarkan disiplin kerja dan capaian kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan tersebut. Sedangkan untuk belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, kenaikan dari tahun sebelumnya berdasarkan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Grafik 15

Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018



5.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		825.554.006.488,00	711.557.984.716,32	664.507.242.810,68

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp825.554.006.488,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp711.557.984.716,32. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Realisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 47.050.741.905,64 atau 7,08% dari tahun sebelumnya. Rincian Realisasi belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 19.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.554.006.488,00	711.557.984.716,32	86,19	664.507.242.810,68
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.026.924.998,00	22.949.709.998,00	88,18	19.339.866.558,00
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.108.381.650,00	19.942.872.075,00	90,21	17.926.124.674,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.040.894.256,00	80.822.208.209,20	85,94	63.877.403.559,66
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.775.700.000,00	4.323.026.325,00	90,52	4.134.617.000,00
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.804.084.060,00	35.597.952.138,75	83,16	31.610.519.339,50
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.602.562.085,00	11.913.035.794,00	87,58	11.620.681.086,00
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.096.435.000,00	1.679.917.000,00	80,13	1.703.561.000,00
2.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.466.880.000,00	1.738.086.300,00	70,46	997.885.500,00
2.1.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	734.888.000,00
2.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.956.000,00	6.541.719.214,00	90,85	5.492.488.959,00
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.886.513.300,00	59.306.922.271,00	86,09	55.046.622.465,34
2.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.354.987.000,00	1.321.154.100,00	97,50	1.327.487.250,00
2.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.959.539.700,00	4.780.825.320,00	80,22	2.606.450.330,00
2.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.271.155.000,00	4.002.686.447,00	93,71	1.087.680.725,00
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.302.679.540,00	64.774.798.862,12	90,84	48.503.655.702,54
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	52.263.371.160,00	48.864.133.440,00	93,50	47.437.379.288,00
2.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	3.623.240.000,00	2.134.090.260,00	58,90	1.258.774.500,00
2.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.824.998.700,00	15.276.231.195,00	96,53	8.818.358.571,00
2.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	169.000.000,00	122.305.909,00	72,37	284.330.229,00
2.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.801.057.000,00	4.990.991.515,49	86,04	3.330.672.732,00
2.1.2.25.	Honorarium PNS	3.395.150.000,00	2.780.350.000,00	81,89	34.802.559.327,16
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	171.009.738.780,00	163.659.579.778,00	95,70	156.325.558.622,00
2.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.933.100.000,00	4.273.100.000,00	86,62	2.295.100.000,00
2.1.2.28.	Belanja Pegawai Dana BOS	-	-	-	8.904.499.601,00
2.1.2.29.	Belanja Barang Dana Bos	47.972.100.000,00	46.672.598.712,00	97,29	49.322.964.097,00
2.1.2.31.	Belanja Barang KAPITASI JKN	4.996.790.902,00	2.642.891.985,22	52,89	3.930.093.631,13
2.1.2.34.	Belanja Jasa Berlangganan	382.400.000,00	311.086.293,00	81,35	360.636.956,00
2.1.2.36.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	441.330.400,00	334.332.385,00	75,76	193.424.188,00
2.1.2.37.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	3.371.828.000,00	2.776.049.034,00	82,33	1.373.826.851,00
2.1.2.39.	Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu	9.551.733.850,00	4.313.711.036,08	45,16	3.826.566.382,23
2.1.2.41.	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	6.900.000,00	5.300.000,00	76,81	7.050.500,00
2.1.2.42.	Belanja Barang Perlengkapan Dapur	40.350.000,00	15.222.000,00	37,72	26.695.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
2.1.2.43.	Belanja Penyelesaian Perkara Hukum	324.500.000,00	94.500.000,00	29,12	142.000.000,00
2.1.2.44.	Belanja Kontribusi Lomba	65.400.000,00	50.000.000,00	76,45	50.000.000,00
2.1.2.45.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1.075.800.000,00	948.753.750,00	88,19	1.246.477.390,00
2.1.2.46.	Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	16.313.590.800,00	13.159.738.133,00	80,67	9.825.283.971,00
2.1.2.47.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	8.601.719.950,00	4.498.831.451,72	52,30	2.866.824.262,77
2.1.2.48.	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)	3.753.950.000,00	1.755.700.400,00	46,77	869.000.000,00
2.1.2.50.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Penghias ruangan	-	-	-	6.820.000,00
2.1.2.54.	Belanja Jasa Perizinan	9.455.000,00	8.123.592,00	85,92	4.748.592,00
2.1.2.56.	Belanja Barang Alat Kesehatan	-	-	-	55.935.000,00
2.1.2.61.	Belanja Tim Pemandu Haji Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	106.601.800,00
2.1.2.64.	Belanja Pegawai BLUD dan Kapitasi JKN	43.803.548.250,00	37.583.312.699,30	85,80	39.320.233.474,00
2.1.2.65.	Belanja Pegawai Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	13.195.107,00	-	-	60.432.000,00
2.1.2.66.	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	48.524.486.000,00	25.562.354.339,44	52,68	21.444.463.696,35
2.1.2.68.	Belanja Pegawai Dana BOS	12.257.580.000,00	8.899.782.754,00	72,61	-
JUMLAH		825.554.006.488,00	711.557.984.716,32	86,50	664.507.242.810,68

Pada realisasi belanja barang dan jasa dapat kami informasikan bahwa terdapat realisasi atas belanja Pembayaran Ganti Rugi Atas Pemakaian Tanah Ex Pelabuhan Sumber senilai Rp1.864.989.491,20 yang tidak tercantum nilai anggarannya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Sewa Eks Pelabuhan Sumber koderekening 5.2.3.13.016. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung sebesar Rp.1.864.989.500 yang rencananya untuk pembayaranti rugi *SEWA EX-PELABUHAN SOMBER* pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Kegiatan tersebut akibat adanya :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 70/PDT.6/2010/PN.BPP tanggal 10 Desember 2010 jo. Putusan pengadilan tinggi di Samarinda Nomor : 85/PDT/2011/PT KT SMDA, tanggal 30 September 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3091 K/PDT/2012 tanggal 15 Desember 2014
 - b. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dan Wali Kota Balikpapan Nomor : 180/2841-HK/2016 tanggal 17 Mei 2015
 - c. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-322/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pembayaran Ganti Rugi pemakaian tanah Kawasan ex-pelabuhan Sumber Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara milik Sumuria Toba binti Daeng Toba.
2. Dalam penyusunan APBD Murni TA 2018, bahwa kegiatan tersebut dianggarkan dalam Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung. Hal ini diakui bahwa terjadi kesalahan penganggaran yang seyogyanya masuk dalam belanja Barang dan Jasa (Belanja Pembayaran Ganti Rugi Atas Pemakaian Tanah Ex Pelabuhan Sumber)

3. Karena belanja tersebut harus segera dibayarkan kepada yang bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, maka TAPD memproses perubahan kesalahan penganggaran tersebut pada pergeseran anggaran antar jenis belanja dari belanja Modal ke belanja Barang dan jasa karena substansi belanja tersebut adalah belanja Barang dan Jasa yang dimulai dari usulan perangkat daerah tentang pergeseran anggaran sampai dengan persetujuan Wali Kota untuk segera ditindaklanjuti.
4. Berdasarkan Surat Wali Kota Balikpapan Nomor 913/850/BPKD tanggal 26 Juni 2018 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan sebelum penetapan P-APBD TA 2018 kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan bahwa pergeseran anggaran antar jenis telah dilaksanakan pada mekanisme Pergeseran Anggaran dan diadministrasikan melalui DPPA 1.02.04.01.22.004.5.2. Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Sewa Ex-Pelabuhan Somber yang telah disahkan pada tanggal 17 Mei 2018 dan dicairkan pada tanggal 5 Juni 2018 dengan nomor SP2D 03721/BL/2018.
5. APBD murni maupun Pergeseran anggaran setelah diputuskan seharusnya diadministrasikan pada Perubahan APBD, namun terjadi kesalahan teknis pada saat proses mekanisme Perubahan APBD yang tidak secara otomatis Aplikasi SIPKD mengakomodir dari mekanisme pergeseran anggaran, sehingga kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Sewa Eks Pelabuhan Somber dengan Koderekening 5.2.3.13.016 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung yang seharusnya sudah berubah atau bergeser ke kode rekening 5.2.2.63.001 Belanja Pembayaran Ganti Rugi Atas Pemakaian Tanah Ex Pelabuhan Somber (belanja barang dan jasa) namun tidak terkoreksi pada Perubahan Anggaran sehingga alokasi anggaran kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Sewa Eks Pelabuhan Somber tersebut pada Perubahan APBD TA 2018 masih tetap tercantum pada Kode rekening Belanja Modal.

5.2.1.3 Belanja Subsidi	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	800.000.000,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00

Belanja Subsidi direalisasikan sebesar Rp800.000.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp800.000.000,00. Belanja subsidi diperuntukkan bagi peningkatan pembangunan Kota Balikpapan melalui Perusahaan Daerah Kota Balikpapan. Belanja Subsidi jika dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 20% atau sebesar Rp(200.000.000,00) dari sebelumnya yang berjumlah Rp1.000.000.000,00. Belanja subsidi diperuntukkan bagi anak-anak sekolah yang memanfaatkan Bis Sekolah, yang dikelola oleh Perusda Kota Balikpapan. Bis Sekolah diperoleh melalui hibah dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Kota Balikpapan meraih anugerah Wahana Tata Nugraha. Dana subsidi dipergunakan Perusda Kota Balikpapan untuk membiayai operasional bis sehingga biaya transport untuk anak-anak sekolah menjadi terjangkau.

Menurut data dari Perusda Kota Balikpapan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Biaya yang diperlukan untuk operasional bus sekolah adalah Rp1.077.850.170,94
- b. Biaya rata-rata per siswa adalah Rp10.111,30 yang didapat dari pembagian seluruh biaya sebesar Rp1.077.850.170,94 dengan asumsi jumlah karcis terjual dari 106.598 siswa.

5.2.1.4 Belanja Hibah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	77.706.850.000,00	68.336.760.377,00	67.248.807.434,00

Belanja Hibah direalisasikan sebesar Rp68.336.760.377,00 atau meningkat sebesar Rp1.087.952.943,00 atau 1,62% dari realisasi TA 2017 yang berjumlah sebesar Rp67.248.807.434,00. Belanja hibah diperuntukkan bagi peningkatan dan partisipasi masyarakat/lembaga/organisasi dalam pembangunan dan pendidikan Kota Balikpapan. Realisasi Belanja Hibah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 20
Realisasi Belanja Hibah TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Kenaikan/(Penurunan)
1.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	11.772.000.000,00	8.517.000.000,00	8.113.650.000,00	4,97	403.350.000,00
2.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	39.822.800.000,00	37.062.117.751,00	26.956.516.035,00	37,49	10.105.601.716,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS	26.112.050.000,00	22.757.642.626,00	32.178.641.399,00	(29,28)	(9.420.998.773,00)
	Jumlah	77.706.850.000,00	68.336.760.377,00	67.248.807.434,00	1,62	1.087.952.943,00

Grafik 16
Komposisi Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018



5.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	1.500.000.000,00	1.092.093.800,00	117.323.700,00

Belanja Bantuan Sosial direalisasikan sebesar Rp1.092.093.800,00 atau naik sebesar Rp974.770.100,00 atau 830,38% dari realisasi TA 2017 yang berjumlah sebesar Rp117.323.700,00. Belanja bantuan sosial diperuntukkan bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan.

5.2.2 Belanja Modal	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	746.392.285.321,00	608.340.577.920,58	451.891.556.091,42

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp608.340.577.920,58 merupakan pengeluaran yang menambah aset tetap Pemerintah Kota Balikpapan. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp156.449.021.829,16 atau 34,62% dibandingkan dengan TA 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 21
Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Belanja Tanah	116.027.884.000,00	55.810.737.585,00	50.892.259.853,00	4.918.477.732,00	9,66
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	90.767.187.947,00	83.075.215.847,10	32.892.942.039,08	50.182.273.808,02	152,56
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	114.596.120.150,00	106.275.034.611,15	212.144.062.887,90	(105.869.028.276,75)	(49,90)
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	358.359.577.830,00	328.086.131.679,59	133.721.977.463,00	194.364.154.216,59	145,35
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	64.076.970.394,00	33.474.330.857,74	21.765.965.488,44	11.708.365.369,30	53,79
6.	Belanja Aset Lainnya	2.564.545.000,00	1.619.127.340,00	474.348.360,00	1.144.778.980,00	241,34
	Jumlah	746.392.285.321,00	608.340.577.920,58	451.891.556.091,42	156.449.021.829,16	34,62

Grafik 17
Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2018



Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	116.027.884.000,00	55.810.737.585,00	50.892.259.853,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp55.810.737.585,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.918.477.732,00 atau naik sebesar 9,66% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp50.892.259.853,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 22
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan	%
					(Penurunan)	
1	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	1.294.300.000,00	1.035.695.000,00	35.263.500,00	1.000.431.500,00	2.837,02
2	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	7.618.458.000,00	7.166.249.999,00	4.985.145.001,00	2.181.104.998,00	43,75
3	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	36.914.223.000,00	14.998.623.000,00	-	14.998.623.000,00	-
4	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	70.200.903.000,00	32.610.169.586,00	45.871.851.352,00	(13.261.681.766,00)	(28,91)
Total		116.027.884.000,00	55.810.737.585,00	50.892.259.853,00	4.918.477.732,00	9,66

Grafik 18
Komposisi Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2018



5.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	90.767.187.947,00	83.075.215.847,10	32.892.942.039,08

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp83.075.215.847,10 mengalami kenaikan sebesar Rp50.182.273.808,02 atau 152,56% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp32.892.942.039,08. Rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut :

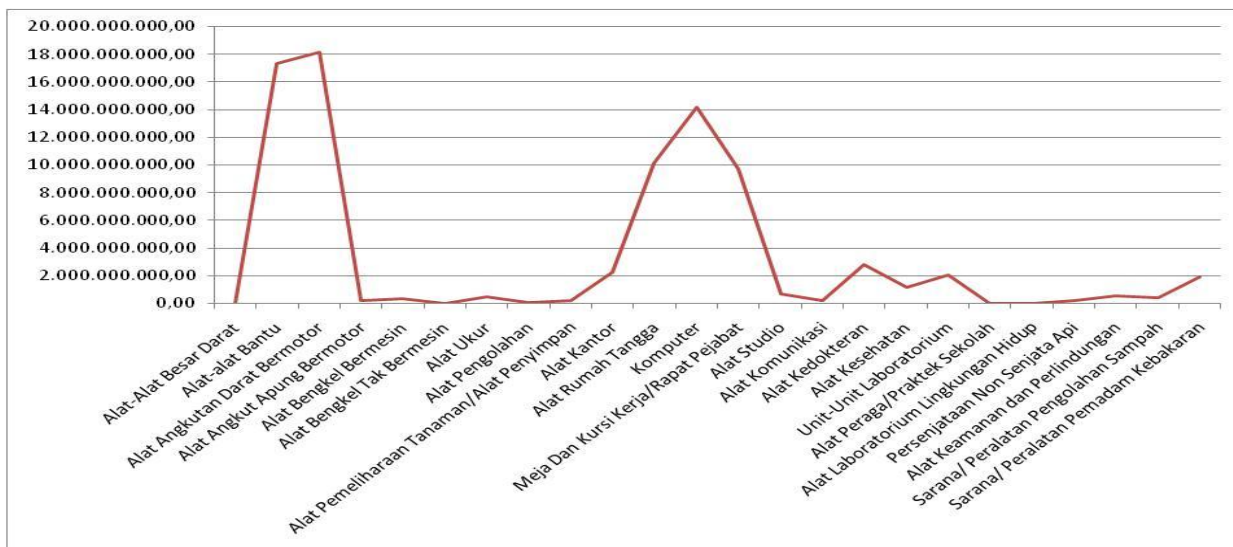
Tabel 5. 23.1
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.767.187.947,00	83.075.215.847,10	91,53	32.892.942.039,08
2.2.2.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.416.415.300,00	0,00	-	-
2.2.2.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	18.525.834.700,00	17.277.008.200,00	93,26	7.610.141.950,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
2.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	19.099.635.000,00	18.122.963.150,00	94,89	3.498.060.300,00
2.2.2.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	187.800.000,00	172.150.000,00	91,67	178.640.000,00
2.2.2.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	382.801.800,00	371.910.000,00	97,15	92.950.000,00
2.2.2.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	33.100.000,00	23.042.000,00	69,61	251.858.200,00
2.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	517.650.000,00	485.454.000,00	93,78	1.015.873.000,00
2.2.2.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	79.000.000,00	60.863.000,00	77,04	-
2.2.2.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	180.450.000,00	173.593.500,00	96,20	88.311.200,00
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.485.481.500,00	2.276.146.436,00	91,58	565.928.925,00
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.021.150.501,00	10.153.533.647,00	92,13	7.845.253.640,00
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	14.713.191.446,00	14.157.166.981,00	96,22	5.576.041.395,00
2.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.364.795.000,00	9.739.627.000,00	93,97	573.180.500,00
2.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	738.337.000,00	704.811.200,00	95,46	220.535.500,00
2.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	272.500.000,00	233.401.200,00	85,65	367.189.650,00
2.2.2.21.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	2.980.223.200,00	2.777.061.576,10	93,18	3.045.354.735,08
2.2.2.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	1.209.211.200,00	1.146.572.280,00	94,82	107.804.574,00
2.2.2.23.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.181.916.600,00	2.081.621.427,00	95,40	-
2.2.2.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	5.700.000,00	5.621.000,00	98,61	32.878.900,00
2.2.2.29.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10.000.000,00	7.800.000,00	78,00	34.234.970,00
2.2.2.32.	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	227.000.000,00	221.123.250,00	97,41	142.373.000,00
2.2.2.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	571.000.000,00	562.918.000,00	98,58	263.639.100,00
2.2.2.36.	Belanja Modal Pengadaan Sarana/ Peralatan Pengolahan Sampah	1.462.200.000,00	386.038.500,00	26,40	263.426.000,00
2.2.2.37.	Belanja Modal Pengadaan Sarana/ Peralatan Pemadam Kebakaran	2.101.794.700,00	1.934.789.500,00	92,05	1.119.266.500,00
JUMLAH		90.767.187.947,00	83.075.215.847,10		32.892.942.039,08

Grafik 19

Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018



5.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	114.596.120.150,00	106.275.034.611,15	212.144.062.887,90

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp106.275.034.611,15 mengalami penurunan sebesar Rp (105.869.028.276,75) atau (49,90)% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp212.144.062.887,90 dengan rincian sebagai berikut:

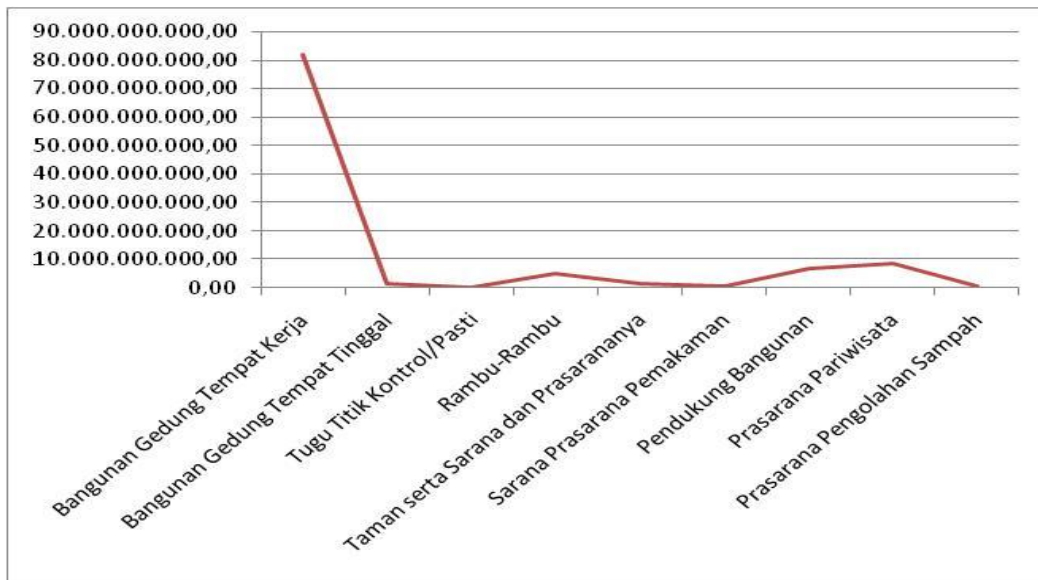
Tabel 5. 24
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	88.589.627.000,00	81.728.994.253,15	204.010.683.357,90	(122.281.689.104,75)	(59,94)
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.419.800.000,00	1.300.142.109,00	189.863.000,00	1.110.279.109,00	584,78
3	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	460.000.000,00	155.940.000,00	-	155.940.000,00	-
4	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	5.088.141.150,00	4.955.240.840,00	910.789.210,00	4.044.451.630,00	444,06
5	Belanja Modal Pengadaan Taman serta Sarana dan Prasarananya	1.700.000.000,00	1.673.479.555,00	195.951.000,00	1.477.528.555,00	754,03
6	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Pemakaman	660.000.000,00	649.806.200,00	996.856.500,00	(347.050.300,00)	(34,81)
7	Belanja Modal Pengadaan Pendukung Bangunan	7.451.480.000,00	6.860.739.904,00	4.069.556.540,00	2.791.183.364,00	68,59
8	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pariwisata	8.793.272.000,00	8.543.833.000,00	722.707.280,00	7.821.125.720,00	1.082,20

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
9	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pengolahan Sampah	433.800.000,00	406.858.750,00	1.047.656.000,00	(640.797.250,00)	(61,16)
Total		114.596.120.150,00	106.275.034.611,15	212.144.062.887,90	(105.869.028.276,75)	(49,90)

Grafik 20

Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018



5.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
358.359.577.830,00	328.086.131.679,59	133.721.977.463,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp328.086.131.679,59 mengalami peningkatan sebesar Rp194.364.154.216,59 atau 145,35% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp133.721.977.463,00 dengan rincian sebagai berikut:

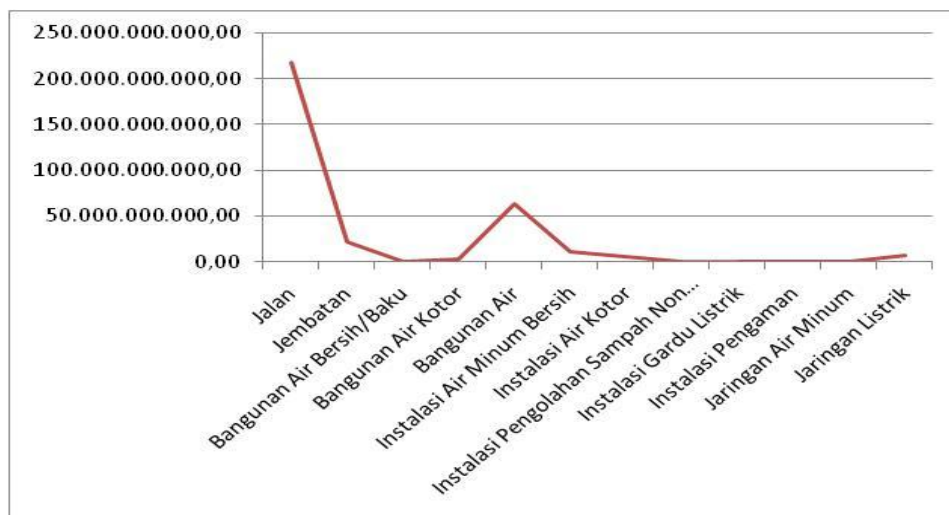
Tabel 5. 25
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Belanja modal Pengadaan Jalan	231.208.801.530,00	217.226.808.233,00	89.388.243.750,00	127.838.564.483,00	143,01
2	Belanja modal Pengadaan Jembatan	24.413.306.600,00	21.117.483.406,59	2.936.273.000,00	18.181.210.406,59	619,19
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	390.000.000,00	348.531.000,00	504.928.750,00	(156.397.750,00)	(30,97)
4	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.146.125.000,00	3.053.680.500,00	1.257.543.507,00	1.796.136.993,00	142,83
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	71.392.261.300,00	62.469.614.875,00	34.697.026.100,00	27.772.588.775,00	80,04

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
6	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	11.728.000.000,00	10.815.998.915,00	3.230.996.807,00	7.585.002.108,00	234,76
7	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	7.438.773.000,00	5.842.182.000,00	-	5.842.182.000,00	-
8	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	60.000.000,00	59.840.000,00	-	59.840.000,00	-
9	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	337.341.600,00	336.800.000,00	-	336.800.000,00	-
10	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	60.000.000,00	57.750.000,00	-	57.750.000,00	-
11	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	53.960.000,00	28.052.750,00	528.915.123,00	(500.862.373,00)	(94,70)
12	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	8.131.008.800,00	6.729.390.000,00	1.178.050.426,00	5.551.339.574,00	471,23
Total		358.359.577.830,00	328.086.131.679,59	133.721.977.463,00	194.364.154.216,59	145,35

Grafik 21

Komposisi Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018



5.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	64.076.970.394,00	33.474.330.857,74	21.765.965.488,44

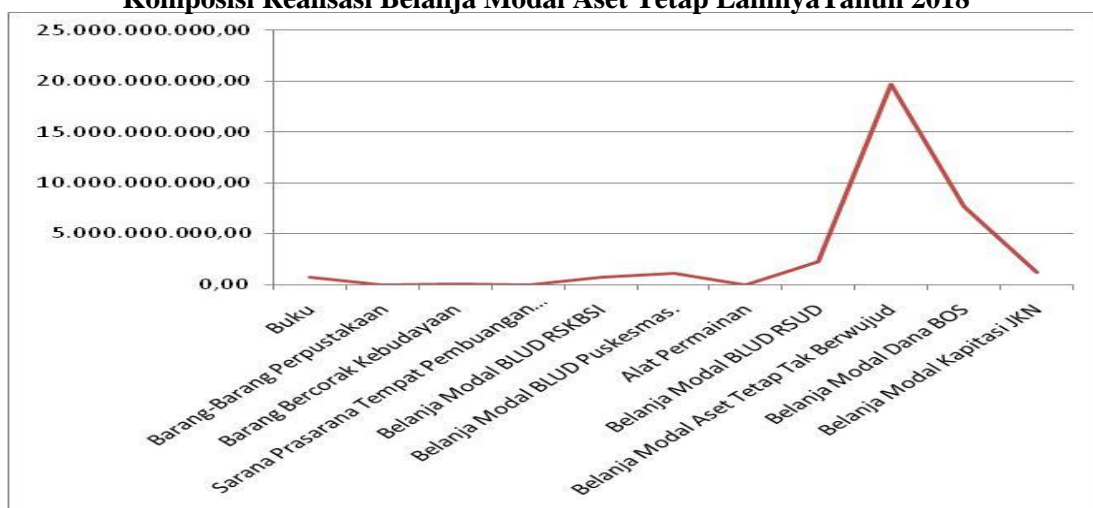
Aset tetap lainnya merupakan belanja modal yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset sebelumnya di atas. Realisasi Belanja Aset tetap lainnya sebesar Rp33.474.330.857,74 mengalami kenaikan Rp11.708.365.369,30 atau 53,79% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp21.765.965.488,44 yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 26
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Kenaikan/(Penurunan)	Realisasi 2017
1	Belanja modal Pengadaan Buku	762.100.000,00	716.461.552,00	224,71	495.817.282,00	220.644.270,00
2	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	-	-	(100,00)	(25.300.000,00)	25.300.000,00
3	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	72.275.000,00	70.850.000,00	1.983,82	67.450.000,00	3.400.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Tempat Pembuangan Sampah/Akhir	-	-	(100,00)	(10.000.000,00)	10.000.000,00
5	Belanja Modal BLUD RSKBSI	5.315.128.472,00	724.423.808,00	72,88	305.384.514,00	419.039.294,00
6	Belanja Modal BLUD Puskesmas.	1.673.100.000,00	1.118.632.926,99	144,59	661.276.762,99	457.356.164,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan	38.000.000,00	37.437.400,00	-	37.437.400,00	-
8	Belanja Modal BLUD RSUD	10.442.769.500,00	2.250.931.840,00	117,37	1.215.391.353,00	1.035.540.487,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Tak Berwujud	22.368.091.570,00	19.669.422.196,75	62,48	7.563.543.206,75	12.105.878.990,00
10	Belanja Modal Dana BOS	21.487.520.000,00	7.674.235.004,00	18,64	1.205.642.951,00	6.468.592.053,00
11	Belanja Modal Kapitasi JKN	1.917.985.852,00	1.211.936.130,00	18,79	191.721.899,56	1.020.214.230,44
	JUMLAH	64.076.970.394,00	33.474.330.857,74	53,79	11.708.365.369,30	21.765.965.488,44

Grafik 22

Komposisi Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018



5.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	2.564.545.000,00	1.619.127.340,00	474.348.360,00

Realisasi Belanja Aset lainnya sebesar Rp1.619.127.340,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.144.778.980,00 atau 241,34 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp474.348.360,00

5.2.3 Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2018	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	5.000.000.000,00	3.456.134.384,00	177.850.000,00

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.456.134.384,00. Belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Realisasi belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 ini, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 menunjukkan kenaikan sebesar Rp3.278.284.384,00 atau 1.843,28%.

Belanja tidak terduga TA 2018 direalisasikan untuk rehabilitasi dan bantuan atas bencana yang terjadi di Kota Balikpapan selama tahun 2018 yaitu bencana kebakaran di Jl. Wiluyo Puspooyo, wabah difteri, bencana longsor di Kelurahan Batu Ampar, penanganan bencana di Palu, Donggala dan Sigi serta pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

5.2.4 TRANSFER	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	1.085.000.000,00	998.806.796,00	1.076.238.488,00

5.2.4.1 Transfer/Bantuan Keuangan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	1.085.000.000,00	998.806.796,00	1.076.238.488,00

Transfer/Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan pada sembilan partai politik di Kota Balikpapan. Bantuan Keuangan tersebut mengalami penurunan (7.19)% atau Rp(77.431.692,00) dari tahun sebelumnya.

5.3. PEMBIAYAAN	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	179.734.445.532,00	181.868.841.735,20	85.007.745.930,00

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

5.3.1 Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
	198.234.445.532,00	199.228.175.213,20	102.568.681.508,00

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp199.228.175.213,20 terdiri dari penggunaan SiLPATahun sebelumnya sebesar Rp198.234.445.532,00 dan koreksi penambahan atas nilai kas BOSNAS tahun 2016 yang belum diakui sebesar Rp1.009.012.232,55 serta koreksi pengurangan pada pendapatan BLUD sebesar Rp15.282.551,35.

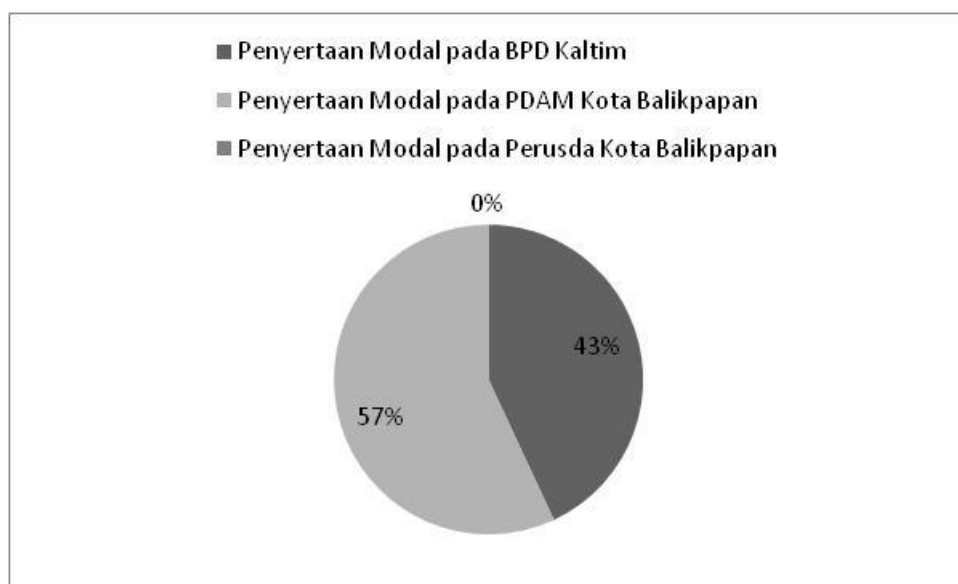
5.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		18.500.000.000,00	17.359.333.478,00	17.560.935.578,00

Pengeluaran Pembiayaan merupakan investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 27
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Penyertaan Modal pada BPD Kaltim	7.500.000.000,00	7.475.000.000,00	8.305.000.000,00	(830.000.000,00)	(9,99)
2	Penyertaan Modal pada PDAM Kota Balikpapan	11.000.000.000,00	9.884.333.478,00	9.255.935.578,00	628.397.900,00	6,79
3	Penyertaan Modal pada Perusda Kota Balikpapan	-	-	-	-	-
	JUMLAH	18.500.000.000,00	17.359.333.478,00	17.560.935.578,00	(201.602.100,00)	(1,15)

Grafik 23
Komposisi Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018



5.3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
		0,00	291.635.286.428,55	198.234.445.532,16

SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp291.635.286.428,55 merupakan selisih realisasi pendapatan yang tidak tercapai dengan penghematan belanja daerah dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5. 28.1
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan	2.227.832.853.277,00	2.230.736.621.233,10	100,13	1.873.966.991.358,01
Belanja dan Transfer	2.407.567.298.809,00	2.120.970.176.539,75	88,10	1.760.740.291.755,85
Surplus/(Defisit)	(179.734.445.532,00)	109.766.444.693,35	(61,07)	113.226.699.602,16
Pembiayaan Netto	179.734.445.532,00	181.868.841.735,20	100,63	85.007.745.930,00
SILPA	0,00	291.635.286.428,55		198.234.445.532,16

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 29
Rincian Saldo Anggaran Lebih TA 2018 dan 2017

Uraian	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	198.234.445.532,16	102.568.681.508,55
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(198.234.445.532,16)	(102.568.681.508,55)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	291.635.286.428,55	198.234.445.532,16
Subtotal	291.635.286.428,55	198.234.445.532,16
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	291.635.286.428,55	198.234.445.532,16

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
5.4.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	198.234.445.532,00	102.568.681.508,55

Nilai saldo anggaran lebih awal pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp198.234.445.532,16 merupakan nilai yang didapat dari saldo anggaran lebih akhir tahun anggaran 2017. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang digunakan sepenuhnya untuk menutup defisit anggaran tahun 2018.

		Tahun Anggaran 2018 (Rp)	Tahun Anggaran 2017 (Rp)
5.4.2	PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(198.234.445.532,16)	(102.568.681.508,55)

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp(198.234.445.532,16)

		Tahun Anggaran 2018 (Rp)	Tahun Anggaran 2017 (Rp)
5.4.3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	291.635.286.428,55	198.234.445.532,16

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp291.635.286.428,55

C. NERACA

Neraca Pemerintah Kota Balikpapan yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) merupakan ringkasan posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2018. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan akan diuraikan dalam penjelasan lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

5.5	ASET	Per 31 Desember 2018 Rp11.074.760.685.563,60	Per 31 Desember 2017 Rp7.863.461.301.524,35
------------	-------------	--	---

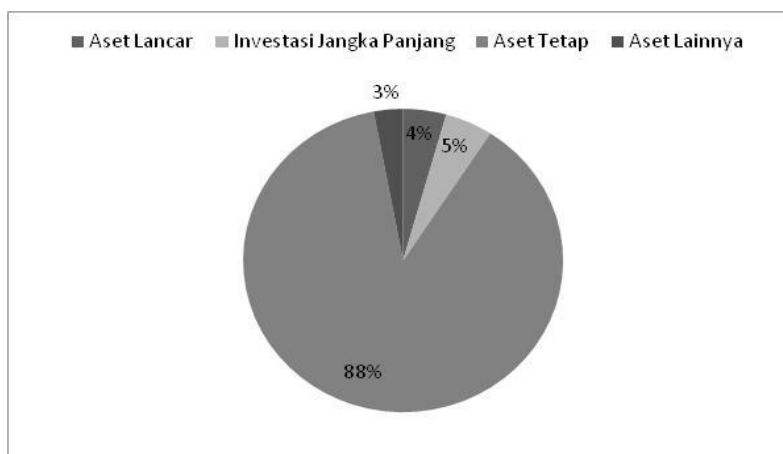
Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2018 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Aset TA 2018 bila dibandingkan dengan TA 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 30
Rincian Aset TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
1.	Aset Lancar	486.623.509.408,26	376.097.340.897,11	110.526.168.511,15
2.	Investasi Jangka Panjang	535.761.455.494,62	513.967.872.239,90	21.793.583.254,72
3 .	Aset Tetap	9.744.998.239.549,85	6.642.144.430.333,21	3.102.853.809.216,64
4.	Aset Lainnya	307.377.481.110,89	331.251.658.054,13	(23.874.176.943,24)
	Jumlah	11.074.760.685.563,60	7.863.461.301.524,35	3.212.034.183.573,26

Grafik 23

Komposisi Aset Pemkot Balikpapan Tahun 2018



Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Aset Daerah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

5.5.1 ASET LANCAR

Per 31 Desember 2018
Rp486.623.509.408,26

Per 31 Desember 2017
Rp376.097.340.897,11

Aset Lancar sebesar Rp486.623.509.408,26 merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar TA 2018 bila dibandingkan dengan TA 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 31
Rincian Aset Lancar TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	18.865.606.301,90	52.086.042.210,57	(33.220.435.908,67)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	140.669.256,00	89.615.400,00	51.053.856,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
4.	Kas di BLUD	43.590.874.844,52	41.938.929.944,68	1.651.944.899,84
5.	Kas Lainnya	4.036.966.026,13	5.128.870.209,46	(1.091.904.183,33)
6.	Investasi Jangka Pendek (Setara Kas)	225.000.000.000,00	100.000.000.000,00	125.000.000.000,00
7.	Piutang Pajak	118.023.453.484,70	116.479.942.252,82	1.543.511.231,88
8.	Piutang Retribusi	3.746.431.642,06	2.251.551.971,81	1.494.879.670,26
9.	Piutang Jasa Layanan (BLUD)	24.303.907.501,14	11.468.508.212,36	12.835.399.288,79
10.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.171.896.963,53	953.607.065,70	218.289.897,84
11.	Piutang Lainnya	365.230.377,50	99.083.897,76	266.146.479,75

No.	Uraian	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
12.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	24.502.418.270,00	23.958.931.360,00	543.486.910,00
13.	Belanja Dibayar Dimuka	1.666.805.720,55	1.542.750.482,19	124.055.238,36
14.	Persediaan	21.208.079.020,23	20.099.507.889,78	1.108.571.130,45
	Jumlah	486.623.509.408,26	376.097.340.897,11	110.526.168.511,15

5.5.1.1 Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2018
Rp18.865.606.301,90

Per 31 Desember 2017
Rp52.086.042.210,57

Saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp18.865.606.301,90 merupakan Saldo kas Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di rekening giro pada Bank Kaltimara per 31 Desember 2018 yang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 32
Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama Rekening	No. Rekening	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Rekening Kas Umum Daerah Kota Balikpapan	0031300508	18.865.606.301,90	52.086.042.210,57	(33.220.435.908,67)
	Jumlah		18.865.606.301,90	52.086.042.210,57	(33.220.435.908,67)

5.5.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2018
Rp140.669.256,00

Per 31 Desember 2017
Rp89.615.400,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 merupakan saldo kas atas pendapatan retribusi dan pendapatan pajak yang ada di Bendahara Penerimaan OPD Dinas Lingkungan Hidup, BPPDRD dan Dinas Pertanian per 31 Desember 2018. Perbandingan Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2018 dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 33
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Dinas Perhubungan	-	997.000,00	(997.000,00)
2	Disporabudpar	-	83.670.000,00	(83.670.000,00)
3	Dinas Kesehatan	-	4.948.400,00	(4.948.400,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup	500.000,00	-	500.000,00

No.	OPD	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	BPPDRD	85.053.256,00	-	85.053.256,00
6	Dinas Pertanian	55.116.000,00	-	55.116.000,00
	Jumlah	140.669.256,00	89.615.400,00	(89.615.400,00)

5.5.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2018
Rp1.170.000,00

Per 31 Desember 2017
Rp0.00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran OPD Per 31 Desember 2018 atas penerimaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) per 31 Desember 2018 yang disetorkan pada tahun 2019. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran OPD yang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 34

Sisa UP/GU/TU yang belum disetor per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Inspektorat	1.170.000,00	-	1.170.000,00
	Jumlah	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00

5.5.1.4 Kas di BLUD

Per 31 Desember 2018
Rp43.590.874.844,52

Per 31 Desember 2017
Rp41.938.929.944,68

Merupakan Saldo Kas per 31 Desember 2018 yang terdapat di tiga OPD BLUD Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Dinas Kesehatan Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu. Saldo Kas di BLUD pada Tahun 2018 sebesar Rp43.590.874.844,52 bila dibandingkan dengan tahun berikutnya dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 35

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	BLUD RSKB Sayang Ibu	11.042.591.121,34	9.354.798.322,73	1.687.792.798,61
2.	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	27.563.469.136,66	28.832.388.096,45	(1.268.918.959,79)
3.	BLUD Puskesmas Sepinggan	726.428.167,60	737.771.109,03	(11.342.941,43)
4.	BLUD Puskesmas Prapatan	84.429.636,64	164.406.931,34	(79.977.294,70)
5.	BLUD Puskesmas Kariangau	164.048.556,46	200.713.235,76	(36.664.679,30)
6.	BLUD Puskesmas Karang Joang	687.073.079,48	718.070.041,84	(30.996.962,36)

No.	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
7.	BLUD Puskesmas Baru Tengah	547.033.856,80	661.386.028,29	(114.352.171,49)
8.	BLUD Puskesmas Klandasan Ilir	766.726.249,77	989.389.003,96	(222.662.754,19)
9	BLUD Puskesmas Mekar Sari	301.590.837,07	280.007.175,28	21.583.661,79
10	BLUD Puskesmas Manggar Baru	611.563.766,03	0,00	611.563.766,03
11	BLUD Puskesmas Baru Ulu	223.301.029,94	0,00	223.301.029,94
12	BLUD Puskesmas Gunung Bahagia	383.528.867,59	0,00	383.528.867,59
13	BLUD UPT Labkesda	489.090.539,14	0,00	489.090.539,14
Jumlah		43.590.874.844,52	41.938.929.944,68	1.651.944.926,84

Selain tabel perbandingan di atas, dapat dirincikan posisi keuangan BLUD per 31 Desember 2018 sesuai rekening bank dan tunai pada tabel berikut :

Tabel 5. 36
Saldo Kas di BLUD Sesuai Rekening Bank dan Tunai per 31 Desember 2018

No	Unit Kerja	Saldo Akhir	Bank	No Rekening	Saldo Akhir	
					Bank	Tunai
1	Rumah Sakit Sayang Ibu	11.042.591.121,34	Bank Kaltimara	0031550734	0,00	495.000,00
			BNI	8989422088	3.400.771.049,00	0,00
			BTN	0000004501300006233	7.641.325.072,34	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	27.570.398.163,66	Mandiri	1490011231125	542.483.857,87	12.965.003,30
			BRI	012101002212306	27.014.949.302,49	0,00
3	Puskemas Klandasan Ilir	766.726.249,77	Bank Kaltimara	0031556121	564.358.006,77	2.178.000,00
			BRI	012101003098307	200.190.243,00	
4	Puskesmas Baru Tengah	547.033.856,80	Bank Kaltimara	1351500600	440.653.271,80	0,00
			BRI	0000012101003099303	106.380.585,00	
5	Puskesmas Mekar Sari	301.590.837,07	Bank Kaltimara	0031556104	188.215.753,07	1.320.000,00
			BRI	0000012101003095309	112.055.084,00	
6	Puskesmas Karang Joang	687.073.079,48	Bank Kaltimara	0031556155	477.097.665,48	500.000,00
			BRI	012101003104302	209.475.414,00	
7	Puskesmas Sepinggan	726.428.167,60	Bank Kaltimara	1351500596	426.294.880,60	1.140.000,00
			BRI	012101003105308	298.993.287,00	
8	Puskesmas Kariangau	164.048.556,46	Bank Kaltimara	0031556139	87.964.007,46	747.000,00
			BRI	0000012101003102300	75.337.549,00	
9	Puskesmas Prapatan	84.429.636,64	Bank Kaltimara	1351500618	2.763.314,64	11.146.800,00
			BRI	012101003096305	70.519.522,00	
10	Puskesmas Manggar Baru	611.563.766,03	Bank Kaltimara	01211501029	386.161.792,03	1.040.000,00
			BRI	012101003122300	224.361.974,00	

No	Unit Kerja	Saldo Akhir	Bank	No Rekening	Saldo Akhir	
					Bank	Tunai
11	Puskesmas Baru Ulu	223.301.029,94	Bank Kaltimara	0031572819	0,00	755.000,00
			BRI	012101003097301	222.546.029,94	
12	Puskesmas Gunung Bahagia	383.528.867,59	Bank Kaltimara	1671500870	275.642.717,59	0,00
			BRI	0000012101003110303	107.886.150,00	
13	UPT Labkesda	489.090.539,14	BRI	012101003111309	489.090.539,14	0,00
J U M L A H		43.597.803.871,52			43.565.517.068,22	32.286.803,30

Terdapat perbedaan antara saldo kas di BLUD RSUD dengan Saldo Rekening Koran RSUD sebesar Rp6.929.000,00 karena kesalahan transfer yang tidak diakui sebagai pendapatan sehingga RSUD mengakuinya sebagai utang.

5.5.1.5 Kas Lainnya Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp4.036.966.026,13 Rp5.128.870.209,46

Saldo Kas Lainnya merupakan Saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Dinas Kesehatan Kota, dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Dinas Pendidikan yang bila dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 37
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	OPD	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Dinas Kesehatan Kota (JKN)	2.738.813.790,13	3.769.013.803,46	(1.030.200.013,33)
2	Dinas Pendidikan (BOS Pusat)	1.298.152.236,00	1.359.856.406,00	(61.704.170,00)
	Jumlah	4.036.966.026,13	5.128.870.209,46	(1.091.904.183,33)

Rincian lebih lanjut tentang Saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 3& Lampiran 4*.

5.5.1.6 Investasi Jangka Pendek (Setara Kas) Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp225.000.000.000,00 Rp100.000.000.000,00

Setara kas pada aset lancar merupakan deposito Pemerintah Kota Balikpapan yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Balikpapan per 31 Desember 2018 yang diketahui sebesar Rp150.000.000.000,- dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp75.000.000.000,- Perbandingan deposito di Tahun 2018 dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 38
Saldo Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Bank	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	BRI Cabang Balikpapan	150.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100.000.000.000,00

No.	Bank	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	No. DC 0060322	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	
	No. DC 0060318	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
	No. DB 9997309	25.000.000.000,00	0,00	
	No. DB 9997702	25.000.000.000,00	0,00	
	No. DB 9996122	50.000.000.000,00	0,00	
2	BTN	75.000.000.000,00	50.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	No. DC 1556542	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	No. DC 1556543	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	No. DC 1556544	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	No. DC 1556545	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	No. DC 1556546	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	No. DC 1556154	25.000.000.000,00	0,00	
	Jumlah	225.000.000.000,00	100.000.000.000,00	125.000.000.000,00

5.5.1.7 Piutang Pajak

Per 31 Desember 2018
Rp267.675.844.077,45

Per 31 Desember 2017
Rp249.594.530.033,75

Piutang pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp267.675.844.077,45 adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya tetapi belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2018. Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 39
Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Des 2018	Saldo Per 31 Des 2017 (Audited)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Pajak Hotel	16.829.419.644,00	17.165.040.897,00	(335.621.253,00)
2	Pajak Restoran	3.814.514.151,00	3.266.736.702,00	547.777.449,00
3	Pajak Hiburan	1.021.264.697,10	2.036.490.767,00	(1.015.226.069,90)
4	Pajak Reklame	5.236.165.782,75	4.746.392.334,75	489.773.448,00
5	Pajak Penerangan Jalan	365.656.228,00	8.898.463.034,00	(8.532.806.806,00)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	420.852.000,00	91.012.000,00	329.840.000,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	303.451.046,60	265.827.794,00	37.623.252,60
8	Pajak Parkir	699.084.536,00	699.226.736,00	(142.200,00)
9	Pajak Sarang Burung Walet	4.518.000,00	4.518.000,00	0,00
	Jumlah	28.694.926.085,45	37.173.708.264,75	(8.478.782.179,30)
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2)	238.969.945.047,00	212.409.816.814,00	26.560.128.233,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.972.945,00	11.004.955,00	(32.010,00)
	Total	267.675.844.077,45	249.594.530.033,75	18.081.314.043,70

Penjelasan atas kenaikan/(penurunan) piutang pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Piutang Pajak Hotel Tahun 2018 sebesar Rp16.829.419.644,00, menurun (1,96)%, dari piutang tahun 2017 (Piutang Pajak Hotel Tahun 2017 sebesar Rp 17.165.040.897,00). Menurunnya nilai piutang tersebut karenaterdapat beberapa wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atas piutang pajaknya.
2. Piutang Pajak Restoran Tahun2018 sebesar Rp3.814.514.151,00, meningkat 16.77% dari piutang tahun 2017 (Piutang Pajak RestoranTahun 2017 sebesar Rp3.266.736.702,00). Peningkatan ini dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pelaporan pajaknya.
3. Piutang Pajak Hiburan Tahun 2018 sebesar Rp1.021.264.697,10, menurun(49,85)%, dari piutang tahun 2017 (Piutang Pajak Hiburan Tahun 2017 sebesar Rp2.036.490.767,00). Penurunan nilai piutang pajak hiburan karena adanya koreksi pengakuan piutang pada wajib pajak hiburan bioskop XXI.
4. Piutang Pajak Reklame Tahun 2018 sebesar Rp5.236.165.782,75, meningkat 10.32%, dari piutang tahun 2017 (Piutang Pajak Reklame Tahun 2017 sebesar Rp4.746.392.334,75). Peningkatan ini dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pelaporan pajaknya.
5. Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 sebesar Rp365.656.228,00, menurun (95,89)%, dari piutang tahun 2017 (Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017 sebesar Rp8.898.463.034,00). Penurunan ini dikarenakan adanya setoran dari PLN yang secara sistem dilunasi di 2018.
6. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018 sebesar Rp420.852.000,00,-, meningkat 362.41% dari putang tahun 2017 (Piutang Pajak Mineral Tahun 2017 sebesar Rp91.012.000,00) Peningkatan ini karena terdapat wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pelaporan pajaknya.
7. Piutang Pajak Parkir Tahun 2018 sebesar Rp699.084.536,00,-menurun tidak secara signifikan atau sebesar 0.02%, dari piutang tahun 2017 (Piutang Pajak Parkir tahun 2017 sebesar Rp699.226.736,00,-).
8. Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2018 sebesar Rp 303.451.046,60,-, meningkat sebesar 14.15%, dari piutang tahun 2017 (Piutang Pajak Air Tanah tahun 2017 sebesar Rp265.827.794,00). Peningkatan ini karena terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak yang telah ditetapkan.
9. Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2018 sebesar Rp.4.518.000,-, tidak mengalami peningkatan dan pengurangan dari piutang tahun 2017. Piutang berasal dari wajib pajak yang sudah tidak beroperasi lagi (wajib pajak pasif).
10. Piutang PBB P2 Tahun 2018 sebesar Rp238.969.945.047,00,- meningkat 12,50%, dari piutang tahun 2017 (Piutang PBB P2 tahun 2017 sebesar Rp212.409.816.814,00,-). Peningkatan ini

dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak yang telah ditetapkan.

11. Piutang BPHTB Tahun 2018 sebesar Rp10.972.945,00,-, menurun tidak secara signifikan atau (0.29)%, dari piutang tahun 2017 (Piutang Piutang BPHTB Tahun 2017 sebesar Rp11.004.955,00).

Daftar Mutasi Piutang Pajak dapat dilihat pada *Lampiran 5*

5.5.1.7.1 Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2018 **Rp(149.652.390.592,76)** Per 31 Desember 2017 **Rp(133.114.587.780,93)**

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp(149.652.390.592,76) merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang pajak dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Perbandingan Penyisihan piutang pajak di tahun 2018 dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 40

Daftar penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Piutang Pajak	(149.652.390.592,76)	(133.114.587.780,93)	(16.537.802.811,82)
	Jumlah	(149.652.390.592,76)	(133.114.587.780,93)	(16.537.802.811,82)

Rincian Umur Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 6*.

5.5.1.8 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2018 **Rp13.349.972.877,35** Per 31 Desember 2017 **Rp 11.178.295.850,90**

Piutang retribusi per 31 Desember 2018 merupakan piutang atas pungutan retribusi di OPD atas retribusi Pelayanan Pasar, kebersihan, izin gangguan, IMB, pengendalian menara telekomunikasi, pemakaian kekayaan daerah, tempat rekreasi, kesehatan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

Adapun rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 41

Rincian Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DES 2017	KOREKSI SALDO	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DES 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasar Sepinggan	799.807.657	-	343.372.110	267.500.633	875.679.134
2	Pasar Damai	344.718.613	-	179.975.250	109.353.375	415.340.488
3	Pasar Klandasan I	1.871.133.134	-	374.799.306	92.444.100	2.153.488.340
4	Pasar Klandasan II	2.259.748.571	-	301.875.600	87.328.692	2.474.295.479
5	Pasar Inpres Kebun Sayur	349.141.120	-	158.370.000	172.044.195	335.466.925

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DES 2017	KOREKSI SALDO	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DES 2018
1	2	3	4	5	6	7
6	Pasar Penampungan 'A'	265.914.148	-	154.017.600	175.508.400	244.423.348
7	Pasar Loak Besi	78.759.500	-	74.328.000	67.875.000	85.212.500
8	Pasar Pandansari	1.814.590.921	-	740.676.060	377.336.420	2.177.930.561
9	Pasar Kampung Baru Tengah	247.660.491	-	44.415.000	31.453.560	260.621.931
10	Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	-	-	952.449.103,75	-	952.449.104
11	Retribusi Kesehatan	11.280.000	-	-	9.240.000	2.040.000
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aset BPKD)	425.411.755,90	-	987.469.107,64	936.823.149,94	476.057.714
13	Retribusi Tempat Rekreasi	143.600.000	-	173.250.000	56.900.000	259.950.000
14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Produksi Tahu/Tempe)	1.500.000	-	16.500.000	1.500.000	16.500.000
15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	78.262.500	-	86.375.000	78.262.500	86.375.000
16	Retribusi Pelayanan Kebersihan	708.279.000	1.000.000,00	4.789.532.500	4.329.184.300	1.169.627.200
17	Retribusi kebersihan PDAM	768.663.025	-	8.730.987.423	8.763.152.332	736.498.116
18	Retribusi Ijin Gangguan	382.489.500	-	-	33.879.000	348.610.500
19	Retribusi IMB	338.379.915	-	-	88.865.377	249.514.538
20	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	288.956.000	-	-	259.064.000	29.892.000
	TOTAL	11.178.295.850,90	1.000.000,00	18.108.392.060,39	15.937.715.033,94	13.349.972.877,35

**5.5.1.8.1 Penyisihan Piutang
Retribusi**

Per 31 Desember 2018
Rp(9.603.541.235,29)

Per 31 Desember 2017
Rp(8.926.743.879,10)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp(9.603.541.235,29) merupakan taksiran nilai piutang retribusi yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang retribusi dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Daftar Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

**5.5.1.9 Piutang Jasa Layanan
(BLUD)**

Per 31 Desember 2018
Rp25.023.683.705,00

Per 31 Desember 2017
Rp13.961.311.041,46

Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.023.683.705,00 merupakan nilai tagihan terhadap Pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD

RSKBSayang Ibu Balikpapan, 7 (tujuh) BLUD Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota dan Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Mutasi Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 42

Rincian Piutang BLUD (Jasa Layanan) per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2018	Saldo Per 31 Des 2017	Bertambah/(berkurang)
1	RUMAH SAKIT SAYANG IBU	1.162.232.171,00	2.102.938.100,00	(940.705.929,00)
2	DINAS KESEHATAN	140.573.000,00	119.381.808,00	21.191.192,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	23.720.878.534,00	11.738.991.133,46	11.981.887.400,54
Jumlah		25.023.683.705,00	13.961.311.041,46	11.062.372.663,54

Daftar Mutasi Piutang Jasa Layanan Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 8*

5.5.1.9.1 Penyisihan Piutang Jasa Layanan Per 31 Desember 2018 **Rp(719.776.203,86)** Per 31 Desember 2017 **Rp (2.492.802.829,10)**

Penyisihan Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp(719.776.203,86) merupakan taksiran nilai piutang jasa layanan pada BLUD yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang jasa layanan dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Rincian Umur dan penyisihan Piutang Jasa Layanan dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

5.5.1.10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2018 **Rp1.177.785.893,00** Per 31 Desember 2017 **Rp 958.399.061,00**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.177.785.893,00 merupakan nilai tagihan penjualan angsuran atas penjualan rumah dinas Tahun 2010 yang dapat ditagihkan dalam tahun 2018.

5.5.1.11 Piutang Lainnya Per 31 Desember 2018 **Rp1.072.879.989,00** Per 31 Desember 2017 **Rp841.710.894,00**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.072.879.989,00, merupakan piutang pemerintah Kota kepada pihak ketiga atas tunggakan kontribusi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Balikpapan dalam perjanjian kerjasama *Built, Operate and Transfer (BOT)*, piutang atas tunggakan penyewaan aset tanah dan bangunan, serta Piutang Gaji Pensiunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 43

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Pihak III	Saldo Tahun 2017	Penambahan	Pengurangan	Tunggakan Tahun 2018
1	BOT Pasar Muara Rapak	PT Hasta Kreasi Utama	4,00	125.000.000,00	125.000.000,00	4,00
2	BOT Pasar Baru Square	PT Hasta Kreasi Utama	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00

No.	Uraian	Pihak III	Saldo Tahun 2017	Penambahan	Pengurangan	Tunggakan Tahun 2018
3	Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur (Plaza Bunsay)	PT Gusher Mitra Sejahtera	729.190.645,00	275.000.000,00	301.734.060,00	702.456.585,00
4	Penyewaan Aset Tanah	Hotel Novotel	-	420.000.000,00	420.000.000,00	-
5	Penyewaan Aset Tanah	Hotel Ibis	31.250.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	31.250.000,00
6	Gaji Pegawai / Taspen	Pegawai Pensiunan	11.696.500,00	63.604.500,00	11.696.500,00	63.604.500,00
7	Piutang Kerjasama Sewa / RSUD	Kantin RSUD dan sewa ruangan	69.573.745,00	25.568.900	69.573.745,00	25.568.900
	JUMLAH		841.710.894,00	1.279.173.400,00	1.048.004.305,00	1.072.879.989,00

Daftar Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 10*

5.5.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Per 31 Desember 2018 Rp24.625.546.000,00	Per 31 Desember 2017 Rp24.079.328.000,00
--	--	--

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp24.625.546.000,00 merupakan piutang atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Provinsi Kaltim. Daftar Umur dan mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

5.5.1.13 Belanja dibayar di muka	Per 31 Desember 2018 Rp1.666.805.720,55	Per 31 Desember 2017 Rp1.542.750.482,19
---	---	---

Saldo Belanja dibayar di muka sebesar Rp1.666.805.720,55 merupakan pembayaran atas sewa gedung, pemeliharaan peralatan kantor dan jasa internet yang perikatan dengan pihak ketiga melewati tahun 2018 dengan rincian belanjadibayar dimuka sebagai berikut:

Tabel 5. 44
Rincian Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Sewa dibayar di muka	28.602.739,73	1.542.750.482,19	(1.514.147.742,46)
2.	Pemeliharaan dibayar di muka	970.915,07	-	970.915,07
3.	Jasa internet	1.634.800.965,75	-	1.634.800.965,75
4.	Belanja BBM	2.431.100,00	-	2.431.100,00
	Jumlah	1.666.805.720,55	1.542.750.482,19	124.055.238,36

Daftar Rincian Belanja Dibayar Di Mukaper OPD dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

5.5.1.14 PersediaanPer 31 Desember 2018
Rp 21.208.079.020,23Per 31 Desember 2017
Rp20.099.507.889,78

Persediaan sebesar Rp 21.208.079.020,23 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada OPD yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut berupa alat tulis kantor, blanko/cetakan, benda berharga, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, alat kebersihan dan alat listrik, serta perlengkapan lapangan dan kesehatan yang belum digunakan per 31Desember2018.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik terkecuali untuk persediaan obat-obatan dengan menggunakan metode perpetual. Adapun metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode *First In First Out (FIFO)*.Adapun rincian persediaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 45
Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Des 2018	Per 31 Des 2017	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1.	Alat tulis kantor	1.749.199.270,11	2.084.633.140,14	(335.433.870,03)
2.	Blanko/Cetakan	2.267.808.056,14	2.137.966.954,00	129.841.102,14
3.	Benda Berharga	14.472.500,00	73.184.072,00	(58.711.572,00)
4.	Obat-obatan	5.223.593.472,66	7.725.670.894,65	(2.502.077.421,99)
5.	Bahan Kimia	697.127.341,36	707.574.937,23	(10.447.595,87)
6.	Bahan Bangunan	455.601.960,00	340.923.900,72	114.678.059,28
7.	Cadangan Energi	67.653.145,58	117.269.252,28	(49.616.106,70)
8.	Alat Kebersihan	288.018.954,75	228.329.332,42	59.689.622,33
9.	Alat Kesehatan	6.699.888.385,93	3.155.299.435,56	3.544.588.950,37
10.	Alat listrik	124.085.065,00	126.565.767,00	(2.480.702,00)
11.	Perlengkapan lapangan	304.246.633,00	119.683.200,00	184.563.433,00
12.	Bahan Makanan dan Minuman	815.437.535,70	58.154.853,78	757.282.681,92
13.	Bibit Tanaman dan Ternak	2.305.421.700,00	3.205.557.900,00	(900.136.200,00)
14.	Barang Yang Diserahkan Pihak Ketiga	195.525.000,00	18.694.250,00	176.830.750,00
	Jumlah	21.208.079.020,23	20.099.507.889,78	1.108.571.130,45

Daftar RincianPersediaan dapat lihat pada *Lampiran 13*.

Dari rincian di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sisa persediaan pada OPD Dinas Pendidikan yang didapat dari belanja yang bersumber dari BOS Pusat dan BKKBN Provinsi Kaltim seperti pada daftar berikut :

Tabel 5. 46

Rincian Persediaan yang bersumber dari BOS Pusat dan BKKBN per 31 Desember 2018

	Uraian	BOS Pusat (Rp)	BKKBN
1.	Alat tulis kantor	171.026.405,00	0.00
2.	Blanko/Cetakan	4.391.800,00	61.748.940
3.	Benda Berharga	2.019.000,00	0.00
4.	Obat-obatan	7.227.500,00	0.00
5.	Bahan Kimia	389.000,00	0.00
6.	Bahan Bangunan	880.000,00	0.00
7.	Cadangan Energi	590.000,00	0.00
8.	Alat Kebersihan	19.093.500,00	0.00
9.	Alat Kesehatan	70.000,00	877.287.730
10.	Alat listrik	2.872.500,00	0.00
11.	Perlengkapan lapangan	105.000,00	0.00
12.	Bahan Makanan dan Minuman	14.000,00	0.00
13.	Bibit Tanaman Dan Ternak	43.000,00	0.00
	Jumlah	208.721.705,00	939.036.670,00

5.5.2 Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2018
Rp535.761.455.494,62

Per 31 Desember 2017
Rp513.967.872.239,90

Investasi Jangka panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp535.761.455.494,62 merupakan Investasi Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Investasi Non Permanen	6.875.780.577,47	6.877.748.730,22	(1.968.152,75)
Penyisihan	(3.956.233.493,95)	(3.983.960.063,25)	27.726.569,30
Investasi Permanen	532.841.908.411,10	511.074.083.572,93	21.767.824.838,17
Jumlah	535.761.455.494,62	513.967.872.239,90	21.793.583.254,72

Jumlah Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.875.780.577,47 setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp(3.956.233.493,95) menjadi Rp2.919.547.083,52 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 47

Rincian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Nama	Nomor Rekening (Rp)	Nilai Tahun 2018 (Rp)	Nilai Tahun 2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Pemda Dati II BPP CQ Perikanan	601.001.5991	432.420.900,55	432.660.900,12
2.	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Pangan	601.000.5415	153.138.991,73	153.378.991,73

No.	Nama	Nomor Rekening (Rp)	Nilai Tahun 2018 (Rp)	Nilai Tahun 2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
3.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi	601.001.6052	250.500.589,89	250.740.589,89
4.	Pemda Dati II BPP QQ Penangkaran Benih	601.001.6056	343.645.331,48	343.885.331,48
5.	Pemda Dati II BPP CQ Perkebunan Kenaf	601.001.5995	200.801.067,12	202.859.248,12
6.	Pemda Dati II BPP CQ P2UPRA	601.001.6051	175.141.908,55	175.381.908,55
7.	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Hias P2PT	601.001.5994	12.753.805,79	12.993.805,79
8.	Pemda Dati II BPP CQ Peternakan	601.001.5212	141.052.630,64	141.292.630,64
9.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Total	601.001.6054	94.010.000,00	94.270.000,00
10.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Unocal	601.001.3415	56.649.230,42	56.889.230,42
11.	Pemda Dati II BPP QQ Kredit Mikro Pemkot	601.001.1915	116.225.055,98	113.735.027,99
12.	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT Dana Gakin	601.001.5993	1.000.216.921,32	1.000.216.921,32
13.	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT	601.001.6057	3.899.224.144,00	3.899.444.144,17
	Jumlah Dana Bergulir Bruto		6.875.780.577,47	6.877.748.730,22
	Jumlah Penyisihan		3.956.233.493,95	3.983.960.063,25
	Jumlah Bersih Dana Bergulir (Net Realizable Value)		2.919.547.083,52	2.893.788.666,97

Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) berdasarkan Umur dapat dilihat dalam *Lampiran 14*.

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Non Permanen-Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan dana pinjaman yang dikelola oleh instansi teknis/OPD, yaitu Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian serta Bank Muamalat Cabang Balikpapan. Dana bergulir tersebut disalurkan kepada petani, peternak, nelayan dan pengusaha kecil. Sampai dengan 31 Desember 2018 total dana yang dikelola untuk program tersebut sebesar Rp6.875.780.577,47. Namun dari dana yang disalurkan tersebut dana yang diragukan/tidak dapat ditagih adalah sebesar Rp3.956.233.493,95 sehingga jumlah bersih dana bergulir (*net realizable value*) adalah sebesar Rp2.919.547.083,52
2. Penyediaan Fasilitas Kredit UMKMK sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan penjaminan kredit kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Penempatan awal penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 dan ditempatkan dalam bentuk rekening giro pada PT Bank Kaltim. Penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut tidak disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Balikpapan karena tidak memenuhi definisi operasional Investasi Non Permanen Dana Bergulir sesuai buletin teknis nomor 7 tentang Dana Bergulir. Akun tersebut dikelompokkan pada Kas yang dibatasi penggunaannya yang dikelompokkan pada Aset lain-lain.
3. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih disebabkan antara lain oleh:
 - a. Nasabah telah meninggal dunia;
 - b. Nasabah telah pindah alamat dan tidak diketahui alamat yang baru;
 - c. Nasabah sudah tua renta, tidak sanggup mengangsur dan termasuk keluarga miskin.
4. Besar suku bunga dana bergulir yang dikenakan terhadap peminjam (nasabah) adalah sebesar 10% untuk dana bergulir jenis Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (IK-IRT). Sedangkan Dana bergulir lainnya sebesar 0%.

5. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui pengembalian dana bergulir oleh nasabah tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan, sebagian besar nasabah tidak bisa menepati janji pelunasan seperti yang dituangkan dalam akad perjanjian. Diketahui sebagian besar nasabah menunggak lebih dari satu tahun. Oleh karena itu sejak beberapa tahun yang lalu Pemerintah Kota Balikpapan mengambil kebijakan tidak menggulirkan lagi dana bergulir, namun berfokus pada upaya-upaya pengamanan/pengembalian terhadap dana bergulir yang telah disalurkan. Dengan kebijakan tersebut jumlah dana bergulir yang tidak disalurkan kembali ke nasabah mencapai saldo sebesar Rp 2.934.218.174,39 per 31 Desember 2018. Daftar Dana Bergulir yang tidak disalurkan (Saldo di Bank) dan yang disalurkan ke nasabah Per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Investasi Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp 532.841.908.411,10 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada BUMD yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 48
Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Penyertaan Modal pada Bank Kalimantan Timur	115.220.000.000	107.745.000.000	7.475.000.000
2.	Penyertaan pada PDAM Kota Balikpapan	371.253.682.563,10	357.004.246.823,00	13.896.323.579
3.	Penyertaan pada PERUSDA Kota Balikpapan	46.368.225.848,00	46.324.836.750,00	43.389.098
	Jumlah	532.841.908.411,10	511.074.083.573,00	21.414.712.676,65

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Balikpapan menyertakan modal kepada PDAM sebesar Rp 9.884.333.478,- dan kepada Bank Kaltim sebesar Rp 7.475.000.000,00. Selain itu dapat diinformasikan bahwa Penilaian Investasi Permanen pada BPD Kaltim menggunakan metode biaya (*cost method*). Sedangkan penilaian investasi permanen pada PDAM Kota Balikpapan dan Perusda Kota Balikpapan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*). Metode penilaian ini dimuat dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Rincian Investasi Jangka Panjang dimuat dalam **Lampiran 16**.

5.5.3 ASET TETAP	Per 31 Desember 2018 Rp 12.269.992.078.780,20	Per 31 Desember 2017 Rp 8.920.711.771.101.23
-------------------------	---	--

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 12.269.992.078.780,20 dan Rp 8.920.711.771.101.23 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap tahun 2018 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.49
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	Uraian	Nilai Tahun 2018	Nilai Tahun 2017	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.	Tanah	5.163.128.337.258,57	2.088.081.468.411,57	3.075.046.868.847,00	147,27
2.	Peralatan dan Mesin	695.493.307.846,49	647.857.730.111,65	47.635.577.734,84	7,35
3.	Gedung dan Bangunan	3.725.704.272.838,93	3.877.918.002.272,91	(152.213.729.433,98)	(3,93)
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.525.044.403.333,93	2.145.957.362.736,69	379.087.040.597,24	17,67
5.	Aset Tetap Lainnya	63.058.816.574,24	67.879.854.631,19	(4.821.038.056,95)	(7,10)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.562.940.928,03	93.017.352.937,22	4.545.587.990,81	4,89
Jumlah		12.269.992.078.780,20	8.920.711.771.101,23	3.349.280.307.678,97	37,54

Rincian nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan setelah dikurangi dengan nilai penyusutandapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel 5.50
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2018

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	5.163.128.337.258,57	0.00	5.163.128.337.258,57
2.	Peralatan dan Mesin	695.493.307.846,49	524.499.637.556,82	170.993.670.289,67
3.	Gedung dan Bangunan	3.725.704.272.838,93	506.875.062.578,00	3.218.829.210.260,93
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.525.044.403.333,93	1.493.619.139.095,11	1.031.425.264.238,82
5.	Aset Tetap Lainnya	63.058.816.574,24	0.00	63.058.816.574,24
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.562.940.928,03	0.00	97.562.940.928,03
Jumlah		12.269.992.078.780,20	2.524.993.839.229,93	9.744.998.239.550,26

Jumlah Aset tetap sebesar Rp9.734.946.562.769,91 merupakan nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.51
Rincian Mutasi/Koreksi Aset Tetap
Per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
Saldo Aset Tetap 2017 Audited			8.920.711.711.101,23
Mutasi Tambah Dan Koreksi 2018			3.931.118.130.708,36
a.	Realisasi Belanja Modal 2018	606.721.450.580,58	
b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	552.008.088,75	
c.	Terima Hibah	1.269.270.931,00	
d.	Terima Mutasi dari SKPD lain	93.131.266.848,00	

Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
e.	Ditemukan/Hasil Inv	3.148.953.579.286,00	
f.	Reklasifikasi dari AL ke AT	39.511.453.856,09	
g.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	40.960.001.117,94	
h.	Koreksi	19.100.000,00	
Mutasi Kurang Dan Koreksi 2018			581.837.823.029,40
a.	Diserahkan/Dihibahkan	398.543.949.028,62	
b.	Penghapusan Aset Tetap	1.051.035.660,00	
c.	Mutasi ke SKPD lain	93.131.266.848,00	
d.	Reklasifikasi dari AT ke AL	19.925.022.424,28	
e.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	46.037.386.354,64	
f.	Koreksi	738.865.680,40	
g.	Barang di bawah kapitalisasi	10.844.297.879,46	
i.	Penilaian/Utang(Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)	11.565.999.154,00	
Jumlah Saldo Per 31 Desember 2018			12.269.992.078.780,20
Akumulasi Penyusutan			2.524.993.839.229,93
Nilai Buku Per 31 Desember 2018			9.744.998.239.550,26

- a. Saldo Aset Tetap 2017 Audited sebesar Rp 8.920.711.771.101,23.
- b. Mutasi tambah aset tetap tahun 2018 sebesar Rp3.931.118.130.708,36 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp 606.721.450.580,58 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp 55.810.737.585,00 (9,20%), Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 83.075.215.847,10 (13,69%), Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp 106.275.034.611,15 (17,52%), Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 328.086.131.679,59 (54,08%) dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 33.474.330.857,74 (5,52%). Rincian Realisasi Belanja Modal 2018 per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 17*
 - 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi) sebesar Rp 552.008.088,75 Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih. Rincian Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi) per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 18*
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp 1.269.270.931,00 yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Rincian Terima Hibah per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 19*
 - 4) Terima mutasi dari SKPD lain sebesar Rp 93.131.266.848,00. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar OPD.

- 5) Ditemukan/Hasil Inventarisasi sebesar Rp3.148.953.579.286,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Rincian Terima Ditemukan/Hasil Inventarisasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**
 - 6) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp39.511.453.856,09 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. Rincian Reklasifikasi dari AL ke AT per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 21**
 - 7) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp40.960.001.117,94.
 - 8) Koreksi sebesar Rp 19.100.000,00 pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian.
- c. Mutasi kurang aset tetap tahun 2018 sebesar Rp581.837.823.029,40 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Diserahkan/Dihibahkan sebesar Rp398.543.949.028,62 yang terdiri dari tanah sebesar Rp 113.302.840.000,00, peralatan dan mesin sebesar Rp 30.095.286.142,34, Gedung dan bangunan sebesar Rp 250.861.769.463,33, Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 405.504.148,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp 3.878.549.301,95.
 - 2) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp 1.051.035.660,00 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 135.547.540,00 pada RSKBSayang Ibu. Sedangkan Gedung dan Bangunan sebesar Rp915.488.120,00 pada Dinas Kesehatan. Rincian Penghapusan Aset Tetap per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 22**
 - 3) Mutasi ke SKPD lain sebesar Rp93.131.266.848,00. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar SKPD.
 - 4) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp19.925.022.424,28 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 14.526.954.097,28, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.226.220.431,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 3.171.847.896,00. Rincian Reklasifikasi dari AT ke AL per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**
 - 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp46.037.386.354,64.
 - 6) Koreksi sebesar Rp738.865.680,40 yang terdiri dari tanah sebesar Rp 136.900.000,00, peralatan dan mesin sebesar Rp 212.450.000,00, aset tetap lainnya sebesar Rp303.047.371,60 dan konstruksi dalam pekerjaan sebesar Rp86.468.308,80.
 - 7) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp10.844.297.879,46 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp 8.894.988.025,35, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 939.635.959,35, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp785.458.594,76 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp224.215.300,00. Rincian aset di bawah minimum kapitalisasi dapat dilihat pada **Lampiran 24**
 - 8) Penilaian/Utang sebesar Rp11.565.999.154,00 merupakan belanja modal pembayaran sisa hutang atas ganti rugi tanah taman bekapai dan bendali V pada tahun anggaran 2017 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang dilakukan pembayarannya di tahun anggaran 2018.
- d. Terdapat Aset Tetap sebesar Rp 413.348.810.314,01 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap maupun aset ekstra komtable terdiri dari 9 SMA sebesar Rp 211.118.348.526,68 dan 6 SMK sebesar Rp 200.098.198.064,38 dan 1 SLB sebesar Rp 2.132.263.722,95 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan

ke Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa ini merupakan transaksi yang mempengaruhi pengukuran aset tetap yaitu dengan ditetapkannya Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana dan Prasarana dan Dokumen dari Pemerintah Kota Balikpapan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Nomor Pihak Kesatu : 137.1/2120/Pem dan Nomor Pihak Kedua : 127/5625/B.PPOD.III yang berimplikasi pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

- e. Sedangkan aset tetap maupun aset ekstrascomtable Sekolah Menengah dan SLB yang tidak diterima dalam Berita Acara Serah Terima P3D sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sejumlah Rp 23.539.954.210,69 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin pada 9 SMA sebesar Rp 9.969.290.652,94, 6 SMK sebesar Rp 9.470.303.753,76 dan SLB sebesar Rp 92.550.000,00, Gedung dan Bangunan pada 2 SMA sebesar Rp 993.600.000,00 dan 1 SMK sebesar Rp 1.186.134.431,00, Jalan Irigasi Jaringan pada 1 SMK sebesar Rp 21.500.000,00 dan Aset Tetap Lainnya pada 5 SMA sebesar Rp 738.138.558,00 dan 4 SMK sebesar Rp 1.068.436.815,00.

Telah dilakukan validasi ulang atas aset P3D Sekolah Menengah dan SLB yang tidak diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan kondisi barang rusak berat sebesar Rp 16.989.871.521,92 dan barang yang tidak ditemukan sebesar Rp 6.550.494.444,66 berdasarkan data kertas kerja yang diterima dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Badan Pengelola Keuangan Daerah. Rincian hasil validasi ulang tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 24.1**

- f. Penjelasan selisih tambah kurang antara realisasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dapat dijelaskan bahwa nilai aset tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing masing sebesar Rp 12.269.992.078.780,20 dan Rp 8.920.711.771.101,23. Secara Umum aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 3.349.280.307.678,98 sementara realisasi belanja modal sebesar Rp 608.340.577.920,58.

Terdapat selisih kurang sebesar Rp 2.712.494.998.339,25 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.52
Rincian Selisih Antara Realisasi Belanja Modal dan Penambahan Aset Tetap

Uraian		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
a.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	652.437.332,29	100.429.243,54
b.	Terima Hibah	1.269.270.931,00	
c.	Terima Mutasi dari SKPD lain	93.131.266.848,00	
d.	Ditemukan/Hasil Inv	3.148.953.579.286,00	
e.	Diserahkan/Dihibahkan		398.543.949.028,62
f.	Penghapusan Aset Tetap		1.051.035.660,00
g.	Mutasi ke SKPD lain		93.131.266.848,00
h.	Reklasifikasi dari AT ke AL		19.925.022.424,28
i.	Reklasifikasi dari AL ke AT	41.701.927.856,09	2.190.474.000,00

Uraian		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
j.	Reklasifikasi antar jenis aset tetap	40.960.001.117,94	46.037.386.354,64
k.	Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya		
l.	Koreksi	19.100.000,00	738.865.680,40
m.	Barang Rusak Berat		
n.	Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut		
o.	Barang di bawah kapitalisasi		10.844.297.879,46
p.	Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA		
q.	Penilaian/Utang (Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)		11.565.999.154,00
Jumlah		3.326.687.583.371,32	(584.128.726.272,94)
Selisih Tambah Kurang			2.742.558.857.098,38
Belanja Modal Aset Lainnya			1.619.127.340,00
Total Selisih Tambah Kurang			2.740.939.729.758,38

5.5.3.1 TANAH

Per 31 Desember 2018
Rp 5.163.128.337.258,57

Per 31 Desember 2017
Rp 2.088.081.468.411,57

Nilai Buku Aset Tetap berupa Tanah Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 5.163.128.337.258,57 dan Rp 2.088.081.468.411,57 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Tanah pada TA 2018 sebesar Rp.3.075.046.868.847,00.

Nilai tercatat (*carrying amount*) Aset tetap berupa Tanah disajikan berdasarkan biaya perolehan.

Aset Tetap berupa Tanah tidak disusutkan.

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2018 sebesar Rp5.163.128.337.258,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53
SALDO ASET TETAP TANAH
per 31 Desember 2018

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tanah 2017 Audited		2.088.081.468.411,57
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2018		
	a. Realisasi Belanja Modal Tanah 2018	55.810.737.585,00	
	b. Ditemukan/Hasil Inv	3.143.829.195.513,00	
	c. Reklasifikasi dari AL ke AT	46.820.975,00	
	d. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.229.297.980,00	
			3.200.916.052.053,00
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2018		
	a. Diserahkan/Dihibahkan	113.302.840.000,00	
	b. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	863.444.052,00	
	c. Koreksi	136.900.000,00	
	d. Penilaian/Utang(Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)	11.565.999.154,00	

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
			125.869.183.206,00
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2018		5.163.128.337.258,57

- a. Saldo Aset Tetap Tanah 2017 Audited sebesar Rp 2.088.081.468.411,57
- b. Mutasi tambah aset tetap tanah tahun 2018 sebesar Rp3.200.916.052.053,00dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Realisasi Belanja Modal2018 sebesar Rp 55.810.737.585,00yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 622.363.621,00, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp 54.095.694.012,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 56.983.952,00 dan Dinas Pangan Pertanian Perikanan sebesar Rp 1.035.695.000,00.
 - 2) Ditemukan/Hasil Inventarisasi sebesar Rp 3.143.829.195.513,00 pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan nilai aset tanah dibawah jalan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45-371/2018 tentang Penetapan Hasil Penilaian Tanah Yang Berada Di Bawah Jalan Untuk 638 Ruas Jalan Milik Pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp 3.136.090.313.050,00 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 2.894.684.463,00 yang merupakan aset tanah rumah dinas golongan III.
 - 3) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp 46.820.975,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - 4) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp1.229.297.980,00.
- c. Mutasi kurang aset tetap tanah tahun 2018 sebesar Rp125.062.723.106,00dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Diserahkan/Dihibahkan sebesar Rp113.302.840.000,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap pada sejumlah 9 SMA dengan nilai sebesar Rp54.479.242.000,00 dan sebanyak 5 SMK dengan nilai sebesar Rp57.823.598.000,00 dan 1 SLB dengan nilai tanah sebesar Rp 1.000.000.000,00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.54
SALDO ASET TETAP TANAH YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	ASET TETAP (Rp)
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	5.873.100.000.00
2	SMA Negeri 2	412.900.000.00
3	SMA Negeri 3	2.402.550.000.00

No.	Nama Sekolah	ASET TETAP (Rp)
4	SMA Negeri 4	9.190.000.000.00
5	SMA Negeri 5	2.800.000.000.00
6	SMA Negeri 6	9.000.000.000.00
7	SMA Negeri 7	1.273.500.000.00
8	SMA Negeri 8	1.280.000.000.00
9	SMA Negeri 9	22.247.192.000.00
	Jumlah I	54.479.242.000.00
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	27.000.000.000.00
2	SMK Negeri 2	4.240.000.000.00
3	SMK Negeri 3	9.007.598.000.00
4	SMK Negeri 4	8.792.000.000.00
5	SMK Negeri 5	8.784.000.000.00
	Jumlah II	57.823.598.000.00
III	SLB NEGERI	
1	SLB Negeri	1.000.000.000.00
	Jumlah III	1.000.000.000.00
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		113.302.840.000.00

- 2). Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp 863.444.052,00.
- 3). Koreksi sebesar Rp 136.900.000,00 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 53.600.000,00 dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp 83.300.000,00 yang merupakan pembayaran honor kegiatan pengadaan tanah.
- 4). Penilaian/Utang sebesar Rp11.565.999.154,00 merupakan belanja modal pembayaran sisa hutang atas ganti rugi tanah taman bekapai dan bendali V pada tahun anggaran 2017 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang dilakukan pembayarannya di tahun anggaran 2018

5.5.3.2 PERALATAN DAN MESIN

Per 31 Desember 2018
Rp695.493.307.846,49

Per 31 Desember 2017
Rp 647.857.730.111,65

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp695.493.307.846,49 dan Rp 647.857.730.111,65 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada TA 2018 sebesar Rp 2.188.804.528,69.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk peralatan dan mesin ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Tabel 5.55

PERHITUNGAN MASA MANFAAT PERALATAN DAN MESIN
per 31 Desember 2018

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin		
Alat Besar		
Alat Besar Darat	10	Garis Lurus
Alat Besar Apung	8	Garis Lurus
Alat Bantu	7	Garis Lurus
Alat Angkutan		
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	Garis Lurus
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	Garis Lurus
Alat Angkutan Apung Bermotor	10	Garis Lurus
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	Garis Lurus
Alat Angkut Bermotor Udara	20	Garis Lurus
Alat Bengkel Dan Alat Ukur		
Alat Bengkel Bermesin	10	Garis Lurus
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	Garis Lurus
Alat Ukur	5	Garis Lurus
Alat Pertanian		
Alat Pengolahan	4	Garis Lurus
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	4	Garis Lurus
Alat Kantor Dan Rumah Tangga		
Alat Kantor	5	Garis Lurus
Alat Rumah Tangga	5	Garis Lurus
Alat Studio Kumunikasi Dan Pemancar		
Alat Studio	5	Garis Lurus
Alat Komunikasi	5	Garis Lurus
Peralatan Pemancar	10	Garis Lurus
Alat Kedokteran Dan Kesehatan		
Alat Kedokteran	5	Garis Lurus
Alat Kesehatan Umum	5	Garis Lurus
Alat Laboratorium		
Unit Alat Laboratorium	8	Garis Lurus
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	Garis Lurus
Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	15	Garis Lurus
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	Garis Lurus
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10	Garis Lurus
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	Garis Lurus
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	Garis Lurus
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10	Garis Lurus
Alat Persenjataan		
Senjata Api	10	Garis Lurus

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
Persenjataan Non Senjata Api	3	Garis Lurus
Senjata Sinar	5	Garis Lurus
Alat Khusus Kepolisian Komputer	4	Garis Lurus
Komputer Unit	4	Garis Lurus
Peralatan Komputer	4	Garis Lurus
Alat Eksplorasi		
Alat Eksplorasi Topografi	5	Garis Lurus
Alat Eksplorasi Geofisika	10	Garis Lurus
Alat Pengeboran		
Alat Pengeboran Mesin	10	Garis Lurus
Alat Pengeboran Non Mesin	10	Garis Lurus
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
Peralatan Sumur	10	Garis Lurus
Peralatan Produksi	10	Garis Lurus
Pengolahan dan Pemurnian	15	Garis Lurus
Alat Bantu Eksplorasi		
Alat Bantu Eksplorasi	10	Garis Lurus
Alat Bantu Produksi	10	Garis Lurus
Alat Keselamatan Kerja		
Alat Deteksi	5	Garis Lurus
Alat Pelindung	5	Garis Lurus
Alat SAR	2	Garis Lurus
Alat Kerja Penerbangan	10	Garis Lurus
Alat Peraga		
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	Garis Lurus
Alat Peraga Sekolah	4	Garis Lurus
Peralatan Proses dan Produksi		
Unit Peralatan Proses/Produksi	8	Garis Lurus
Rambu-Rambu		
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	Garis Lurus
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	Garis Lurus
Peralatan Olahraga		
Peralatan Olahraga	3	Garis Lurus

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2018 sebesar Rp695.493.307.846,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56
SALDO ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Peralatan Mesin 2017 Audited		647.857.730.111,65
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2018		
a.	Realisasi Belanja Modal 2018	83.075.215.847,10	
b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	49.162.088,00	
c.	Terima Hibah	1.116.367.331,00	
d.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	2.420.382.450,00	
e.	Ditemukan/Hasil Inv	114.791.500,00	
f.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	17.747.444.503,71	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		104.523.363.719,81
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2018		
a.	Diserahkan/Dihibahkan	30.095.286.142,34	
b.	Penghapusan Aset Tetap	135.547.540,00	
c.	Mutasi Ke SKPD lain	2.420.382.450,00	
d.	Reklasifikasi dari AT ke AL	14.526.954.097,28	
e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	602.177.730,00	
f.	Koreksi	212.450.000,00	
g.	Barang di bawah kapitalisasi	8.894.988.025,35	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		56.887.785.984,97
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2018		695.493.307.846,49
V.	Akumulasi Penyusutan		524.499.637.556,82
VI.	Nilai Buku Per 31 Desember 2018		170.993.670.289,67

- a. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2017 Audited sebesar Rp 647.857.730.111,65.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2018 sebesar Rp104.523.363.719,81dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp 83.075.215.847,10 yang terdiri dari Sekretariat Dewan sebesar Rp 668.103.000,00, Setdakota sebesar Rp 1.332.506.106,00, Kecamatan Balikpapan Timur sebesar Rp 249.210.500,00, Kecamatan BalikpapanSelatan sebesar Rp 152.088.000,00, Kecamatan BalikpapanBarat sebesar Rp 309.581.800,00, Kecamatan BalikpapanUtara sebesar Rp 235.131.500,00, Kecamatan BalikpapanTengah sebesar Rp 269.809.375,00, Kecamatan BalikpapanKota sebesar Rp 298.348.050,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 10.124.720.500,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 17.811.730.000,00, Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp 258.586.030,00, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp 365.431.780,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 17.608.830.500,00, Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp 2.813.780.094,00, Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu sebesar Rp 960.165.561,00, Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 3.759.110.303,10, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 16.616.156.493,00, Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp 415.132.500,00, Dinas

Sosial sebesar Rp 384.735.000,00, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp 163,845.000,00, DP3AKB sebesar Rp 564.067.399,00, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 376.386.900,00,DKUMKMP sebesar Rp 147.558.000,00, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebesar Rp 240.765.500,00, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp 1.664.820.000,00, Dinas Perdagangan sebesar Rp 424.814.500,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 488.451.700,00, Inspektorat Kota sebesar Rp 60.340.495,00, Bappeda Litbang sebesar Rp 309.125.200,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 3.057.638.850,00, Disporapar sebesar Rp 212.195.911,00, Kantor Kesbangpol dan Politik sebesar Rp 89.177.000,00, Satpol PP sebesar Rp 34.375.000,00, BKPSDM sebesar Rp 100.527.000,00, Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp 207.715.250,00, Diskominfo sebesar Rp 300.255.050,00.

- 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT berupa kapitalisasi sebesar Rp 49.162.088,00. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp 1.116.367.331,00 dengan rincian Dinas Kesehatan sebesar Rp 287.430.101,00, RSUD sebesar Rp 18.757.500,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 266.661.700,00, dan Dinas Perdagangan sebesar Rp 543.518.030,00.
 - 4) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp 2.420.382.450,00. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar SKPD.
 - 5) Ditemukan/Hasil Inventarisasi sebesar Rp 114.791.500,00 yang terdiri dari Dinas Perhubungan sebesar Rp 2.300.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp 112.491.500,00.
 - 6) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 17.747.444.503,71.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2018 sebesar Rp 56.887.785.984,97 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Diserahkan/Dihibahkan sebesar Rp 41.459.862.873,74 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas maupun aset ekstracomtable yang terdiri dari 9 SMA sebesar Rp 20.156.126.318,71, 6 SMK sebesar Rp 20.501.487.832,03, dan 1 SLB sebesar Rp 802.248.723,00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.57
SALDO ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2018

No.	Nama Sekolah	Tanah (Rp)
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	2.718.955.971,00
2	SMA Negeri 2	2.121.684.501,53
3	SMA Negeri 3	1.321.505.917,57
4	SMA Negeri 4	2.753.333.901,58
5	SMA Negeri 5	629.639.996,60
6	SMA Negeri 6	2.912.664.271,92
7	SMA Negeri 7	1.993.108.780,21
8	SMA Negeri 8	2.183.586.535,97
9	SMA Negeri 9	3.521.646.442,33
	Jumlah I	20.156.126.318,71
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	5.576.910.149,39
2	SMK Negeri 2	2.849.380.931,00
3	SMK Negeri 3	2.881.780.099,60
4	SMK Negeri 4	2.679.855.298,64
5	SMK Negeri 5	1.249.388.538,00
6	SMK Negeri 6	5.264.172.815,40
	Jumlah II	20.501.487.832,03
III	SLB NEGERI	
1	SLB Negeri	802.248.723,00
	Jumlah III	802.248.723,00
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		41.459.862.873,74

- 2) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp135.547.540,00 pada RSKB Sayang Ibu sebesar Rp 135.547.540,00.
- 3) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp 2.420.382.450,00. Transaksi ini berlawanan dengan transaksi Mutasi dari SKPD Lain dan sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap.
- 4) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp 14.526.954.097,28 yang terdiri dari Kecamatan Balikpapan tengah sebesar Rp 98.821.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp 393.230.279,00, RSKB Sayang Ibu sebesar 1.868.430.149,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 11.840.533.819,28, BPPDRD sebesar Rp 196.317.850,00 dan Inspektorat sebesar Rp 129.621.000,00.
- 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 602.177.730,00.

- 6) Koreksi kurang sebesar Rp 212.450.000,00 yang terdiri dari Setda Kota sebesar Rp 118.450.000,00 dan Satpol PP sebesar Rp 94.000.000,00 yang merupakan koreksi atas dobel pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
- 7) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp 8.894.988.025,35 terdiri dari Setwan sebesar Rp 962.500,00, Setdakot sebesar Rp 161.884.850,00, Kecamatan Balikpapan Timur sebesar Rp 16.280.000,00, Kecamatan Balikpapan Barat sebesar Rp 5.758.500,00, Kecamatan Balikpapan Utara sebesar Rp 13.347.300,00, Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar Rp 27.970.800,00, Kecamatan Balikpapan Kota sebesar Rp 21.128.500,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 155.815.500,05, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 2.695.000,00, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp 4.550.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 95.550.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp 132.172.770,00, RSKB Sayang Ibu sebesar Rp 42.458.534,00, RSUD sebesar Rp 52.258.769,30, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 7.957.547.080,00, Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp 7.107.500,00, Dinas Sosial sebesar Rp 22.930.000,00, DP3AKB sebesar Rp 5.777.200,00, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 30.552.500,00, Dinas Koperasi UMKMP sebesar Rp 24.557.500,00, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu sebesar Rp 4.112.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 53.845.000,00, Inspektorat sebesar Rp 10.499.995,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 43.250.000,00, Disporapar sebesar Rp 950.400,00, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 998.800,00.

5.5.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN	Per 31 Desember 2018 Rp 3.725.704.272.838.93	Per 31 Desember 2017 Rp 3.877.918.002.272,91
------------------------------------	--	--

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 3.725.704.272.838.93 dan Rp 3.877.918.002.272,91 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas yang terdiri dari bangunan gedung. Terdapat penurunan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada TA 2018 sebesar Rp 167.002.316.236,96.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk gedung dan bangunan sebesar Rp 25.000.000,00 ke atas.

Tabel 5.58
Masa Manfaat Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
Bangunan Gedung		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	Garis Lurus
Bangunan Tempat Tinggal	50	Garis Lurus
Monumen		

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	Garis Lurus
Bangunan Bersejarah	50	Garis Lurus
Bangunan Menara	40	Garis Lurus
Tugu/Tanda Batas	50	Garis Lurus

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada pada Tahun 2018 sebesar Rp 3.725.704.272.838,93 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.59
NILAI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN
per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Bangunan Dan Gedung 2017 Audited		3.877.918.002.272,91
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2018		
a.	Realisasi Belanja Modal 2018	106.276.034.611,15	
b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	410.367.244,29	
c.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	90.710.884.398,00	
d.	Ditemukan/Hasil Inv	5.009.592.273,00	
e.	Reklasifikasi dari AL ke AT	378.097.034,83	
f.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	3.344.657.216,41	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		206.128.632.777,68
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2018		
a.	Diserahkan/Dihibahkan	250.861.769.436,33	
b.	Penghapusan Aset Tetap	915.488.120,00	
c.	Mutasi Ke SKPD lain	90.710.884.398,00	
d.	Reklasifikasi dari AT ke AL	2.226.220.431,00	
e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	12.688.363.866,98	
f.	Barang di bawah kapitalisasi	939.635.959,35	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		358.342.362.211,66
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2018		3.725.704.272.838,93
V.	Akumulasi Penyusutan		506.875.062.578,00
VI.	Nilai Buku Per 31 Desember 2018		3.218.829.210.260,93

- a. Saldo Aset Bangunan Dan Gedung 2017 Audited sebesar Rp 3.877.918.002.272,91.
- b. Mutasi tambah aset tetap Bangunan Dan Gedung tahun 2018 sebesar Rp206.128.632.777,68dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2018Rp106.275.034.611,15 yang terdiri dari Kecamatan Balikpapan Utara sebesar Rp 29.040.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 36.979.474.144,65,Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp 5.082.165.864,00, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp 96.140.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 5.490.159.786,00, Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp 14.936.594.095,00,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 26.841.793.051,50, DP3AKB sebesar Rp 201.641.800,00, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 893.215.900,00, DKUMKMP sebesar Rp 1.814.276.000,00, Dinas Perdagangan sebesar Rp 4.587.065.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 148.167.000,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 447.108.750,00, Disporapar sebesar Rp 8.543.333.000,00, Kantor Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp 184.360.220,00.
 - 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT berupa kapitalisasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 410.367.244,29.
 - 3) Terima Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp. 90.710.884.398,00.
 - 4) Ditemukan/Hasil Inv sebesar Rp 5.009.592.273,00 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 75,000.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 4.934.592.273,00 yang merupakan bangunan rumah dinas golongan III.
 - 5) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp 378.097.034,83 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebesar Rp 314.608.427,83 dan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu sebesar Rp 63.488.607,00.
 - 6) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp3.344.657.216,41.
- c. Mutasi kurang aset tetap Bangunan Dan Gedung tahun 2018 sebesar Rp. 358.342.362.211,66dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Diserahkan/Dihibahkan sebesar Rp 252.325.660.046,32 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas maupun aset ekstracomtable yang terdiri dari 9 SMA sebesar Rp. 131.310.284.862,97, 6 SMK sebesar Rp. 120.736.081.183,35 dan 1 SLB sebesar Rp. 279.294.000,00 karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.60
SALDO ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	Bangunan Dan Gedung (Rp)
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	12.118.201.400,09
2	SMA Negeri 2	17.155.541.278,50
3	SMA Negeri 3	11.900.860.997,55
4	SMA Negeri 4	10.007.311.020,55
5	SMA Negeri 5	16.909.113.425,63
6	SMA Negeri 6	7.085.147.964,09
7	SMA Negeri 7	13.590.767.978,09
8	SMA Negeri 8	5.970.054.314,94
9	SMA Negeri 9	36.573.286.483,53
	Jumlah I	131.310.284.862,97
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	30.347.221.168,09
2	SMK Negeri 2	6.213.471.640,09
3	SMK Negeri 3	9.416.788.162,67
4	SMK Negeri 4	12.904.556.484,28
5	SMK Negeri 5	14.062.363.675,22
6	SMK Negeri 6	47.791.680.053,00
	Jumlah II	120.736.081.183,35
III	SLB NEGERI	
1	SLB Negeri	279.294.000,00
	Jumlah III	279.294.000,00
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		252.325.660.046,32

- 2) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. 915.488.120,00 pada Dinas Kesehatan.
- 3) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp. Rp. 90.710.884.398,00.
- 4) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp. 2.226.220.431,00 yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 2.179.734.431,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp 46.486.000,00
- 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp. 12.688.363.866,98.
- 6) Koreksi kurang nilai gedung dan bangunan yang dibawah nilai minimum sebesar Rp. 939.635.959,35 karena tidak memenuhi syarat Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap gedung dan bangunan yang terdiri dari Kecamatan Balikpapan Kota sebesar Rp 143.500.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 233.089.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp 38.975.100,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 210.328.559,35, DP3AKB sebesar Rp 41.980.400,00 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 271.763.000,00.

**5.5.3.4 JALAN, JARINGAN
DAN IRIGASI**

Per 31 Desember 2018
Rp 2.525.044.403.333,93

Per 31 Desember 2017
Rp 2.145.957.362.736,69

Nilai Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.525.044.403.333,93 dan Rp 2.145.957.362.736,69 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada TA 2018 sebesar Rp 192.895.902.142,29.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 25.000.000,00 ke atas.

Tabel 5.61
Masa Manfaat Jalan Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2018

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Jalan	10	Garis Lurus
Jembatan	50	Garis Lurus
Bangunan Air		
Bangunan Air Irigasi	50	Garis Lurus
Bangunan Pengairan Air Pasang Surut	50	Garis Lurus
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	Garis Lurus
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	Garis Lurus
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	Garis Lurus
Bangunan Air Bersih/Baku	40	Garis Lurus
Bangunan Air Kotor	40	Garis Lurus
Instalasi		
Instalasi Air Bersih/Air Baku	30	Garis Lurus
Instalasi Air Kotor	30	Garis Lurus
Instalasi Pengolahan Sampah	10	Garis Lurus
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	Garis Lurus
Instalasi Pembangkit Listrik	40	Garis Lurus
Instalasi Gardu Listrik	40	Garis Lurus
Instalasi Pertahanan	30	Garis Lurus
Instalasi Gas	30	Garis Lurus
Instalasi Pengaman	20	Garis Lurus
Instalasi Lain	5	Garis Lurus

Uraian	Masa Manfaat	Metode Penyusutan
	(Tahun)	
Jaringan		
Jaringan Air Minum	30	Garis Lurus
Jaringan Listrik	40	Garis Lurus
Jaringan Telepon	20	Garis Lurus
Jaringan Gas	30	Garis Lurus

Saldo Aset Tetap Jalan Jaringan Irigasi pada Tahun 2018 sebesar Rp 2.525.044.403.333,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62

**SALDO ASET JALAN JARINGAN DAN IRIGASI
per 31 Desember 2018**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Jalan Jaringan Dan Irigasi 2017 Audited		2.145.957.362.736,69
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2018		
a.	Realisasi Belanja Modal 2018	328.086.131.679,59	
b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	192.908.000,00	
c.	Reklasifikasi dari AL ke AT	38.768.585.253,26	
d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	16.402.919.467,67	
e.	Koreksi	19.100.000,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		383.469.644.400,52
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2018		
a.	Diserahkan/Dihibahkan	405.504.148,00	
b.	Reklasifikasi dari AT ke AL	2.190.474.000,00	
c.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	1.001.167.060,52	
d.	Barang di bawah kapitalisasi	785.458.594,76	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		4.382.603.803,28
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2018		2.525.044.403.333,93
V.	Akumulasi Penyusutan		1.493.619.139.095,11
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2018		1.031.425.264.238,82

- a. Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 2017 Audited sebesar Rp 2.145.957.362.736,69.
- b. Mutasi tambah aset tetap Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2018 sebesar Rp383.469.644.400,52dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp 328.086.131.679,59 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 185.031.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 304.952.042.215,59, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 75.058.500,00, Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 2.231.759.485,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 5.915.057.300,00, Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp 3.053.680.500,00, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 3.392.563.500,00, DKUMKMP sebesar Rp 7.833.942.000,00, Dinas Perdagangan sebesar Rp 24.164.250,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 422.832.929,00.
 - 2) Belanja BJ/Pemeliharaan yang menambah AT (kapitalisasi) sebesar Rp 192.908.000,00 Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 192.908.000,00.
 - 3) Reklasifikasi AL ke AT sebesar Rp 38.768.585.253,26yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 36.429.185.655,26yang merupakan Jalan kota yang sebelumnya berada pada aset lainnya direklas kembali ke aset tetap, sedangkan nilai jalan sebesar Rp 2.190.474.000,00 setelah dilakukan klarifikasi ulang Dinas Pekerjaan Umum merupakan Jalan Nasional sehingga direklas kembali ke aset lainnya dan DKUMKMP sebesar Rp 148.925.598,00.
 - 4) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp16.402.919.467,67.
 - 5) Koreksi tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 19.100.000,00 pada DKUMKMP.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2018 sebesar Rp4.382.603.803,28 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Diserahkan/Dihibahkan sebesar Rp 562.536.148,00 yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap maupun aset ekstrascomtable yang terdiri 9 SMA sebesar Rp. 382.176.848,00 dan 6 SMK sebesar Rp. 180.359.300,00karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.63
SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	Jalan, Jaringan dan Irigasi
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	-
2	SMA Negeri 2	-
3	SMA Negeri 3	36.787.000,00
4	SMA Negeri 4	125.846.000,00
5	SMA Negeri 5	7.756.000,00
6	SMA Negeri 6	140.777.848,00
7	SMA Negeri 7	-
8	SMA Negeri 8	13.630.000,00
9	SMA Negeri 9	57.380.000,00
	Jumlah I	382.176.848,00
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	62.750.000,00
2	SMK Negeri 2	-
3	SMK Negeri 3	45.413.000,00
4	SMK Negeri 4	-
5	SMK Negeri 5	72.195.300,00
6	SMK Negeri 6	-
	Jumlah II	180.359.300,00
III	SLB NEGERI	
1	SLB Negeri	-
	Jumlah III	-
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		562.536.148,00

- 2) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp. 1.001.167.060,52.
- 3) Koreksi kurang nilai gedung dan bangunan yang dibawah nilai minimum sebesar Rp. 785.458.594,76, karena tidak memenuhi syarat Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap gedung dan bangunan yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 31.338.522,88, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 75.058.500,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp 82.974.100,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 566.753.221,88, Dinas Pangan Pertanian Perikanan sebesar Rp 5.170.000,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp 24.164.250,00.

**5.5.3.5 ASET TETAP
LAINNYA**

Per 31 Desember 2018
Rp 63.058.816.574,24

Per 31 Desember 2017
Rp 67.879.854.631,19

Nilai Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 63.058.816.574,24 dan Rp 67.879.854.631,19 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya pada TA 2018 sebesar Rp 4.821.038.056,95.

Aset Tetap berupa aset tetap lainnya tidak disusutkan.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2018 sebesar Rp 63.058.816.574,24 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.64
SALDO ASET TETAP LAINNYA
per 31 Desember 2018**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tetap Lainnya 2017 Audited		67.879.854.631,19
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2018		
	a. Realisasi Belanja Modal 2018	33.474.330.857,74	
	b. Terima Hibah	152.903.600,00	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	11.621.000,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		33.638.855.457,74
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2018		
	a. Diserahkan/Dihibahkan	3.878.549.301,95	
	b. Reklasifikasi dari AT ke AL	3.171.847.896,00	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	30.882.233.645,14	
	d. Koreksi	303.047.371,60	
	e. Barang di bawah kapitalisasi	224.215.300,00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		38.459.893.514,69
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2018		63.058.816.574,24

- a. Saldo Aset Tetap Lainnya 2017 Audited sebesar Rp 67.879.854.631,19.
- b. Mutasi tambah aset tetap Aset Tetap Lainnya tahun 2018 sebesar Rp 33.638.855.457,74 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2018 sebesar Rp 33.474.330.857,74 yang terdiri dari Setwan sebesar Rp 29.467.000,00, Setdakot sebesar Rp 618.070.200,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 16.580.977.503,00, Dinas Perumahan dan

Pemukiman sebesar Rp188.656.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 493.964.993,75, Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp2.330.569.056,99, Rumah Sakit Klinik Sayang Ibu sebesar Rp724.423.808,00, Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.250.931.840,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 7.964.960.404,00, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 35.695.000,00,DKUMKMP sebesar Rp157.727.000,00, Bappeda Litbang sebesar Rp319.357.500,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 1.053.827.000,00, Disporapar sebesar Rp191.680.000,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp534.023.552,00.

- 2) Terima Hibah sebesar Rp152.903.600,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp24.667.000,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp128.236.600,00.
- 3) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp 11.621.000,00.

c. Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tahun 2018 sebesar Rp38.459.893.514,69dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Diserahkan/Dihibahkan sebesar Rp5.697.911.245,95yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan tidak digunakan dalam kegiatan operasional entitas yaitu berupa Aset Tetap maupun aset ekstrakomtable yang terdiri 9 SMA sebesar Rp4.790.518.497,00, 6 SMK sebesar Rp856.671.745,00 dan 1 SLB sebesar Rp50.720.999,95karena sekolah-sekolah tersebut telah dialihkan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun rincian Aset Tetap dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.65
SALDO ASET TETAP LAINNYA YANG DIALIHKAN KE PROVINSI
per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	Aset Tetap Lainnya
I	SMA NEGERI	
1	SMA Negeri 1	842.584.000,00
2	SMA Negeri 2	57.244.840,00
3	SMA Negeri 3	351.996.300,00
4	SMA Negeri 4	640.335.646,00
5	SMA Negeri 5	91.360.280,00
6	SMA Negeri 6	1.535.700.825,00
7	SMA Negeri 7	57.377.900,00
8	SMA Negeri 8	1.153.536.830,00
9	SMA Negeri 9	60.381.876,00
	Jumlah I	4.790.518.497,00
II	SMK NEGERI	
1	SMK Negeri 1	228.518.731,00
2	SMK Negeri 2	196.943.226,00
3	SMK Negeri 3	119.852.856,00
4	SMK Negeri 4	303.067.536,00
5	SMK Negeri 5	5.324.900,00

No.	Nama Sekolah	Aset Tetap Lainnya
6	SMK Negeri 6	2.964.500,00
	Jumlah II	856.671.749,00
III	SLB NEGERI	
1	SLB Negeri	50.720.999,95
	Jumlah III	50.720.999,95
JUMLAH TOTAL (I + II + III)		5.697.911.245,95

- 2) Reklasifikasi dari AT ke AL sebesar Rp 3.171.847.896,00 yang terdiri dari Setdakot sebesar Rp 618.070.200,00, Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 39.771.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp 46.666.400,00, RSKB Sayang Ibu sebesar Rp 3.300.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 1.556.667.796,00, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian sebesar Rp 112.810.000,00, Bappeda Litbang sebesar Rp 319.357.500,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 283.525.000,00 dan Disporapar sebesar Rp 191.680.000,00.
- 3) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp. 30.882.233.645,14.
- 4) Koreksi kurang sebesar Rp 303.047.371,60 yang terdiri dari Dinas Perhubungan sebesar Rp 121.907.593,75 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 181.139.777,55.
- 5) Koreksi kurang nilai aset tetap lainnya yang dibawah nilai minimum sebesar Rp 224.215.300,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 51.191.000,00 dan Kantor Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp 173.024.300,00.

5.5.3.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp 97.562.940.928,03 **Rp 93.017.352.937,22**

Nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 97.562.940.928,03 dan Rp 93.017.352.937,22 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2018 sebesar Rp 4.545.587.990,81.

Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2018 sebesar Rp 97.562.940.928,03 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.66
SALDO ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan 2017 Audited		93.017.352.938,28
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2018		
	a. Reklasifikasi dari AL ke AT	2.508.424.593,00	
	b. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	2.224.060.950,15	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		4.732.485.543,15
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2018		
	a. Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	100.429.243,54	
	b. Koreksi	86.468.308,80	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		186.897.552,34
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2018 (I+II-III)		97.562.940.928,53

- a. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 2018 Audited sebesar Rp 97.562.940.928,03.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2018 sebesar Rp 4.732.485.543,15 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp 2.508.424.593,00.
 - 2) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap sebesar Rp 2.224.060.950,15.
- c. Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 sebesar Rp 186.897.552,34 dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi) sebesar Rp 100.429.243,54.
 - 2) Koreksi kurang sebesar Rp 86.468.308,80 pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian yang merupakan belanja modal pembayaran sisa hutang tahun anggaran 2017.

5.5.4 ASET LAINNYA	Per 31 Desember 2018 Rp307.377.481.110,89	Per 31 Desember 2017 Rp331.251.658.054,13
---------------------------	---	---

Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan merupakan aset yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2018. Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.5.4.1 Tagihan Penjualan
Angsuran**

Per 31 Desember 2018
Rp 3.053.493.809,13

Per 31 Desember 2017
Rp2.488.801.655,92

Tagihan Penjualan Angsuran per 31Desember2018 sebesar Rp3.053.493.809,13 merupakan piutang angsuran yang belum dibayar/jatuh tempo yang timbul dari penjualan cicilan/angsuran aset milik Pemerintah Kota Balikpapan berupa Rumah Dinas berdasarkan SK Walikota Balikpapan Nomor 188.45-52/2004 tentang Penghapusan atas Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Penghapusan dari Daftar Inventarisasi Kekayaan Milik Pemerintah Kota Balikpapan dan SK Walikota Balikpapan tentang Penjualan rumah Daerah Gol III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemkot Balikpapan Nomor 188.45-07/2010 tgl 8 Januari2010.

Nilai tagihan penjualan angsuran Tahun 2018, jika dibandingkan dengan nilai Tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.67

Rincian Perbandingan Nilai Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Nilai TPA		Bertambah (Berkurang)
	TA 2018	TA 2017	
Tagihan penjualan angsuran	5.311.893.704,00	5.883.558.799,00	(571.665.095,00)
Penyisihan	(2.258.399.894,88)	(3.394.757.143,08)	1.136.357.248,22
Tagihan penjualan angsuran Netto	3.053.493.809,13	2.488.801.655,92	564.692.153,22

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada *Lampiran 25&26*

5.5.4.2 Tuntutan Ganti Rugi

Per 31 Desember 2018
Rp467.056.640,25

Per 31 Desember 2017
Rp607.610.211,06

Tuntutan Ganti Rugi per31 Desember 2018 setelah penyisihan sebesar Rp467.056.640,25 adalah Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang merupakan tagihan atas kerugian Pemerintah Kota Balikpapan yang belum dilunasi seluruhnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik dengan SK pembebanan, SKTJM dan putusan pengadilan.

Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2018, jika dibandingkan dengan nilai Tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.68

Rincian Perbandingan Nilai Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Jumlah (Rp)	
	TA 2018	TA 2017
Tuntutan Ganti Rugi	666.656.933,32	765.511.188,84
Penyisihan	(199.600.293,07)	(157.900.977,78)
Nilai Bersih	467.056.640,25	607.610.211,06

Rincian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada *Lampiran 27*.

5.5.4.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2018
Rp145.500.096.000,00

Per 31 Desember 2017
Rp145.500.096.000,00

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp145.500.096.000,00 merupakan nilai tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan yang diserahkan untuk dikelola kepada pihak ketiga (*Built, Operate, and Transfer*). Adapun aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah:

Tabel 5.69

Rincian Aset yang dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	Tanah (Rp)	Bangunan (Rp)	Pengakuan BOT (Rp)	Keterangan
1.	PT HASTA KREASI MANDIRI <u>No. 180/1060/Huk/2001</u> No.014/LGL/SPK/HKM/VII/01 23-07-2001 <u>No. 180/1060.A/Huk/2001</u> No.147/LGL/ADD-SPK/HKM/IX/0112-09-2001 Pembangunan dan Peremajaan Pasar Muara Rapak	40.429.200.000,00	74.925.450.000,00	40.429.200.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
2.	PT BINTANG HYTIEN JAYA <u>No.180/16/Pemkot-Perj/III/2004</u> No. 078/BHJ-Perj III/2004 29-03-2004 Pembangunan dan Pengelolaan Balikpapan Plaza Hotel	12.680.000.000,00	120.000.000.000,00	12.680.000.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
3.	PT HASTA KREASI MANDIRI <u>No. 644.1/1087/PP/XII/2004</u> No.060/LGL/HKM-PKS/XII/200415-12-2004 <u>No. 644.1/1087.A/PP/2007</u> No.017/LGL/HKM-AD.I.PKS/XI/200707-11-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Balikpapan (Pasar Baru Square)	75.850.000.000,00	450.000.000.000,00	75.850.000.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
4.	PT GUSHER MITRA SEJAHTERA <u>No. 030/59/PP-II/2007</u> No.001-PK/GNS-Pmd.Bpn/II/200702-02-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur	16.540.896.000,00	104.517.000.000,00	16.540.896.000,00	- Perjanjian Kerjasama - Pembangunan selesai
	Jumlah	145.500.096.000,00	749.442.450.000,00	145.500.096.000,00	

5.5.4.4 Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2017

Rp143.145.044.132,36**Rp 138.486.337.085,60**

Aset tak berwujud tahun 2018 sebesar Rp 143.145.044.132,36 terdiri dari kajian dan software merupakan nilai sebelum amortisasi sebesar Rp(63.421.499.226,95)

Perhitungan Nilai Buku Aset tidak berwujud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.70**Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018**

Uraian	Saldo Sebelum Amortisasi	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2018	Nilai Buku Per 31 Desember 2018
Aset Tak Berwujud	143.145.044.132,36	63.421.499.226,95	79.723.544.905,41

Nilai Perolehan mutasi aset tidak berwujud sebelum amortisasi per 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.71**Mutasi Aset Tak Berwujud Sebelum Amortisasi per 31 Desember 2018***(Dalam Rupiah)*

Jenis Aset	Saldo Awal (Audited)	Mutasi Tambah Tahun 2018	Mutasi Kurang Tahun 2018	Saldo Akhir Per 31 Des 2018
Aset Tak Berwujud	138.486.337.085,60	9.539.788.340,99	6.500.208.634,23	143.145.044.132,36

5.5.4.5 Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2018

Per 31 Desember 2017

Rp78.633.289.756,09**Rp120.611.757.492,56**

Aset lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp78.633.289.756,09 adalah nilai aset lain-lain Pemerintah Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72**Rincian Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018**

No.	Uraian	Nilai 2018 (Rp)	Nilai 2017(Rp)	Keterangan
1.	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	2.793.810.285,68	2.773.442.054,45	Semula dicatat dalam kelompok investasi non permanen-dana bergulir
2.	Persediaan Obat Kadaluwarsa	10.742.772,00	1.419.058,72	Persediaan Obat RSKB Sayang Ibu yang expired
3.	Saldo Aset Tetap yang menunggu penghapusan	63.953.810.439,76	83.460.394.370,74	Merupakan Aset yang diusulkan untuk dihapus
4.	Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut	671.311.591,00	671.311.591,00	Aset yang memerlukan penelusuran lebih lanjut

No.	Uraian	Nilai 2018 (Rp)	Nilai 2017(Rp)	Keterangan
5.	Aset tetap sengketa yang dimenangkan penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>incraht</i>), namun masih dalam proses penghapusan	-	22.644.000.000,00	a. Tanah Taman Bekapai (Eks. Lapangan Veteran), luas 4.800 M2 senilai 12.000.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 592 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Januari 2003 yang amar putusanya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK yakni Pemerintah Kota Balikpapan. b. Tanah Pasar Blauran dan sebagian Pasar Ikan Klandasan seluas 27.096 M2 senilai Rp40.644.000.000,00 sesuai putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor 2204K/Pdt/2007 tanggal 2 Juni 2009 yo putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor 639 PK/Pdt/2010 tanggal 11 April 2011.
6.	Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang akan dilikuidasi	8.696.000.000,00	8.696.000.000,00	Reklasifikasi dari Investasi Permanen
7.	Uang Jaminan Reklame dan Uang Jaminan Sewa Rusunawa	2.507.614.667,65	2.365.190.417,65	a. Jaminan reklame yang bertujuan untuk jaminan pembongkaran kontruksi reklame pada OPD DPMP2T senilai Rp1.970.875.417,65 b. Jaminan sewa rusunawa apabila penyewa tidak membayar tagihan selama tiga bulan berturut-turut pada OPD Disperkim senilai Rp536.739.250,00
	Jumlah	78.633.289.756,09	120.611.757.492,56	

Penjelasan aset lain-lain :

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Rp2.793.810.285,68

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.773.442.054,45 merupakan uang jaminan atas pinjaman para pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kota Balikpapan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Bank Kaltim dan PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 180/Hk/XI/2006, Nomor 077/BPD-PST/PRJ/XI/2006, Nomor PPK/PKS/28/XI/2006 tanggal 29 November 2006. Menurut isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap pinjaman dari pengusaha mikro Kota Balikpapan yang mengalami macet, Pemerintah Kota Balikpapan akan menanggung sebesar 35% dari jumlah kredit yang macet, sedangkan sisanya ditanggung oleh Bank Kaltim sebesar 30% dan PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar 35%.

Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya disimpan dalam bentuk giro pada Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0031440777.

Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang akan dilikuidasi Rp8.696.000.000,00

Penyertaan modal pada Kapal Ferry Cepat sebesar Rp8.696.000.000,00 telah direklasifikasi dari Investasi Permanen Pemkot Balikpapan menjadi aset lain-lain per 31 Desember 2013. Penjelasan lebih lanjut tentang Penyertaan pada Kapal Ferry Cepat (KFC) sebesar Rp8.696.000.000,00 dapat dikemukakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 dilakukan kesepakatan bersama oleh Walikota Balikpapan, Walikota Bontang, Bupati Kutai Timur, Bupati Paser dan Direktur Utama PT Agro Bintang Dharma Nusantara menerangkan dan bermufakat sebagai berikut:

1. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2002 Nomor 35 dibuat dihadapan ADI GUNAWAN, SH, notaris di Balikpapan para Pihak telah mendirikan Perseroan Terbatas ‘PT PELAYARAN BINTANG KALTIM TRANSPORT’ berkedudukan di Balikpapan;
 - b. Bahwa Perseroan Terbatas tersebut hingga saat ini masih belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia karena persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pengesahan dari yang berwajib tersebut belum dipenuhi pendiri;
 - c. Bahwa oleh karena hingga saat ini Perseroan Terbatas tersebut belum menjadi badan hukum karena tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada instansi yang berwenang maka berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport tersebut bubar karena hukum.
 - d. Bahwa oleh karena PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport tersebut bubar karena hukum maka para pendiri bermaksud untuk mengadakan pemberesan dengan jalan menjual semua aset atas nama PT Bintang Kaltim Transport tersebut.
2. Bermufakat untuk:
 - a. Menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport tetapi tidak terbatas pada 2(dua) unit kapal;
 - b. Menunjuk Kantor Pelayanan Lelang Negara untuk menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport secara lelang dan hasil lelang dikurangi ongkos-ongkos, sisanya akan dibagi berdasarkan perbandingan uang yang telah disetor ke dalam PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport;
 - c. Apabila hasil penjualan aset kurang dari biaya-biaya/ongkos-ongkos yang wajib dibayar maka kekurangan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak dengan bagian yang sama;
 - d. Menunjuk Pemerintah Kota Balikpapan bertindak untuk dan atas nama pendiri melaksanakan penjualan aset termasuk menjual dan berhubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan penilaian aset;
 - e. Tentang kesepakatan bersama ini dengan semua akibatnya para pendiri PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut Pos Investasi Permanen Kapal Ferry Cepat disajikan pada pos aset lain-lain.

5.5.5.1 KEWAJIBAN	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
JANGKA PENDEK	Rp46.541.783.421,62	Rp53.373.318.626,52

Kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2018 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yaitu Pendapatan diterima di muka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

**5.5.5.1.1 Pendapatan Diterima
Di Muka**

Per 31 Desember 2018
Rp2.957.168.584,95

Per 31 Desember 2017
Rp2.453.148.084,85

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diperoleh dari beberapa retribusi dan sewa lahan atas pihak ketigayang telah diterima di RKUD Kota Balikpapan atas manfaat yang baru akan diberikan pada periode-periode berikutnya. Pendapatan diterima di muka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.73

Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017

NO	NAMA OPD	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2018 (Rp)	JUMLAH TAHUN 2017 (Rp)
1	BPKD	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Lahan	300.221.978,00	245.318.400,00
2	DISNAKERSOS	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	47.070.772,60	165.720.476,71
3	DPU	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM	121.866.053,00	207.780.821,92
4	DINAS PASAR	Sewa Petak Pasar	-	20.056.842,10
5	DISPENDA	Pajak Reklame	491.975.455,14	599.745.769,88
6	RSUD	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM	10.800.000,00	29.221.674,88
7	BPBD	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	570.895.921,80	474.562.744,16
8	DISHUB	Izin Trayek (Angkot & Taxi)	26.422.885,67	9.744.908,83
		Pengujian Kendaraan Bermotor - diatas Air	-	11.613.325,01
		Parkir di Tepi Jalan Umum - Berlangganan	876.062.397,26	244.433.292,83
		Pengujian Kendaraan Bermotor - Darat	436.161.947,78	434.951.428,52
9	BPKD	BOT Pasar Baru Square	-	9.998.400,00
10	DPMPPT	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	75.691.173,70	-
JUMLAH			2.957.168.584,95	2.453.148.084,85

Daftar mutasi pendapatan diterima di muka Tahun 2018 dapat dilihat pada *Lampiran 28*

5.5.5.1.2 Utang Belanja

Per 31 Desember 2018
Rp38.755.732.114,57

Per 31 Desember 2017
Rp48.436.364.533,98

Utang Belanja sebesar Rp38.755.732.114,57 merupakan kewajiban yang belum dibayarkan sampai periode tahun anggaran 2018 berakhir. Utang Belanja terdiri atas :

1. Belanja jasa listrik, air, telpon, internet dan barang jasa lainnya pada beberapa OPD.
2. Utang tunjangan kinerja PNS, tambahan penghasilan PNS, Insentif Pemungutan Pajak dan Gaji Terusan
3. Utang jasa layanan pada BLUD

Rincian Utang Belanja OPD per 31 Desember 2018 dapat dilihat di *Lampiran 29* sedangkan Utang pada BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 30*

5.5.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2018
Rp5.586.698.089,29

Per 31 Desember 2017
Rp2.485.306.007,69

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5.586.698.089,29 merupakan utang atas tunjangan profesi guru yang belum terbayar per 31 Desember 2018, utang pada BLUD, utang atas kelebihan pembayaran pajak dan utang jaminan rekalmu dan rusunawa. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.74

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	OPD	TAHUN 2018	TAHUN 2017	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN (TUNJANGAN PENGHASILAN GURU)	Dinas Pendidikan	279.790.700,00	27.683.750,00	252.106.950,00
2	KAS DI FKTP	Dinas Kesehatan	0,00	4.324.552,04	(4.324.552,04)
3	Utang Jamkesprov 2015	Dinas Kesehatan	2.713.134.970,00	0,00	2.713.134.970,00
4	KAS PROLANIS	(BLUD)	0,00	10.958.000,00	(10.958.000,00)
5	UTANG ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	BPPDRD	79.342.298,00	77.149.288,00	2.193.010,00
6	Utang Jaminan Reklame	DPMPT	1.970.875.417,65	1.988.735.417,65	(17.860.000,00)
7	Utang Jaminan Rusunawa	Disperkim	536.739.250,00	376.455.000,00	160.284.250,00
JUMLAH			5.579.882.635,65	2.485.306.007,69	3.094.576.627,96

5.5.6 EKUITAS

Per 31 Desember 2018
Rp11.027.467.902.228,40

Per 31 Desember 2017
Rp7.810.087.982.897,83

Ekuitas sebesar Rp11.027.467.902.228,40 terdiri dari jumlah ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional dan Ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Ekuitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penambahan sebesar Rp 3.217.379.919.330,61 atau 41,20% seperti yang dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.75
Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017

No.	URAIAN	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	EKUITAS	11.027.467.902.228,40	7.810.087.982.897,83	3.217.379.919.330,61	41.20
	Jumlah	11.027.467.902.228,40	7.810.087.982.897,83	3.217.379.919.330,61	41.20

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Kota Balikpapan. Laporan Operasional disusun dengan basis akrual dengan pengakuan pendapatan dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah tanpa memperhatikan kas/setara kas telah diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Laporan Operasional (LO) akan dijelaskan secara lebih jauh sebagai berikut :

5.6 PENDAPATAN - LO Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp2.272.392.933.726,35 Rp1.957.465.416.449,90

Merupakan pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Pendapatan Daerah Kota Balikpapan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 76
Pendapatan LO TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	684.798.196.412,59	671.575.084.198,40	13.223.112.214,19
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.581.114.431.748,00	1.283.402.278.368,00	297.712.153.380,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	6.480.305.565,76	2.488.053.883,50	3.992.251.682,26
	Jumlah	2.272.392.933.726,35	1.957.465.416.449,90	314.927.517.276,45

5.6.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
684.798.196.412,59 671.575.084.198,40

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp684.798.196.412,59 yang terdiri dari:

Tabel 5. 77
Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	499.676.211.517,64	483.118.162.347,84	16.558.049.169,80
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	56.586.216.909,12	58.517.658.673,71	(1.931.441.764,59)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	14.360.001.940,84	28.040.851.815,93	(13.680.849.875,09)
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	114.175.766.044,99	101.898.411.360,92	12.277.354.684,07
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	684.798.196.412,59	671.575.084.198,40	13.223.112.214,19

Dari daftar tabel di atas dapat dijelaskan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO dan yang mempengaruhinya, yaitu :

5.6.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Per 31 Desember 2018
499.676.211.517,64

Per 31 Desember 2017
483.118.162.347,84

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp499.676.211.517,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 78
Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2018 dan 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	499.676.211.517,64	483.118.162.347,84	16.558.049.169,80
Pajak Hotel - LO	43.879.520.093,00	41.789.257.635,00	2.090.262.458,00
Pajak Restoran - LO	83.795.407.926,00	66.651.751.694,00	17.143.656.232,00
Pajak Hiburan - LO	24.543.989.721,00	20.599.168.727,00	3.944.820.994,00
Pajak Reklame - LO	9.817.345.462,74	8.196.448.895,39	1.620.896.567,35
Pajak Penerangan Jalan - LO	105.884.546.872,00	103.528.130.820,00	2.356.416.052,00
Pajak Parkir - LO	19.930.017.255,00	17.524.710.030,00	2.405.307.225,00
Pajak Air Tanah - LO	2.549.765.328,20	2.435.810.067,60	113.955.260,60
Pajak Sarang Burung Walet - LO	43.765.000,00	46.517.000,00	(2.752.000,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.179.041.125,00	5.531.850.000,00	(4.352.808.875,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	122.457.903.404,00	122.471.654.779,60	(13.751.375,60)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	85.594.909.330,70	94.342.862.699,25	(8.747.953.368,55)

Keseluruhan jenis pajak daerah di atas mempengaruhi mutasi penambahan/pengurangan akun piutang pajak daerah Kota Balikpapan.

5.6.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Per 31 Desember 2018
Rp56.586.216.909,12

Per 31 Desember 2017
Rp58.517.658.673,71

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp56.586.216.909,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 79
Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2018 dan 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	56.586.216.909,12	58.517.658.673,71	(1.931.441.764,59)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.443.565.575,00	3.752.401.727,31	(2.308.836.152,31)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	13.550.376.724,00	10.390.965.110,00	3.159.411.614,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	2.100.483.495,57	1.153.132.782,19	947.350.713,38
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	6.256.900.597,10	5.895.015.892,95	361.884.704,15
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	2.743.162.805,75	1.856.533.768,10	886.629.037,65
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	1.993.885.043,57	879.725.035,17	1.114.160.008,40
Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	0	133.758.750,00	(133.758.750,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	195.353.400,00	139.171.575,00	56.181.825,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	745.307.200,00	695.487.200,00	49.820.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	6.519.032.486,56	4.322.161.657,88	2.196.870.828,68
Retribusi Tempat Pelelangan - LO	140.380.500,00	24.450.000,00	115.930.500,00
Retribusi Terminal - LO	22.714.500,00	28.996.000,00	(6.281.500,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	126.903.000,00	0	126.903.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	376.486.250,00	337.215.350,00	39.270.900,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	526.225.000,00	102.185.500,00	424.039.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	3.271.650.000,00	2.276.815.000,00	994.835.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	6.295.000,00	0	6.295.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	16.034.738.178,00	11.569.185.265,00	4.465.552.913,00
Retribusi Izin Gangguan - LO	-33.879.000,00	14.586.185.292,58	(14.620.064.292,58)
Retribusi Izin Trayek - LO	124.072.023,16	45.354.498,49	78.717.524,67
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	264.944.130,41	193.878.269,04	71.065.861,37
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan - LO	177.620.000,00	135.040.000,00	42.580.000,00

**5.6.1.3 Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LO**

Per 31 Desember 2018
Rp14.360.001.940,84

Per 31 Desember 2017
Rp28.040.851.815,93

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp14.360.001.940,84 merupakan pembagian laba (dividen) atas penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan pada PDAM dan Bank Kaltim

5.6.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO**Per 31 Desember 2018**
Rp114.175.766.044,99**Per 31 Desember 2017**
Rp101.898.411.360,92

Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp114.175.766.044,99 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 80
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO TA 2018 dan 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	114.175.766.044,99	101.898.411.360,92	12.277.354.684,07
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	48.897.300,00	44.055.200,00	4.842.100,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	1.285.315.916,89	2.442.442.091,53	(1.157.126.174,64)
Pendapatan Bunga - LO	11.458.664.346,23	1.608.561.624,60	9.850.102.721,63
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0,00	32.652.849,00	(32.652.849,00)
Pendapatan Denda Pajak - LO	3.382.245.774,00	3.675.351.702,00	(293.105.928,00)
Pendapatan Denda Retribusi - LO	653.714.272,02	630.040.024,00	23.674.248,02
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	399.333.859,00	39.066.689,00	360.267.170,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
Pendapatan BLUD - LO	83.013.433.213,01	75.978.271.385,86	7.035.161.827,15
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	6.815.453,64	1.132.960.473,78	(1.126.145.020,14)
Rekening Listrik Pasar - LO	0,00	10.068.525,00	(10.068.525,00)
Sewa Pemakaian Gedung - LO	0,00	(187.328.007,02)	187.328.007,02
Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel - LO	1.199.998.400,00	1.775.168.486,00	(575.170.086,00)
Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	8.470.484.527,54	10.264.083.378,27	(1.793.598.850,73)
Pendapatan Tak Terduga.	4.256.862.982,66	4.451.516.938,90	(194.653.956,24)

5.6.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO**Per 31 Desember 2018**
1.581.114.431.748,00**Per 31 Desember 2017**
1.283.402.278.368,00

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.581.114.431.748,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 81
Pendapatan Transfer- LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.096.230.492.809,00	817.394.319.468,00	278.836.173.341,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	167.488.330.939,00	152.578.941.900,00	14.909.389.039,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	317.395.608.000,00	313.429.017.000,00	3.966.591.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	1.581.114.431.748,00	1.283.402.278.368,00	297.712.153.380,00

Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Dari rincian diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Pendapatan Transfer-LO menggambarkan kinerja Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2018, Pendapatan Transfer-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

5.6.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	Per 31 Desember 2018 Rp1.096.230.492.809,00	Per 31 Desember 2017 Rp817.394.319.468,00
----------------	--	---	---

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.096.230.492.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 82
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan- LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Bagi Hasil Pajak	123.953.578.235,00	143.138.978.011,00	(19.185.399.776,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	469.470.265.663,00	220.016.427.595,00	249.453.838.068,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	410.543.293.000,00	392.621.094.000,00	17.922.199.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	92.263.355.911,00	61.617.819.862,00	30.645.536.049,00
JUMLAH	1.096.230.492.809,00	817.394.319.468,00	278.836.173.341,00

5.6.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	Per 31 Desember 2018 Rp167.488.330.939,00	Per 31 Desember 2017 Rp152.578.941.900,00
----------------	---	---	---

Merupakan pendapatan transfer yang terdiri dari Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru serta Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2018.

5.6.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Per 31 Desember 2018 Rp317.395.608.000,00	Per 31 Desember 2017 Rp313.429.017.000,00
----------------	--	---	---

Untuk Tahun 2018 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebesar Rp317.395.608.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi, seperti pada tabel berikut :

Tabel 5. 83
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	317.395.608.000,00	313.429.017.000,00	3.966.591.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	266.566.196.000,00	261.156.517.000,00	5.409.679.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi-LO	50.829.412.000,00	52.272.500.000,00	(1.443.088.000,00)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mempengaruhi akun Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

5.6.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	Per 31 Desember 2018 Rp6.480.305.565,76	Per 31 Desember 2017 Rp2.488.053.883,50
--------------	--	---	---

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.480.305.565,76. Pendapatan Hibah terdiri Bantuan dari Pemerintah Pusat dalam program AUSAID dan Hibah Aset yang diterima oleh beberapa OPD.

5.7	BEBAN – LO	Per 31 Desember 2018 1.864.551.144.474,25	Per 31 Desember 2017 1.642.235.691.282,21
------------	-------------------	---	---

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan. Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Beban LO terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 84
Beban - LO TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Beban Operasi	1.863.830.469.818,25	1.641.159.452.794,21	222.671.017.024,04
3.	Beban Transfer	720.674.656,00	1.076.238.488,00	(355.563.832,00)
	Jumlah Beban	1.864.551.144.474,25	1.642.235.691.282,21	222.315.453.192,04

5.7.1 BEBAN OPERASI – LO Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp1.863.830.469.818,25 Rp1.641.159.452.794,21

Beban Operasi Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2018 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 85
Rincian Beban Operasi LO TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Beban Pegawai LO	734.319.809.837,79	615.185.930.199,91	119.133.879.637,88
2.	Beban Persediaan LO	42.035.113.084,42	36.266.679.273,26	5.768.433.811,16
3.	Beban Barang dan Jasa LO	554.332.328.898,39	519.445.491.134,45	34.886.837.763,94
4.	Beban Pemeliharaan	47.258.370.604,94	41.370.193.288,00	5.888.177.316,94
5.	Beban Perjalanan Dinas	64.774.798.862,12	48.503.655.702,54	16.271.143.159,58
6.	Beban Subsidi	800.000.000,00	1.000.000.000,00	(200.000.000,00)
7.	Beban Hibah	68.336.760.377,00	67.248.807.434,00	1.087.952.943,00
8.	Beban Bantuan Sosial	1.370.225.940,00	117.323.700,00	1.252.902.240,00
9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	331.395.611.514,30	313.162.759.392,49	18.232.852.121,81
10.	Beban Penyisihan Piutang	19.207.350.699,29	(1.514.350.069,88)	20.721.700.769,17
11.	Beban Lain-lain	100.000,00	372.962.739,44	(372.862.739,44)
12.	Beban Kerugian dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	-
	Jumlah Beban Operasi	1.863.830.469.818,25	1.641.159.452.794,21	222.671.017.024,04

5.7.1.1 Beban Pegawai – LO Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp734.319.809.837,79 615.185.930.199,91

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp734.319.809.837,79 dan Rp615.185.930.199,91. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNSD sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas di Pemkot Balikpapan. Beban barang dan jasa dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 88
Rincian Beban Barang dan Jasa- LO TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Beban Barang dan Jasa	554.332.328.898,39	519.445.491.134,45	34.886.837.763,94
Beban Jasa Kantor	80.287.115.546,84	64.027.869.685,22	16.259.245.861,62
Beban Premi Asuransi	4.323.026.325,00	4.212.397.192,60	110.629.132,40
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	35.607.246.438,75	31.613.661.639,50	3.993.584.799,25
Beban Cetak dan Penggandaan	11.666.396.459,00	11.392.889.813,00	273.506.646,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.876.700.698,64	3.448.956.402,57	(1.572.255.703,93)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.738.086.300,00	997.885.500,00	740.200.800,00
Beban Sewa Alat Berat	-	734.888.000,00	(734.888.000,00)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.541.719.214,00	5.492.488.959,00	1.049.230.255,00
Beban Makanan dan Minuman	59.276.232.271,00	55.077.312.465,34	4.198.919.805,66
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.321.154.100,00	1.327.487.250,00	(6.333.150,00)
Belanja Pakaian Kerja	4.780.825.320,00	2.606.375.830,00	2.174.449.490,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.002.686.447,00	1.087.680.725,00	2.915.005.722,00
Beban Jasa Konsultasi	2.134.090.260,00	1.258.774.500,00	875.315.760,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.099.400.445,00	135.029.929,00	14.964.370.516,00
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	7.413.811.136,00	(7.413.811.136,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	122.305.909,00	284.330.229,00	(162.024.320,00)
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.990.991.515,49	2.053.534.282,00	2.937.457.233,49
Honorarium PNS	2.780.350.000,00	34.565.555.119,16	(31.785.205.119,16)
Honorarium Non PNS	160.839.229.278,00	153.592.053.330,00	7.247.175.948,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.273.100.000,00	2.295.100.000,00	1.978.000.000,00
Beban Pegawai BLUD RSKB Sayang Ibu	3.272.535.681,74	4.016.124.232,95	(743.588.551,21)
Beban Pegawai BLUD Puskesmas	8.704.506.893,30	5.627.902.822,64	3.076.604.070,66
Beban Pegawai Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	5.113.268.034,00	6.628.973.028,00	(1.515.704.994,00)
Beban Barang Dana Bos	260.215.348,00	49.372.953.342,00	(49.112.737.994,00)
Beban Barang KAPITASI JKN	2.193.044.680,33	3.856.288.979,73	(1.663.244.299,40)
Beban Jasa Berlangganan	250.791.234,24	314.285.427,23	(63.494.192,99)
Beban Pemeriksaan Laboratorium	334.332.385,00	193.424.188,00	140.908.197,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	5.162.620.999,00	2.452.101.288,00	2.710.519.711,00
Beban Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu	3.966.178.895,56	3.386.220.572,53	579.958.323,03
Beban Barang Perlengkapan Kantor	5.300.000,00	7.050.500,00	(1.750.500,00)
Beban Barang Perlengkapan Dapur	15.222.000,00	26.695.000,00	(11.473.000,00)

Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Beban Penyelesaian Perkara Hukum	94.500.000,00	142.000.000,00	(47.500.000,00)
Beban Kontribusi Lomba	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Beban Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	948.753.750,00	1.246.477.390,00	(297.723.640,00)
Beban Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	13.159.738.133,00	9.825.283.971,00	3.334.454.162,00
Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	4.422.274.400,49	2.815.447.075,51	1.606.827.324,98
Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)	1.755.700.400,00	2.146.138.450,00	(390.438.050,00)
Beban Pengadaan Perlengkapan Penghias ruangan	-	6.820.000,00	(6.820.000,00)
Beban Jasa Perizinan	8.123.592,00	4.748.592,00	3.375.000,00
Beban Barang Alat Kesehatan	-	33.219.000,00	(33.219.000,00)
Beban Tim Pemandu Haji Daerah	130.000.000,00	106.601.800,00	23.398.200,00
Beban Pegawai Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	60.432.000,00	(60.432.000,00)
Beban Belanja Pegawai BLUD RSUD	22.131.527.117,63	27.937.679.977,37	(5.806.152.859,74)
Beban Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	25.298.564.533,38	15.570.541.510,10	9.728.023.023,28
Beban Pegawai Dana BOS	8.899.782.754,00	-	8.899.782.754,00
Beban Barang dan Jasa Dana BOS	46.494.691.539,00	-	46.494.691.539,00

Perlu diinformasikan bahwa terjadi koreksi rincian saldo awal beban barang dan jasa tahun 2018 karena perbaikan *mapping* akun LO di tahun 2018

5.7.1.4 Beban Pemeliharaan- LO Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp47.258.370.604,94 Rp41.370.193.288,00

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp47.258.370.604,94 dan Rp41.370.193.288,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal.

5.7.1.5 Beban Perjalanan Dinas- LO Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp64.774.798.862,12 Rp48.503.655.702,54

Beban Perjalanan Dinas tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp64.774.798.862,12 dan Rp48.503.655.702,54. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

5.7.1.6 Beban Subsidi - LO Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp800.000.000,00 Rp1.000.000.000,00

Beban Subsidi tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp Rp800.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk mensubsidi Operasional Bus Sekolah yang dikelola Perusda Kota Balikpapan

5.7.1.7 Beban Hibah - LO Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp68.336.760.377,00 Rp67.248.807.434,00

Jumlah Beban Hibah Pemerintah Kota Balikpapan untuk Tahun 2018 sebesar Rp68.336.760.377,00 yang terdiri atas beban hibah untuk Kelompok, Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar. Rincian beban hibah Tahun 2018 dan 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 89
Rincian Beban hibah TA 2018 dan TA 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Hibah	68.336.760.377,00	67.248.807.434,00	1.087.952.943,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	8.517.000.000,00	8.113.650.000,00	403.350.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	44.691.717.751,00	33.717.516.035,00	10.974.201.716,00
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***	15.128.042.626,00	25.417.641.399,00	(10.289.598.773,00)

5.7.1.8	Beban Bantuan Sosial - LO	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
		Rp1.370.225.940,00	Rp395.455.840,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.370.225.940,00 dan Rp395.455.840,00. Beban tersebut merupakan beban untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

5.7.1.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
		Rp331.395.611.513,48	Rp313.162.759.392,49

Jumlah Beban penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp331.395.611.513,48 dan Rp313.162.759.392,49. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

5.7.1.10	Beban Penyisihan Piutang - LO	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
		Rp19.207.350.699,29	Rp(1.514.350.069,88)

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp19.207.350.699,29 dan Rp(1.514.350.069,88) merupakan beban penyisihan atas Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya. Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 90
Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2018 dan TA 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Penyisihan Piutang	19.207.350.699,29	(1.514.350.069,88)	20.721.700.769,17

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	19.165.651.384,00	(2.470.931.438,02)	21.636.582.822,02
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	41.699.315,29	(956.717.842,40)	998.417.157,69
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-LO	0,00	1.913.299.210,54	(1.913.299.210,54)

Beban penyisihan piutang pendapatan terdiri atas beban penyisihan piutang pajak, retribusi, tranfer pemerintah dan piutang lainnya.

5.7.1.11 Beban Lain-lain- LO	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	Rp100.000,00	Rp372.962.739,44

Jumlah Beban Lain-lain Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp100.000,00 dan Rp372.962.739,44. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap (dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi) dan beban penyisihan investasi dana bergulir. Rincian beban lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 91
Rincian Beban Lain-lain TA 2018 dan TA 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
Beban Lain-lain	100.000,00	372.962.739,44	(372.862.739,44)
Beban Penyisihan Dana Bergulir	0.00	8.696.467,25	(8.696.467,25)
Beban Lain-lain	100.000,00	364.266.272,19	(364.166.272,19)

5.7.2. Beban Transfer - LO	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	Rp720.674.656,00	Rp1.076.238.488,00

Jumlah Beban Transfer Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp720.674.656,00 dan Rp1.076.238.488,00. Beban transfer merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi Partai Politik pada Tahun Anggaran 2018.

5.8 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional – LO	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	Rp0,00	Rp(708.039.038,00)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp708.039.038,00 yang diperoleh dari penghapusan aset tetap yang dilakukan selama periode Tahun 2018

5.9 Pos Luar Biasa	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
	Rp (3.456.134.384,00)	Rp (177.850.000,00)

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp(3.456.134.384,00) dan Rp(177.850.000,00).

5.9.1	SURPLUS/DEFISIT - LO	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
		Rp404.385.654.868,92	Rp314.343.836.129,69

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah selisih antara pendapatan LO dan Beban, Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp404.385.654.868,92 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada tahun 2017 sebesar Rp314.343.836.129,69

E. LAPORAN ARUS KAS

Penyajian laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

5.8	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
		717.597.496.613,93	564.618.895.713,58

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp717.597.496.613,93 menunjukkan bahwa penerimaan kas dari aktivitas operasi lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dimana arus masuk kas adalah sebesar Rp2.230.227.095.233,10 dan arus keluar kas sebesar Rp1.512.629.598.619,17

Adapun rincian arus kas dari aktivitas operasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 92

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian		Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Arus Kas Masuk:				
-	Pendapatan Pajak Daerah	474.455.854.717,30	450.213.740.232,52	24.242.114.484,78
-	Pendapatan Retribusi Daerah	55.054.750.772,39	47.563.009.260,52	7.491.741.511,87
-	Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.360.001.940,84	15.163.120.190,93	(803.118.250,09)
-	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	102.488.274.054,57	98.810.811.326,04	3.677.462.728,53
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.953.578.235,00	143.138.978.011,00	(19.185.399.776,00)
-	Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	469.470.265.663,00	220.016.427.595,00	249.453.838.068,00
-	Pendapatan Dana Alokasi Umum	410.543.293.000,00	392.621.094.000,00	17.922.199.000,00
-	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	92.263.355.911,00	61.617.819.862,00	30.645.536.049,00
-	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	167.488.330.939,00	152.578.941.900,00	14.909.389.039,00
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	266.019.978.000,00	237.077.189.000,00	28.942.789.000,00
-	Dana Hibah	3.300.000.000,00	2.394.000.000,00	906.000.000,00
-	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi	50.829.412.000,00	52.272.500.000,00	(1.443.088.000,00)

Uraian		Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Jumlah		2.230.227.095.233,10	1.873.467.631.378,01	356.759.463.855,09
Arus Kas Keluar:				
-	Belanja Pegawai	726.387.818.545,85	574.721.273.231,75	151.666.545.314,10
-	Belanja Barang dan Jasa	711.557.984.716,32	664.507.242.810,68	47.050.741.905,64
-	Belanja Subsidi	800.000.000,00	1.000.000.000,00	(200.000.000,00)
-	Belanja Hibah	68.336.760.377,00	67.248.807.434,00	1.087.952.943,00
-	Bantuan Sosial	1.092.093.800,00	117.323.700,00	974.770.100,00
-	Bantuan Keuangan	998.806.796,00	1.076.238.488,00	(77.431.692,00)
-	Belanja Tidak Terduga	3.456.134.384,00	177.850.000,00	3.278.284.384,00
Jumlah		1.512.629.598.619,17	1.308.848.735.664,43	203.780.862.954,74
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		717.597.496.613,93	564.618.895.713,58	152.978.600.900,35

Jumlah arus kas masuk pada aktivitas operasi berbeda dengan realisasi pendapatan di LRA karena penjualan aset tetap sebesar Rp509.526.000,00 yang tercatat pada Lain-lain PAD yang Sahdisajikan ke dalam arus kas aktivitas investasi .

5.9 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Per 31 Desember 2018 **Rp(607.831.051.920,58)** Per 31 Desember 2017 **Rp(451.392.196.111,42)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berjumlah sebesar Rp(607.831.051.920,58) yang didapat selisih arus kas masuk dari penjualan aset tetap sebesar 509.526.000,00 dengan jumlah arus kas keluar dari realisasi belanja modal sebesar Rp608.340.577.920,58.

5.10 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2018 **Rp(17.359.334.478,00)** Per 31 Desember 2017 **Rp(17.560.935.578,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp(17.359.334.478,00)menunjukkan tidak ada arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan arus keluar kas sebesarRp(17.359.334.478,00)digunakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah ke PDAM Kota Balikpapan dan Bankaltimtara cabang Balikpapan.

5.11 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2018 **Rp0,00** Per 31 Desember 2017 **Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 masing masing sebesar Rp23.053.244.351,00

Dari arus kas bersih masing-masing aktivitas diatas dapat dihitung kenaikan/penurunan kas selama periode tahun 2018 dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	717.597.496.613,93	564.618.895.713,58
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(607.831.051.920,58)	(451.392.196.111,42)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(17.359.333.478,00)	(17.560.935.578,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas	92.407.111.215,35	95.665.764.024,16
Saldo Awal Kas di BUD & Pengeluaran	198.234.445.532,00	102.568.681.508,55
Saldo Akhir Kas di BUD & Pengeluaran	290.641.556.747,35	198.234.445.532,71
Saldo Akhir Kas terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	243.865.606.301,90	152.086.042.210,57
Pengeluaran	1.170.000,00	0,00
Penerimaan	140.669.256,00	89.615.400,00
Kas di BLUD dan JKN	47.627.840.870,65	47.067.800.154,14
Saldo Akhir Kas	291.635.286.428,55	199.243.457.764,71

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.14.1 EKUITAS AWAL	Per 31 Desember 2018 7.810.087.982.897,83	Per 31 Desember 2017 7.530.256.161.697,46
----------------------------	---	---

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp7.810.087.982.897,83 yang merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2017

5.14.2 SURPLUS /(DEFISIT) LO	Per 31 Desember 2018 404.385.654.868,10	Per 31 Desember 2017 314.343.836.129,69
-------------------------------------	---	---

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp404.385.654.868,10. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.14.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	Per 31 Desember 2018 Rp2.812.994.264.462,52	Per 31 Desember 2017 Rp(34.512.014.929,32)
---	---	--

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut:

Tabel 5. 93

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2018

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Per 31 Desember 2017 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 disusun berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018. Laporan keuangan dimaksud meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Neraca Dacrah
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan OPD dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan penerapan belanja daerah yang berprinsip pada pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut Ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SAP.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2018 ini, Pemerintah Kota Balikpapan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk terwujudnya Pemerintahan Kota Balikpapan yang sarat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang semakin sempurna dan melalui penyajian laporan keuangan yang semakin berkualitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.

